PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

KECAMATAN MUARA JAWA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

Alamat : Jln. Ir. Soekarno No. 58 Kel. Muara Jawa Ulu
Website : www.muarajawa.id
e-mail: kecmuarajawa2020@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya berkat rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu.

Laporan Kinerja Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-3 pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Muara Jawa Tahun 2021 - 2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Kecamatan Muara Jawa Tahun 2021 – 2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kecamatan Muara Jawa. Kinerja Kecamatan Muara Jawa diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Muara Jawa Tahun 2024.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Kecamatan Muara Jawa Tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Kecamatan Muara Jawa pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Pada akhirnya laporan ini kiranya dapat memberi manfaat yang optimal bagi peningkatan kinerja dimasa mendatang dan memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi khususnya Kecamatan Muara Jawa Semoga LKjIP Kecamatan Muara Jawa ini juga dapat berguna sebagaimana mestinya.

Kutai Kartanegara, 28 Februari 2025

Camat Muara Jawa,

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Camat Muara Jawa Kutai Kartanegara

MUHAMMAD RAMLI, S.E.,M.M.
Pembina, IV/a

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR			i
DAFTAR ISI			iii
DAFTAR TABEL			vi
BAB I	PENDAHULUAN		1
	1.1.	Latar Belakang	1
	1.2.	Landasan Hukum	2
	1.3.	Gambaran Umum Perangkat Daerah	3
	1.4.	Struktur Organisasi dan Tata Kerja	5
	1.5.	Isi – isu strategis	18
	1.6.	Sumber Daya Aparatur	20
	1.7	Sumber Daya Keuangan	22
	1.8.	Sistematika Laporan Kinerja	22
BAB II	PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA		23
	2.1.	Perencanaan Kinerja	23
		2.1.1. Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah	24
		2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	25
		2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan	26
		2.1.4. Indikator Kinerja Utama	27
	2.2.	Rencana Kerja Tahun 2024	30
	2.3.	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	21
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA		40
	3.1.	Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah	42
		3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	42
		3.1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun Sebelumnya	72

	3.1.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis	105
	3.1.4	Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/Kota lain	109
	3.1.5	Analisis Keberhasilan, Kegagalan Indikator Kinerja dan Solusi	110
	3.1.6	Analisis Keberhasilan, Kegagalan Program dan Kegiatan	122
3.2	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2024		125
3.3	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya		126
BAB IV	**PENUTUP**		131
4.1	Penutup		131
	LAMPIRAN		ix
Perjanjian Kinerja Tahun 2024			

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Wilayah Kecamatan Muara Jawa	3
Tabel 1.1	Luas wilayah dan Jumlah Kelurahan berdasarkan Kelurahan	4
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Kecamatan Muara Jawa per 31 Desember 2024	5
Gambar 1.2	Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Muara Jawa	5
Tabel 1.3	PNS berdasarkan Pendidikan	20
Tabel 1.4	PNS berdasarkan Golongan	21
Tabel 1.5	PNS berdasarkan Eselon	21
Tabel 1.6	PNS berdasarkan Jabatan	22
Tabel 2.1	Matrik keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	25
Tabel 2.2	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan	26
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama	28
Tabel 2.4	Rencana Kerja tahun 2024	30
Tabel 2.5	Perjanjian Kecamatan Muara Jawa Tahun 2024	31
Tabel 2.6	Program dan Kegiatan Kecamatan Muara Jawa Tahun 2024	34
Tabel 2.7	Perubahan Perjanjian Kecamatan Muara Jawa Tahun 2024	35

Tabel 2.8	Perubahan Program dan Kegiatan Kecamatan Muara Jawa Tahun 2024	38
Tabel 3.1	Pengkategorian Capaian Kinerja	41
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama	43
Tabel 3.3	Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan 2023	99
Tabel 3.4	Tingkat kemajuan capaian sasaran strategis	105
Tabel 3.5	Perbandingan capaian dengan standar nasional	109
Tabel 3.6	Analisa Keberhasilan, kegagalan dan solusi	110
Tabel 3.7	Analisa Keberhasilan dan kegagalan Program dan Kegiatan	122
Tabel 3.8	Capaian anggaran program dan kegiatan	125
Tabel 3.9	Perbandingan pencapaian kinerja dan anggaran tujuan dan sasaran	126
Tabel 3.10	Perbandingan pencapaian kinerja dan anggaran Program dan Kegiatan	128

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Rangkaian sistemik tersebut meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja.

Dalam menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kecamatan Muara Jawa telah menyusun:

(1) Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Muara Jawa Tahun 2016-2021;
(2) Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan Muara Jawa Tahun 2024;
(3) Perubahan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Muara Jawa Tahun 2024;
(4) Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Muara Jawa Tahun 2024;
(5) Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Muara Jawa Tahun 2024;
(6) Perjanjian Kinerja Kecamatan Muara Jawa Tahun 2024; dan
(7) Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Muara Jawa Tahun 2024.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap instansi perangkat daerah diwajibkan menyusun laporan kinerja.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang

diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Muara Jawa Tahun 2024 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kecamatan Muara Jawa.
2. Mendorong Kecamatan Muara Jawa di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Muara Jawa untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Kecamatan Muara Jawa di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Muara Jawa Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; dan

5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

1.3 Gambaran Umum Perangkat Daerah

Wilayah Kecamatan Muara Jawa yang terbentuk pada tahun 1962 dan termasuk dalam wilayah Kotamadya Samarinda. Kemudian pada tahun 1988 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 masuk ke wilayah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Kecamatan Muara Jawa secara geografis adalah daerah pesisir yang kaya dengan hasil bumi terutama minyak bumi, gas alam, dan batu bara serta sumber daya alam lainnya seperti perikanan. Kecamatan Muara Jawa merupakan salah satu daerah penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar di Kabupaten Kutai Kartanegara. Terletak di muara Sungai Mahakam atau biasa disebut Delta Mahakam. Secara Geografis, Kecamatan Muara Jawa berada pada posisi: 117' – 118' Bujur Timur, 50' Lintang Selatan. Wilayah Kecamatan Muara Jawa berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sanga-Sanga
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Samboja
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Anggana dan Selat Makassar.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Loa Janan

Luas wilayah Kecamatan Muara Jawa sekitar 619,16 KM² terdiri dari 8 Kelurahan.

Gambar 1.1. Peta Wilayah Administratif Kecamatan Muara Jawa

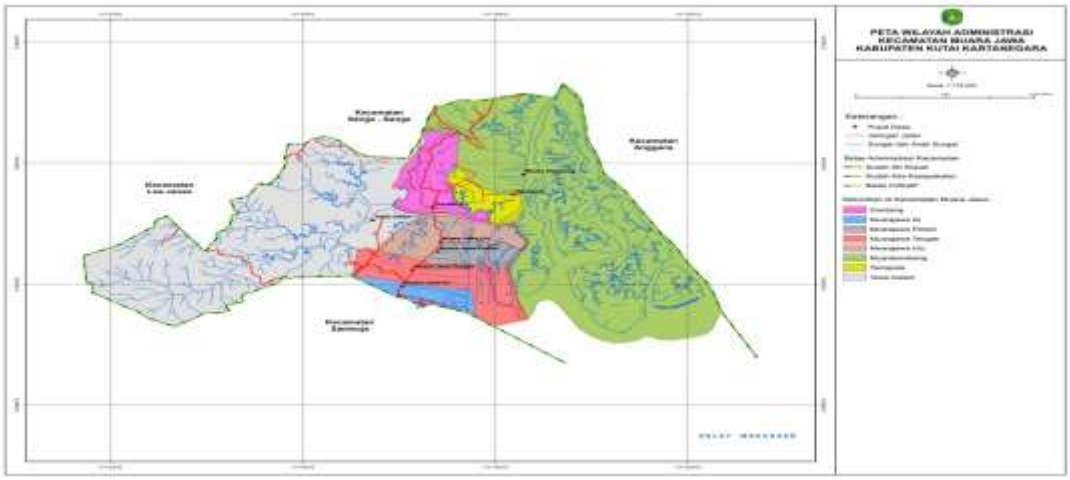

Dengan luas wilayah kelurahan di kecamatan Muara Jawa sebagai berikut:

Tabel 1.1. Luas wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Muara Jawa.

No	Nama Desa	Luas Wilayah Desa/ Kelurahan (Km2)	Jumlah RT
1	Muara Jawa Ilir	13.41656151	20
2	Muara Jawa Tengah	39.789605	16
3	Muara Jawa Ulu	27.363963	41
4	Teluk Dalam	215.936153	7
5	Muara Jawa Pesisir	12.604432	32
6	Dondang	30.51568	14
7	Tama Pole	15.177166	3
8	Muara Kembang	261.009965	15
TOTAL		619.162297	**148**

Sumber Data: Bagian Administrasi Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara

Jumlah penduduk mencapai 38.054 jiwa (Laporan Penduduk) dan Jumlah KK 12.399, Adapun persebaran jumlah penduduk Kecamatan Muara Jawa kelurahan:

Tabel 1.2. Jumlah Penduduk Kecamatan Muara Jawa per 31 Desember Tahun 2024

NO.	NAMA DESA/ KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	L + P	KK
1	Muara Jawa Ilir	1.889	1.730	3.619	1.094
2	Muara Jawa Tengah	2.743	2.500	5.243	1.880
3	Muara Jawa Ulu	5.574	5.431	11.005	4.141
4	Teluk Dalam	644	527	1.171	309
5	Muara Jawa Pesisir	5.203	4.732	9.934	2.860
6	Dondang	1.603	1.403	3.006	999
7	Tama Pole	305	251	556	173
8	Muara Kembang	1.804798	1.722	3.520	943
JUMLAH		19.758	18.296	38.054	12.399

Sumber Data: berdasarkan laporan Bulanan Penduduk Kecamatan

1.4 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Pembentukan Kecamatan Muara Jawa berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan struktur organisasi diatur berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Kecamatan. Struktur organisasi Kecamatan Muara Jawa dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut :

Gambar 1.2
Struktur Organisasi Kecamatan Muara Jawa

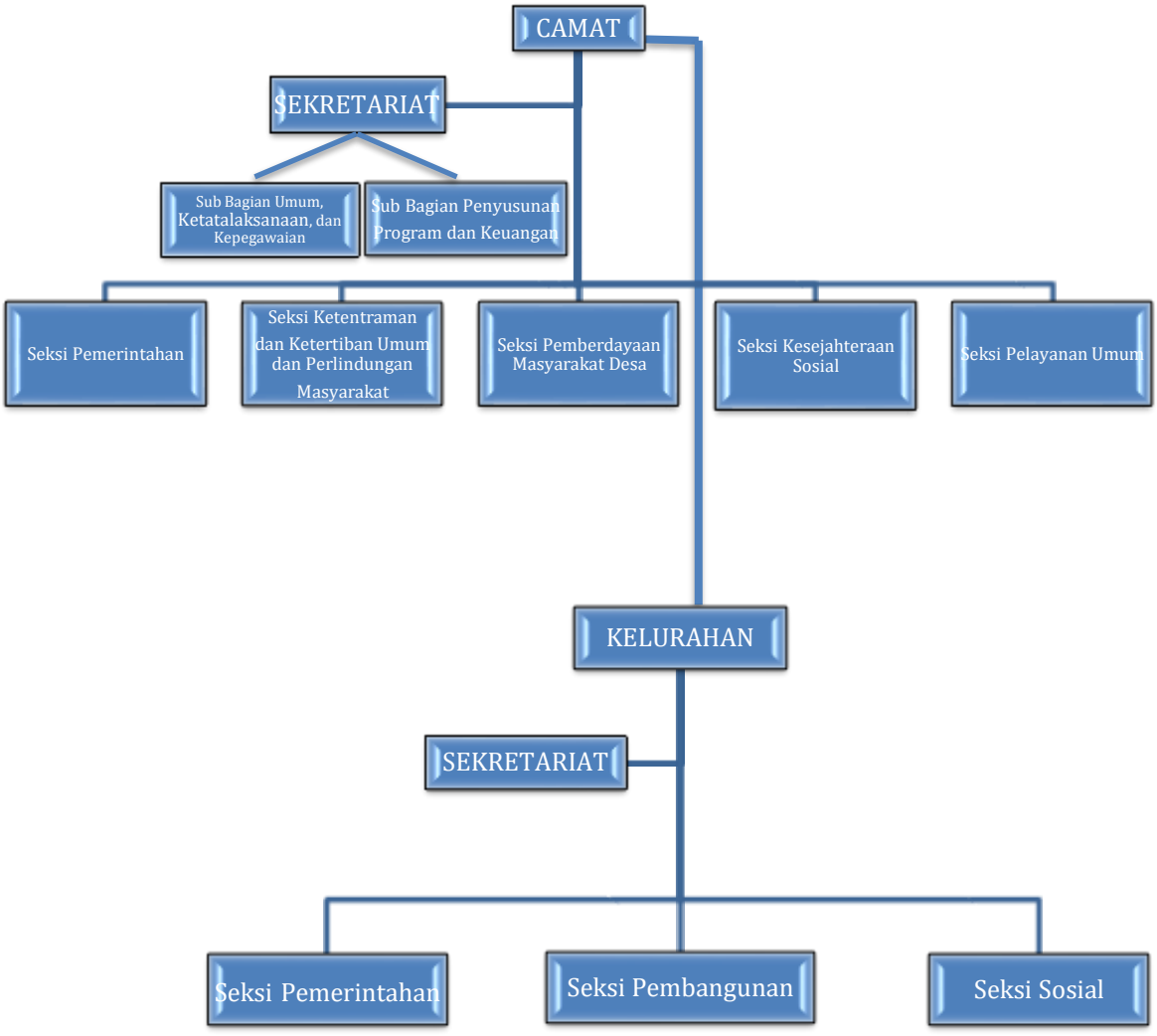

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten yang bertindak sebagai pelaksana teknis kewilayahan dan mempunyai wilayah kerja tertentu serta dipimpin oleh seorang Camat.

Tugas Pokok dan fungsi (TUPOKSI) Kecamatan merupakan suatu kesatuan dan saling terkait antara tugas pokok dan fungsi antara lain sebagai berikut:

a. Tugas Pokok Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, menyebutkan :

> **Camat mempunyai Tugas menyelenggarakan tugas urusan pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.**

b. Fungsi Kecamatan

Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 menyelenggarakan fungsi :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan.

9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Atasan.

Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat dalam melaksanakan tugas dibantu oleh perangkat kecamatan dan kelurahan terdiri dari:

1. Sekretariat,
   a. Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
2. Seksi Pemerintahan;
3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Seksi Kesejahteraan Sosial;
6. Seksi Pelayanan Umum;
7. Kelompok Jabatan Fungsional
8. Kelurahan membawahkan :
   a. Sekretaris;
   b. Seksi Pemerintahan;
   c. Seksi Pembangunan; dan
   d. Seksi Sosial.

CAMAT MEMPUNYAI TUGAS MELIPUTI :

1. Memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan kecamatan;
2. Merumuskan rencana strategis serta kebijakan operasional dibidang tugas pemerintahan, yang meliputi urusan seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum;
3. Menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPJ dan LPPD setiap akhir tahun ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta penyusunan LKPD setiap akhir tahun ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

4. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraab ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan serta pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan

6. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelayanan administrasiterpadu kecamatan (PATEN), pelayanan masyarakat yangmenjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapatdilaksanakan pemerintahan Desa atau kelurahan danpenanggulangan bencana;

7. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, pengendalian program dan kegiatan di tingkat kecamatan;

8. Membina, melaksanakan kerjasama dan berkoordinasi dengan instansi teknis dan organisasi perangkat daerah lainnya yang menyangkut bidang tugasnya;

9. Mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja, Standar Pelayanan (SP), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Camat;

10. Mengkoordinasikan, memfasilitasi, menginventarisir, mengidentifikasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap rencana strategik serta kebijakan operasional dibidang tugas umum pemerintahan, yang meliputi urusan seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum,Pemberdayaan masyarakat Desa, Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum serta membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan Kecamatan; dan

11. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

SEKRETARIS CAMAT MEMPUNYAI TUGAS MELIPUTI :

1. Memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;

2. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

3. Mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan dilingkungan Badan yang meliputi perencanaan, anggaran, pengadaan, penyediaan sarana dan prasarana, pembinaan dan pengembangan kepegawaian;

4. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan administrasi umum meliputi ketata usahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang/ jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. mengkoordinasikan pelaksanaan E-Govemment, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan SKPD, Pengembangan Inovasi SKPD, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System (WBS) pedoman umum sistem penanganan pengaduan, survey index kepuasan masyarakat, survey internal organisasi, survey index nilai persepsi korupsi dan;

6. mengkoordinasikan pelaksanaan SIMPAG, Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Kompilasi Perjanjian Kinerja dan LP2P;

7. mengkoordinasikan pelaksanaan LKjIP, Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), RENSTRA, RENJA, LKPJ, LPPD, dan LKPD;

8. mengkoordinasikan kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM), pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi pengelolaan keuangan;

9. mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul kenaikan pangkat, usul kenaikan gaji berkala, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, LHKPN dan/ atau LHKASN, Penghargaan, Pemberian Sanksi dan Cuti sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pengelolaan pengadaan dan penghapusan barang/ jasa;

11. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Sekretariatan; dan

12. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian adalah:

1. Menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;

2. Menyusun rencana kegiatan urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

3. Mengusulkan pembentukan panitia/pejabat pengadaan barang/jasa dan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

4. Merencanakaan dan melaksanakan pengelolaan barang/jasa meliputi menyusun rencana kebutuhan barang/jasa, menerima, menyalurkan, menyimpan, mengiventarisasi Barang Milik Daerah (BMD), memelihara barang serta membuat usulan penghapusan barang rusak berat sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tertib administrasi pengelolaan BMD

5. Merencanakan pelaksanaan E-Govemment, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan SKPD, Pengembangan Inovasi SKPD, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System (WBS) pedoman umum sistem 'penanganan pengaduan, survey index kepuasan masyarakat, survey internal organisasi dan survey index nilai persepsi korupsi;

6. Merencanakan pelaksanaan SIMPAG, Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan Kompilasi Perjanjian Kinerja;

7. Merencanakan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), rekapitulasi kehadiran, laporan kerja pegawai, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul kenaikan pangkat, Masa Persiapan Pensiun, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, Penghargaan, Pemberian Sangsi, Cuti, pengembangan kompetensi kepegawaian, LHKPN dan/atau LHKASN dan LP2P sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Merencanakan pelaksanaan administrasi ketata usahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang / jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

9. Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;

10. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian; dan melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Uraian Tugas Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan :

1. Menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;

2. Menyusun rencana kegiatan urusan Penyusunan Program dan Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

3. Merencanakan, mengkompilasi dan menyiapkan bahan kegiatan penyusunan RENSTRA, RENJA, RKA / DPA, Perjanjian Kinerja, LKjIP, dan LPPD melaporkan ke Camat melalui sekretaris;

4. Merencanakan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), LKPJ dan LKPD;

5. Menganalisis dan meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP),dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM)

6. Menyusun pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi pengelolaan keuangan

7. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Penyusunan Program dan Keuangan;

8. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Penyusunan Program dan Keuangan; dan merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Uraian Tugas Seksi Pemerintahan

1. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;

2. menyusun rencana kegiatan urusan Pemerintahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

3. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi pertanahan dan kependudukan dan catatan sipil yang menjadi urusan Kecamatan;

4. merencanakan kegiatan, melaksanakan pembinaan serta peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa dan atau kelurahan;

5. merencanakan kegiatan, menyelenggarakan proses administrasi bidang pertanahan yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati;

6. merencanakan kegiatan dan memfasilitasi penganalisisan materi peraturan desa dan keputusan Lurah yang disampaikan kepada Bupati;

7. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan menyusun monografi kecamatan serta pembinaan penyusunan monografi desa dan atau kelurahan;

8. merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas pemerintahan desa dan atau kelurahan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), penyelenggaraan pemilihan dan pelantikan

Kepala Desa, pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta pembentukan Rukun Tetangga;

9. merencanakan kegiatan, mengidentifikasi dan memfasilitasi pemekaran desa/kelurahan, penataan maupun perselisihan batas wilayah antar desa dan atau kelurahan serta penyelesaian pengaduan masalah pertanahan dalam wilayah Kecamatan;

10. merencanakan kegiatan, melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi program transmigrasi dan penataan penduduk serta pelaporan data tanah kas desa dan kekayaan desa;

11. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Pemerintahan;

12. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pemerintahan;

13. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pemerintahan; dan

14. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Uraian Tugas Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;

2. menyusun rencana kegiatan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

3. merencanakan kegiatan, menginventarisir, melakukan pembinaan dan mengevaluasi permasalahan ketenteraman dan ketertiban serta melakukan koordinasi dengan unit terkait yang berhubungan dengan ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat Desa/ kelurahan;

4. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan proses administrasi perijinan bidang Politik Dalam Negeri / Izin Gangguan (HO) yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati;

5. merencanakan kegiatan, melakukan upaya preventif terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

6. merencanakan kegiatan, melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data keberadaan, kegiatan partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat tingkat Kecamatan dan mantan anggota organisasi terlarang serta data WNI keturunan dan WNA;

7. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyelengaraan pembinaan ideologi, organisasi kemasyarakatan dan kesatuan bangsa serta pembinaan kerukunan umat beragama;

8. merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan Pengungsi;

9. merencanakan kegiatan melakukan pencegahan atas penanggulangan permasalahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya serta pengelolaan Sumber Daya Alam tanpa ijin dan dapat mengganggu sertamembahayakan lingkungan hidup;

10. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;

11. merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;

12. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan

13. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan;

Uraian Tugas Seksi Pemerdayaan Masyarakat Desa

1. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
2. menyusun rencana kegiatan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. merencanakan kegiatan dan menyelenggarakan proses administrasi yang meliputi perijinan bidang pertanian, pertambangan,
4. perindustrian, perdagangan, Izin Mendirikan Bangunan dan Pariwisata yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati;
5. merencanakan kegiatan, memfasilitasi, melaksanakan pemberdayaan masyarakat, peningkatan peran serta, prakarsa, dan swadaya gotong royong masyarakat serta pemberdayaan peranan wanita;
6. merencanakan kegiatan, melaksanakan pemantauan dan pelaporan obyek dan daya tarik wisata, usaha jasa pariwisata dan usaha sarana pariwisata;
7. merencanakan kegiatan, melakukan bimbingan dan pemantauan pengelolaan Lokasi Daur Ulang Sampah (LDUS) dan Air Bersih Perdesaan;merencanakan kegiatan, melaksanakan koordinasi dan sosialisasi rencana tata ruang;
8. merencanakan kegiatan, melakukan pemantauan pelaksanaan penghijauan, konservasi tanah dan air;
9. merencanakan kegiatan, menyusun rencana dan program kegiatan kebersihan, pertamanan dan keindahan lingkungan;
10. merencanakan kegiatan, menghimpun, mengolah data, membuat bahan masukan untuk pengembangan sarana dan prasarana umum; 10. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
11. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pemberdayan Masyarakat Desa;

12. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan

13. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan**.**

Uraian Tugas Seksi Kesejahteraan Sosial

1. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;

2. menyusun rencana kegiatan urusan Kesejahteraan Sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

3. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, kepemudaan, peranan wanita dan olah raga, ketenagakerjaan dan transmigrasi;

4. merencanakan kegiatan, menyelenggarakan proses administrasi bidang ketenagakerjaan AK/ 1 (Pencari Kerja Swasta) dan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati;

5. merencanakan kegiatan, melaksanakan koordinasi program yang meliputi bantuan sosial, organisasi social kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Keluarga Berencana (KB), Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

6. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan petunjuk dalam rangka pembinaan dan bimbingan terhadap penyelenggaraan kursus keterampilan, kesejahteraan keluarga, peranan wanita dan organisasi kewanitaan;

7. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan bimbingan dan penyuluhan sosial bagi anak terlantar, yatim piatu, penyalahgunaan narkotika dan penyandang masalah sosial;

8. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan kegiatan dalam rangka pembinaan, pengembanganl kepramukaan, karang taruna, organisasi kepemudaan dan keolahragaan;

9. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan kegiatan dalam rangka pembinaan pendidikan sekolah maupun luar sekolah, dan pendataan sarana dan prasarana pendidikan;

10. merencanakan kegiatan, menghimpun, menyiapkan bahan, mengevaluasi pembinaan keagamaan dan kerukunan hidup beragama dan memfasilitasi pengadaan sarana / prasarana peribadatan dan kehidupan beragama;

11. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Kesejahteraan Sosial;

12. merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Kesejahteraan Sosial;

13. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan Kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan kesejahteraan sosial; dan

14. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Uraian Tugas Seksi Pelayanan Umum

1. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;

2. menyusun rencana kegiatan urusan Pelayanan Umum sebagaipedoman pelaksanaan tugas;

3. merencanakan kegiatan, meneliti, melakukan verifikasi persyaratan berkas permohonan perijinan dan menetapkan besaran retribusi serta berkoordinasi dengan instansi terkait tentang pelayanan perijinan dan non perijinan;

4. merencanakan kegiatan, mengkoordinasikan pengendalian pengelolaan lampu penerangan jalan umum, memfasilitasi dan melakukan pungutan atas pembinaan, pemantauan pengelolaan sampah dan pemeliharaan lingkungan, pertamanan dan pemakaman;

5. merencanakan kegiatan, menyelenggarakan proses administrasi perijinan bidang pekerjaan umum dan bidang perhubungan yang merupakan pelimpahan kewenagan dari Bupati;
6. merencanakan kegiatan, melakukan bimbingan dan pemantauan pengelolaan sampah dan pemeliharaan kebersihan lingkungan dan taman;
7. merencanakan kegiatan, menghimpun dan mengolah data perencanaan pengembangan kekayaan desa/kelurahan serta pelaporan data tanah kas desa dan kekayaan desa;
8. merencanakan kegiatan, menyusun rencana dan program kegiatan kebersihan, pertamanan dan keindahan lingkungan;
9. merencanakan kegiatan, menghimpun, memantau, mengolah data, membuat bahan masukan untuk pengembangan sarana dan prasarana umum;
10. merencanakan kegiatan, melaksanakan sosialisasi pengendalian perizinan perumahan dan bangunan;
11. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Pelayanan Umum;
12. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pelayanan Umum;
13. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pelayanan Umum; dan
14. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan

1.5 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka

menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu Strategis Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Muara Jawa dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Rendahnya transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah
2. Rendahnya kualitas pelayanan publik
3. Rendahnya aksesibilitas antar dan inter wilayah

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada bagian unit kerja dilingkungan Kecamatan Muara Jawa dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya tertib administrasi di Kelurahan dan Kecamatan
2. Belum optimalnya waktu pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan/SOP
3. Belum optimalnya realisasi Pembangunan antara hasil musrenbang dengan realisasi pembangunan infrastuktur/fisik.
4. Belum optimalnya tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan.
5. Rendahnya tingkat swadaya murni masyarakat dibidang pembangunan.
6. Rendahnya kapasitas sumber daya aparatur.
7. Belum adanya indikator yang tetap dalam penetapan skala prioritas pembangunan.

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pemerintahan Kecamatan Muara Jawa adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman aparatur terhadap Tugas Pokok.
2. Belum optimalnya sistem pelaporan kecamatan dan kelurahan secara rutin/berkala.
3. Lemahnya pengawasan internal pemerintah/belum optimalnya SPIP
4. Belum optimalnya penggunaan sistem informasi berbasis elektronik, baik dalam mendukung kinerja pelayanan publik maupun operasional SKPD.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja SKPD yang memiliki tugas pokok menjalankan kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah adalah faktor internal dan eksternal Kecamatan Muara Jawa, antara lain :

1. Jumlah dan kapasitas aparatur belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai antara beban kerja dengan kompetensi.
2. Masih lemahnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan mengakibatkan tidak maksimalnya koordinasi antar seksi.
3. Pola pembinaan aparatur yang belum berorientasi pada peningkatan kinerja.
4. Mekanisme pola kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Kecamatan Muara Jawa,antara lain:

1. Pelimpahan kewenangan kepada Camat tidak sepenuhnya didukung oleh pembinaan dari dinas teknis dan personil, peralatan dan pembiayaan.
2. Kurang SDM di tingkat kewilayahan.

1.6 Sumber Daya Manusia

Sumber daya aparatur Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Muara Jawa per 27 Februari 2025 sebanyak 74 orang. Perincian jumlah tersebut adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan Pendidikan

Tabel 1.3. PNS berdasarkan Pendidikan

No	JENJANG PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	PROPORSI
1	SD	0	0	0	0,00
2	SLTP	1	0	1	1,35
3	SLTA	6	14	20	27,03
4	D-I	0	0	0	0,00
5	D-II	0	0	0	0,00
6	D-III	0	0	0	0,00

7	D-IV	0	0	0	0,00
8	S1	21	26	47	63,51
9	S2	4	2	6	8,11
JUMLAH		**31**	**42**	**74**	

b. Berdasarkan Golongan

Tabel 1.4. PNS berdasarkan Golongan

No	GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	PROPORSI
1	I	0	0	0	0,00
2	II	7	13	20	27,03
3	III	21	26	47	63,51
4	IV	5	2	7	9,46
JUMLAH		**33**	**41**	**74**	

c. Berdasarkan Eselon

Tabel 1.5. PNS berdasarkan Eselon

No	ESSELON	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	PROPORSI
1	IIa	0	0	0	0,00
2	IIb	0	0	0	0,00
3	IIIa	1	0	1	2,08
4	IIIb	1	0	1	2,08
5	IVa	9	4	13	27,08
6	IVb	18	15	33	68,75
JUMLAH		**29**	**19**	**48**	

d. Berdasarkan Jenis Jabatan

Tabel 1.6. PNS berdasarkan Jabatan

No	ESSELON	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	PROPORSI
1	STRUKTURAL	26	22	48	64,86
2	PELAKSANA	6	20	26	35,14
JUMLAH		**33**	**32**	**42**	**74**

1.7 Sumber Daya Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Muara Jawa pada Tahun 2024 berasal dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada Tahun Anggaran 2024 Kecamatan Muara Jawa mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.97.128.231.018,00 yang diperuntukkan untuk belanja langsung dan belanja tak langsung serta untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program pendukung dengan rincian 4 (empat) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan.

1.8 Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Landasan Hukum, Gambaran Umum, Struktur organisasi dan atata kerja, Isu-isu Strategis yang dihadapi perangkat daerah, Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Keuangan, dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara. Rencana Strategis Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor B-984/BAPP/065.11/05/2021 tentang Penyempurnaan Rancangan Awal Menjadi Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2021 – 2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Di dalam Renja Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.1.1 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah

a. VISI

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 adalah:

> **"MewujudkanMasyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia""**

b. MISI

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya;
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah;
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan;

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Muara Jawa mengacu pada Misi ke-1, yaitu :

"Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani"

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara

Visi : "Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia"									
NO	MISI YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2022	2023	2024	2025	2026
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
1	Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan yang efektif, efisien, inovatif, transparan dan akuntabel		Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	61	62	64	65	67
			Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	55	60	65	70	75
				Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	82,35	83	84	84	85
				Pertumbuhan Pendapatan Asli Kecamatan	15	20	25	30	35

Sumber : Renstra Kecamatan Muara Jawa periode 2021-2026

2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rangkaian langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan perangkat daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan perangkat daerah merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Adapun strategi dan arah kebijakan Kecamatan Muara Jawa Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2. 2.
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Muara Jawa

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan yang Efektif Efisien Inovatif Transparan dan Akuntabel	**Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan**	**Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	1	Meningkatkan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
			2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
			3	Meningkatkan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
			4	Meningkatkan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
		Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1	Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
			2	Meningkatkan Pemberdayaan Kelurahan
		Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	Meningkatkan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
			2	Meningkatkan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
		Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1	Meningkatkan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
		Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		Meningkatnya kinerja dan tata kelola kecamatan	1	Meningkatkan fasilitas penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah

2.1.4 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai kartanegara tahun 2024 dapat dilihat pada table 2.3 berikut

Tabel 2. 3.
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Muara Jawa

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan yang efektif, efisien, inovatif, transparan dan akuntabel	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Nilai	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan adalah Ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh dari hasil perhitungan atas Survey yang dilaksanakan oleh Kecamatan Muara Jawa terhadap pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat. Acuan yang digunakan yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik dan Keputusan MENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004	Hasil Survey Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Muara Jawa
	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	Persentase Keluhan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan yang Ditindaklanjuti (PKMT) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat efektivitas penanganan keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan.	Jumlah keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti dibagi Total keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan x 100	Laporan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Muara Jawa
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	Persentase Capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum (PCKKTU) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat capaian ketenteraman dan ketertiban umum di suatu wilayah.	Jumlah kasus yang ditangani dibagi total kasus Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan x 100	Laporan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Muara Jawa

		Pertumbuhan Pendapatan Asli Kewenangan Kecamatan	Persen	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan (PPAD-KK) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat pertumbuhan pendapatan asli daerah kewenangan kecamatan dari tahun ke tahun.	Nilai Total Pendapatan Asli Daerah tahun berjalan (N) dikurangi Nilai Total Pendapatan Asli Daerah tahun sebelumnya (N-1) dibagi Nilai Total Pendapatan Asli Daerah tahun sebelumnya (N-1) dikali 100	Tidak lagi diperhitungkan sejak adanya Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 40 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan bangunan gedung, penerbitan ijin secara online melalui aplikasi simbg.pu.go.id sehingga tidak ada lagi penerbitan IMB dan pemungutan retribusinya di Kecamatan

2. Rencana Kerja Tahun 2024

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kerja Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 :

Tabel 2.4

Rencana Kerja Tahun 2024

Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai kartanegara

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan yang efektif, efisien, inovatif, transparan dan akuntabel		Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Nilai	64
1		Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	65
			Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	84
			Pertumbuhan Pendapatan Asli Kewenangan Kecamatan	Persen	25

Sumber : Rencana Kerja Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai kartanegara tahun 2024

3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten

Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Pada tanggal 08 Januari 2024 ditetapkan Perjanjian Kinerja Camat Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai kartanegara
Tahun 2024

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
	TUJUAN			
	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan yang efektif, efisien, inovatif, transparan dan akuntabel	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Nilai	64
	SASARAN			
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	65
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	84
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Kewenangan Kecamatan	Persen	25
2	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun	Persen	100
3	Mewujudkan tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100
4	Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP	Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun	Persen	100
5	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100
6	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan RKBMD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang akan diadakan	Persen	100

7	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan)	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan (SHS) Perangkat Daerah Paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya	Persen	100
8	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian LKjIP	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100
9	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap tahun	Persen	100
10	Terlaksananya Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir bulan Juni dan Semester II akhir bulan oktober setiap tahun	Persen	100
11	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
12	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah	Tindak lanjut hasil temuan administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir	Persen	100
13	Terlaksananya ketepatan waktu penyampaian SPIP	Ketepatan waktu penyampaian laporan penilaian mandiri penyelenggaraan SPIP perangkat daerah per 30 Juni tahun berjalan	Persen	100
14	Penerapan Core Values ASN Berahlak	Internalisasi core values ASN Berahlak	Persen	100
15	Penyusunan perjanjian kinerja sampai ke pelaksana	Ketepatan waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD diterapkan)	Persen	100
16	Terlaksananya serapan anggaran berdasarkan SPD yang diterbitkan	Seraopan anggaran berdasarkan SPD yang diterbitkan	Persen	70
17	Ketersediaan dokumen Manajemen risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen risiko pada Perangkat Daerah per Triwulan	Persen	100
18	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daewrah	Persen	100
19	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Nilai Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Dokumen	1
20	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen	100

21	Peningkatan Prestasi Inovasi	Prestasi Inovasi Perangkat Daerah	Persen	100
22	Tindak lanjut pengaduan SP4N Lapor	Tindak lanjut pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
23	Meningkatnya Pengamanan Aset	Pengamanan Aset Tanah	Persen	75
24	Meningkatnya Tata Kelola Aset	Pakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan jumlah pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana pada perangkat daerah	Persen	100
25	Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	Jumlah program pengentasan kemiskinan	Jumlah	1
26	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting sesuai dengan target Nasional	Persen	14
27	Pengarusutamaan Gender	Ketersediaan pengganggaran pengarusutamaan gender	Persen	100
28	Pengendalian Inflasi	Angka inflasi maksimal 1,5% - 3,5%	Persen	100
29	Kepatuhan Pelaporan P3DN	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan	Persen	40
30	Menirigkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,6
31	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	73
32	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai	64
33	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeke Inovasi Daerah	Nilai	49,57
34	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai	8,95
35	Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Standar Payanan Pemerintah Daerah	Predikat	Zona Hijau
36	Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/vape	Kawaaan Tanpa Rokok/Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau	Persen	100
37	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM perangkat daerah (Aplikasi Survey Kukar)	Persen	100
38	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	100
39	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Kecamatan Muara Jawa Tahun 2024 :

Tabel 2.6
Program dan Kegiatan Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai kartanegara
Tahun 2024

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**64 Nilai**	**20.936.006.867**
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 dokumen	150.000.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	18 laporan	13.348.968.855
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	1017 unit	130.200.000
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian	86 Orang	300.000.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	11 jenis	2.154.145.294
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	80 Persen	171.830.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 bulan	3.372.506.012
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	177 unit	1.308.356.706
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP**	**100 Persen**	**46.376.094.000**
		Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	**100 Persen**	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	86 Kegiatan	46.376.094.000
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan**	**100 Persen**	**21.084.372.877**
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	84 Kegiatan	14.056.887.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	348 Lembaga	7.027.485.877

7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100 Persen**	**815.000.000**
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	2 Kegiatan	815.000.000
			JUMLAH	**89.211.473.744**

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Muara Jawa Tahun 2024

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 25 November 2024 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan terjadinya perubahan Kepala Perangkat Daerah dalam hal ini pergantian Camat Kecamatan Muara Jawa, Perubahan Alokasi Anggaran, dan Penambahan Indikator Kinerja dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.7
Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2024

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
	TUJUAN			
	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan yang efektif, efisien, inovatif, transparan dan akuntabel	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Nilai	64
	SASARAN			
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	65
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	84
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Kewenangan Kecamatan	Persen	25

2	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun	Persen	100
3	Mewujudkan tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100
4	Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP	Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun	Persen	100
5	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100
6	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan RKBMD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang akan diadakan	Persen	100
7	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan)	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan (SHS) Perangkat Daerah Paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya	Persen	100
8	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian LKjIP	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100
9	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap tahun	Persen	100
10	Terlaksananya Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir bulan Juni dan Semester II akhir bulan oktober setiap tahun	Persen	100
11	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100

12	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah	Tindak lanjut hasil temuan administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir	Persen	100
13	Terlaksananya ketepatan waktu penyampaian SPIP	Ketepatan waktu penyampaian laporan penilaian mandiri penyelenggaraan SPIP perangkat daerah per 30 Juni tahun berjalan	Persen	100
14	Penerapan Core Values ASN Berahlak	Internalisasi core values ASN Berahlak	Persen	100
15	Penyusunan perjanjian kinerja sampai ke pelaksana	Ketepatan waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD diterapkan)	Persen	100
16	Terlaksananya serapan anggaran berdasarkan SPD yang diterbitkan	Seraopan anggaran berdasarkan SPD yang diterbitkan	Persen	70
17	Ketersediaan dokumen Manajemen risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen risiko pada Perangkat Daerah per Triwulan	Persen	100
18	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daewrah	Persen	100
19	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Nilai Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Dokumen	100
20	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen	100
21	Peningkatan Prestasi Inovasi	Prestasi Inovasi Perangkat Daerah	Persen	100
22	Tindak lanjut pengaduan SP4N Lapor	Tindak lanjut pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
23	Meningkatnya Pengamanan Aset	Pengamanan Aset Tanah	Persen	75
24	Meningkatnya Tata Kelola Aset	Pakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan jumlah pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana pada perangkat daerah	Persen	100
25	Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	Jumlah program pengentasan kemiskinan	Jumlah	1
26	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting sesuai dengan target Nasional	Persen	14
27	Pengarusutamaan Gender	Ketersediaan pengganggaran pengarusutamaan gender	Persen	100
28	Pengendalian Inflasi	Angka inflasi maksimal 1,5% - 3,5%	Persen	100
29	Kepatuhan Pelaporan P3DN	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan	Persen	40

30	Menirigkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,6
31	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	73
32	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai	64
33	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeke Inovasi Daerah	Nilai	49,57
34	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai	8,95
35	Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Standar Payanan Pemerintah Daerah	Predikat	Zona Hijau
36	Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/vape	Kawaaan Tanpa Rokok/Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau	Persen	100
37	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM perangkat daerah (Aplikasi Survey Kukar)	Persen	100
38	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	100
39	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100
40	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan Pemetaan Kemampuan Mengaji	Laporan	1
41	Terbentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ)	SK Pembentukan UPZ Kecamatan Muara Jawa	Surat Keputusan	1

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.8
Perubahan Program dan Kegiatan Kecamatan Muara Jawa Tahun 2024

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**64 Nilai**	**20.934.049.141**
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 dokumen	150.000.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	18 laporan	13.407.011.129

7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	1017 unit	130.200.000
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian	86 Orang	130.000.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	11 jenis	2.160.145.294
7.01.01.2.07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 bulan	3.372.506.012
7.01.01.2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	199 unit	1.394.186.706
7.01.01.2.09	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	80 Persen	190.000.000
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP**	**100 Persen**	**53.284.809.000**
		Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan	**100 Persen**	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	2 Kegiatan	53.284.809.000
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan**	**100 Persen**	**21.793.760.877**
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	84 Kegiatan	14.916.887.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	348 Lembaga	6.876.873.877
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100 Persen**	**1.115.612.000**
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	2 Kegiatan	1.115.612.000
			JUMLAH	**97.128.231.018**

Sumber : Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Muara Jawa Tahun 2024 (setelah perubahan)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai kartanegara selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai kartanegara yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai kartanegara.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Kerangka pengukuran capaian kinerja Kecamatan Muara Jawa dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut:

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} x100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} x100\%$$

Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai kartanegara dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Muara Jawa Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Muara Jawa.

3.1 Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah

3.1.1. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas Kecamatan Muara Jawa juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Muara Jawa tahun 2024 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Muara Jawa Tahun 2024

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
	TUJUAN						
A.1	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan yang efektif, efisien, inovatif, transparan dan akuntabel	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	64	91,76	143,38%	Sangat tinggi	IKM perangkat daerah (Aplikasi Survey Kukar)
	SASARAN						
B.1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	65	100	153,85%	Sangat tinggi	Laporan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Muara Jawa
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	84	100	119,05%	Sangat tinggi	Laporan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Muara Jawa
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Kewenangan Kecamatan	25	N/A	N/A	-	Tidak lagi diperhitungkan sejak terbitnya Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 40 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan bangunan gedung, penerbitan ijin secara online melalui aplikasi simbg.pu.go.id sehingga tidak ada lagi penerbitan IMB dan pemungutan retribusinya di Kecamatan

B.2	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun	100	97,5	97,50%	Sangat tinggi	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun	100	100	100,00%	Sangat tinggi	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun
B.3	Mewujudkan tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	100	100	100,00%	Sangat tinggi	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun
B.4	Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP	Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun	100	100	100,00%	Sangat tinggi	Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun
B.5	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	100	100	100,00%	Sangat tinggi	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan
B.6	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan RKBMD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang akan diadakan	100	100	100,00%	Sangat tinggi	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan RKBMD 100% sesuai dengan BMD yang akan diadakan
B.7	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan)	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan (SHS) Perangkat Daerah Paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya	100	0	0,00%	Sangat Rendah	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan SHS Perangkat Daerah Paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya Untuk anggaran perubahan paling lambat bulan agustus tahun berjalan

B.8	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian LKjIP	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	100	100	100,00%	Sangat Tinggi	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian LKjIP PerangkatDaerah paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun
B.9	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap tahun	100	100	100,00%	Sangat tinggi	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian IKK LPPD Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Januari setiap tahun
B.10	Terlaksananya Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir bulan Juni dan Semester II akhir bulan oktober setiap tahun	100	50	50,00%	Sangat Rendah	a. Tingkat Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir bulan Juni setiap tahun; b. Tingkat Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester II akhir bulan oktober setiap tahun
B.11	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	100	100	100,00%	Sangat tinggi	Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)
B.12	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah	Tindak lanjut hasil temuan administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir	100	84,86	84,86%	Tinggi	Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir:
B.13	Terlaksananya ketepatan waktu penyampaian SPIP	Ketepatan waktu penyampaian laporan penilaian mandiri penyelenggaraan SPIP perangkat daerah per 30 Juni tahun berjalan	100	100	100,00%	Sangat tinggi	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat daerah per 30 Juni Tahun berjalan

B.14	Penerapan Core Values ASN Berahlak	Internalisasi core values ASN Berahlak	100	100	100,00%	Sangat tinggi	Internalisasi Core Values ASN Berakhlak Indikator Penilaian: - Menyusun Roadmap dan Rencana Aksi AgendaPerubahan: Poin 40; - Melakukan Sosialisasi Core Values ASN BerAKHLAK(Laporan Pelaksanaan Sosialisasi): Poin 30; - Membacakan Core Values ASN BerAKHLAK pada kegiatan Apel Pagi, Rapat, Koordinasi/Pertemuan,dan/atau Sosialisasi (Video kegiatan): Poin 10; - Penulisan panduan perilaku BerAKHLAK di MediaSosial, poster, x-banner, dan media lainnya(Foto/Screenshoot): Poin 10; - Penggunaan Logo BerAKHLAK dan Tagar BanggaMelayani Bangsa dalam Naskah Surat Dinas, Poster,Latar Virtual, dan Bahan Paparan (Foto/ Screenshoot):Poin 10.
B.15	Penyusunan perjanjian kinerja sampai ke pelaksana	Ketepatan waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD diterapkan)	100	100	100,00%	Sangat tinggi	Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)
B.16	Terlaksananya serapan anggaran berdasarkan SPD yang diterbitkan	Seraopan anggaran berdasarkan SPD yang diterbitkan	70	95,9	137%	Sangat tinggi	Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit
B.17	Ketersediaan dokumen Manajemen risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen risiko pada Perangkat Daerah per Triwulan	100	100	100,00%	Sangat tinggi	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada PD per Triwulan Laporan Pengelolaan Risiko (pelaksanaan RTP) Triwulan 1 (30 April) Triwulan 2 (31 Juli) Triwulan 3 (31 Oktober) Triwulan 4 (31 januari) Tahunan (10 Januari) tahun berikutnya 100 Inspektorat Daerah
B.18	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	100	100	100,00%	Sangat tinggi	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah
B.19	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Nilai Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	100	72,01	72,01%	Sedang	Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah

B.20	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100	49,32	49,32%	Sangat Rendah	LHE SAKIP Perangkat Daerah dari Inspektorat Daerah
B.21	Peningkatan Prestasi Inovasi	Prestasi Inovasi Perangkat Daerah	100	100	100,00%	Sangat tinggi	Juara Inovasi Tk. Nasional 200 Nominasi Tk. Nasional 160 Juara Inovasi Tk. Provinsi 140 Nominasi Tk. Provinsi 120 Juara Inovasi Tk. Kabupaten 130 Nominasi Tk. Kabupaten 110 Peserta Lomba Inovasi Tk. Kabupaten 100 Tidak Mengikuti Lomba Inovasi -20
B.22	Tindak lanjut pengaduan SP4N Lapor	Tindak lanjut pengaduan SP4N Lapor	100	100	100,00%	Sangat tinggi	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor
B.23	Meningkatnya Pengamanan Aset	Pengamanan Aset Tanah	75	50	66,67%	Sedang	Pengamanan Aset TanahPeniliaian Tingkat Pengamanan Aset Tanah yangtercatat dalam KIP Perangkat Daerah : a. Pensertifikatan Tanah: 100 b. Pemagaran asset tanah: 75 c. Pemasangan Patok batas dan Plang Nama: 50
B.24	Meningkatnya Tata Kelola Aset	Pakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan jumlah pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana pada perangkat daerah	100	100	100,00%	Sangat tinggi	Pakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan jumlah pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana pada OPD (Laptop, Kendaraan Dinas, dll)
B.25	Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	Jumlah program pengentasan kemiskinan	1	1	100,00%	Sangat tinggi	Memiliki program pengentasan kemiskinan
B.26	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting sesuai dengan target Nasional	14	8,4	140%	Sangat tinggi	Prevalensi Stunting sesuai dengan target Nasional. Sumber Data Dinkes Kab. Kukar Kartanegara dan UPT Puskesmas Kecamatan Muara Jawa. Rumus perhitungan capaian kinerja menggunakan rumus tingkat realisasi negatif dimana capaian kinerja =(target - (realisasi - target) dibagi target) dikali 100%. Semakin rendah realisasi maka semakin tinggi kinerja

B.27	Pengarusutamaan Gender	Ketersediaan pengganggaran pengarusutamaan gender	100	100	100,00%	Sangat tinggi	Ketersediaan pengganggaran pengarusutamaan gender
B.28	Pengendalian Inflasi	Angka inflasi maksimal 1,5% - 3,5%	100	100	100,00%	Sangat tinggi	Indeks Perkembangan Harga (IPH) Badan Pusat Statistik
B.29	Kepatuhan Pelaporan P3DN	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan	40	40	100,00%	Sangat tinggi	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan
B.30	Menirigkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	3,6	3,1135	86,49%	Tinggi	Capaian LPPD Kukar 2023
B.31	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	73	65,92	90,30%	Sangat tinggi	0 % s.d 100%
B.32	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	64	60,12	93,94%	Sangat tinggi	0 % s.d 100%
B.33	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	49,57	58,59	118,20%	Sangat tinggi	Indeks Inovasi Daerah dibanding dengan terget RPJMD
B.34	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	8,95	8,7	97,21%	Sangat tinggi	Nilai Indeks Pelayanan Publik Pemda dibanding dengan terget RPJMD
B.35	Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Standar Payanan Pemerintah Daerah	Zona Hijau	Zona Hijau	100,00%	Sangat tinggi	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan (OMBUDSMAN). Nilai 94,46
B.36	Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/vape	Kawaaan Tanpa Rokok/Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau	100	100	100,00%	Sangat tinggi	Kawasan Tanpa Rokok/Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau
B.37	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM perangkat daerah (Aplikasi Survey Kukar)	100	91,76	91,76%	Sangat tinggi	IKM perangkat daerah (Aplikasi Survey Kukar)

B.38	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	100	73,59	73,59%	Sedang	Hasil berdasarkan hasil perhitungan melalui aplikasi https://ppkl.menlhk.go.id/lklh sesuai dengan target RPJMD
B.39	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	100	102,25	102,25%	Sangat tinggi	Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah
B.40	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan Pemetaan Kemampuan Mengaji	1	1	100,00%	Sangat tinggi	Laporan Pemetaan Kemampuan Mengaji ASN Kecamatan Muara Jawa 2024
B.41	Terbentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ)	SK Pembentukan UPZ Kecamatan Muara Jawa	1	1	100,00%	Sangat tinggi	SK Pembentukan UPZ Perangkat Daerah

Adapun penjelasan capaian dari setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut :

A. Indikator Kinerja Tujuan **Kecamatan Muara Jawa Tahun 2024**

"Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan". Target kinerja Tujuan tahun 2024 sebesar 64 Nilai dan realisasinya 91,76 Nilai atau capaian kinerja sebesar 143,38% dengan predikat Sangat Tinggi. Data ini bersumber dari Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Muara Jawa Semester 2 Tahun 2024. Seluruh berkas/laporan karena masyarakat dapat ditangani dan diberikan arahan sebagimana mestinya, diharapan bagian pelayanan Umum lebih meningkatkan pelayanan agar keadaan ini bisa dipertahankan untuk pelayanan yang lebih baik. Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Muara Jawa dapat dilihat dari tangkapan layar Bab V – Kesimpulan dari Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Muara Jawa Semester 2 Tahun 2024 berikut :

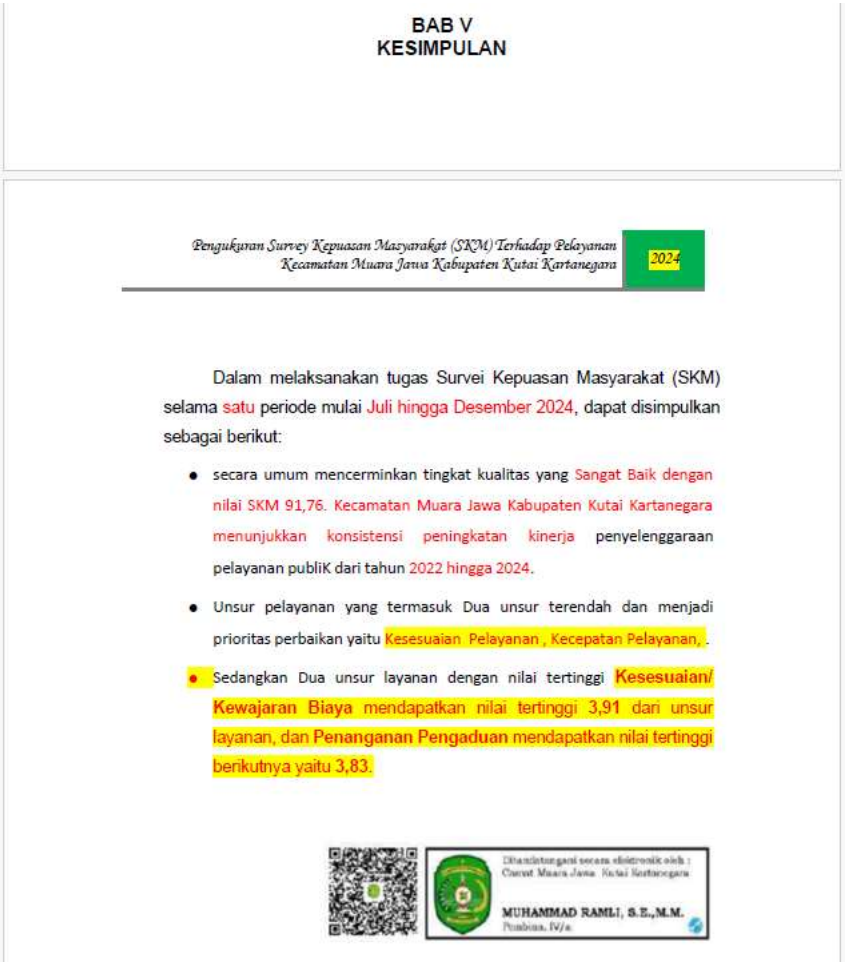

BAB V
KESIMPULAN

Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Terhadap Pelayanan Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara 2024

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai Juli hingga Desember 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 91,76. Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publiK dari tahun 2022 hingga 2024.
- Unsur pelayanan yang termasuk Dua unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu Kesesuaian Pelayanan , Kecepatan Pelayanan, .
- Sedangkan Dua unsur layanan dengan nilai tertinggi **Kesesuaian/ Kewajaran Biaya** mendapatkan nilai tertinggi 3,91 dari unsur layanan, dan **Penanganan Pengaduan** mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 3,83.

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Camat Muara Jawa Kutai Kartanegara
MUHAMMAD RAMLI, S.E.,M.M.
Pembina, IV/a

Secara lebih detail Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Muara Jawa Semester 1 dan Semester 2 Tahun 2024 dapat dilihat melalui link https://drive.google.com/file/d/18nYEVogAwDy3Bs_Ub2emge8iGfhiaUb8/view?usp=sharing

Faktor yang mendukung keberhasilan capaian indikator tujuan tersebut adalah:

1. Adanya SOP Bagian Pelayanan Umum dan aplikasi pendukung pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Kepada Masyarakat yang berkala dilakukan 2 kali dalam 1 tahun;
2. Ketersediaan Sumber Daya Aparatur pelaksana pemberian pelayanan kepada masyarakat baik di tingkat Kecamatan maupun Kelurahan.
3. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan solusi atau langkah-langkah perbaikan yang dilaksanakan untuk mempertahankan capaian indikator tujuan adalah:

1. Komitmen menjalankan SOP Pelaksanaan kegiatan pemberian pelayanan kepada masyarakat;
2. Upaya-upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur;
3. Upaya-upaya pemeliharaan dan/atau pengadaan baru sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelayanan;
4. Ketepatan waktu dalam melaksanakan kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan Kecamatan Muara Jawa.

B1. Indikator Kinerja Sasaran Utama Kecamatan Muara Jawa Tahun 2024

B.1.1 Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti.

Target kinerja sasaran utama ke-1 “Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti” adalah 65% dan realisasi 100%, sehingga diperpleh capaian kinerja sebesar 153,85% dengan predikat Sangat Tinggi. Capaian ini berhasil diperoleh dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat baik di Kecamatan maupun Kelurahan melalui loket Pelayanan Terpadu kecamatan (PATEN) dimana semua berkas masuk dari warga masyarakat dapat diselesaikan tepat waktu.

Faktor yang mendukung keberhasilan capaian indikator sasaran utama tersebut tidak berbeda jauh dengan faktor pendukung keberhasilan capaian sasaran utama ke-1 yaitu:

1. Adanya SOP Bagian Pelayanan Umum dalam pelaksanaan PATEN;
2. Ketersediaan Sumber Daya Aparatur pelaksana pemberian pelayanan kepada masyarakat baik di tingkat Kecamatan maupun Kelurahan.
3. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan solusi atau langkah-langkah perbaikan yang dilaksanakan untuk mempertahankan capaian indikator sasaran utama ke-1 adalah:

1. Komitmen menjalankan SOP Pelaksanaan kegiatan pemberian pelayanan kepada masyarakat;
2. Upaya-upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur;
3. Upaya-upaya pemeliharaan dan/atau pengadaan baru sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelayanan;

Tangkapan layar Laporan PATEN Kecamatan Muara Jawa Tahun 2024 sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN MUARA JAWA
JL. IR. SOEKARNO NO. 58 TELP. (0541) 692000 KODE POS 75261 MUARA JAWA

LAPORAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)
Kecamatan Muara Jawa
Bulan Januari s/d Desember 2024

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PELAYANAN	JENIS	PEMROSES
1	Jumlah Pembuatan Surat Keterangan	67	Berkas	Seksi PMD
2	Jumlah Pembuatan Surat Keterangan	19	Berkas	Seksi Pemerintahan
3	Jumlah Pembuatan KTP-el	3.459	Berkas	Seksi Pemerintahan
4	Jumlah Perekaman KTP-el	3.459	Berkas	Seksi Pemerintahan
5	Jumlah Pembuatan Kartu Keluarga	1.502	Berkas	Seksi Pemerintahan
6	Jumlah Pembuatan Surat Pindah	13	Berkas	Seksi Pemerintahan
7	Jumlah Pembuatan SKPT	651	Berkas	Seksi Pemerintahan
8	Jumlah Pembuatan BPPAT	25	Berkas	Seksi Pemerintahan
9	Jumlah Legalisir Surat Tanah	0	Berkas	Seksi Pemerintahan
10	Jumlah Pembuatan Kartu Kuning (AK-1)	171	Berkas	Seksi Kesra
11	Jumlah Pembuatan Dispensasi Nikah	28	Berkas	Seksi Kesra
12	Jumlah Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM	18	Berkas	Seksi Kesra
13	Jumlah Regestrasi Surat Keterangan Waris	85	Berkas	Seksi Kesra
14	Jumlah Pembuatan Surat Keterangan Hibah	0	Berkas	Seksi Kesra
15	Jumlah Pembuatan Surat Keterangan	12	Berkas	Seksi Kesra
16	Jumlah Regestrasi Pengantar SKCK	1.428	Berkas	Seksi Tramtib
17	Jumlah Pembuatan Surat Rekomendasi Izin Keramaian	4	Berkas	Seksi Tramtib
18	Jumlah Pembuatan Surat Keterangan / PARPOL	0	Berkas	Seksi Tramtib
	JUMLAH PELAYANAN	10.941	Berkas	

Berdasarkan Analisis Data Paten Bahwa, Jumlah Pelayanan Selama Bulan Januari s/d Desember 2024 sebanyak 10.941 Pelayanan.
Demikian Data Laporan Pelayanan Paten ini dibuat , untuk dapat diketahui sebagaimana mestinya.

Muara Jawa, 13 Januari 2025
An. Camat Muara Jawa
Kasi Pelayanan Umum

Hi. Nurjanah, S.Sos
Nip. 197006142000122004

Secara detail Laporan PATEN Kecamatan Muara Jawa Tahun 2024 dapat dilihat melalui link :
https://drive.google.com/file/d/1HuoZyJOh8fLwSxS2rk9RIYVnCcDEjN93/view?usp=sharing

B.1.2 Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Target indikator kinerja sasaran utama ke-2 adalah Persentase Capaian Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar 84% dan terealisasi sebesar 100% sehingga capaian kinerjanya adalah 119,05% dengan predikat Sangat Tinggi.

Faktor yang mendukung keberhasilan capaian indikator sasaran utama tersebut tidak berbeda jauh dengan faktor pendukung keberhasilan capaian sasaran utama ke-2 tersebut adalah:

1. Pelaksanaan SOP Bagian Keamanan dan Ketertiban serta perlindungan masyarakat;
2. Ketersediaan Sumber Daya Aparatur baik di tingkat Kecamatan maupun Kelurahan.
3. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
4. Adanya koordinasi dengan Polsek dan Danramil Kecamatan Muara Jawa dalam menjaga keamanan,ketertiban dan suasana kondusif di Kecamatan Muara Jawa.
5. Kerjasama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk menjaga suasana harmoni antar warga

Sedangkan solusi atau langkah-langkah perbaikan yang dilaksanakan untuk mempertahankan capaian indikator sasaran utama ke-2 tersebut adalah:

1. Komitmen menjalankan SOP Pelaksanaan kegiatan pemberian pelayanan kepada masyarakat;
2. Upaya-upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur;
3. Upaya-upaya pemeliharaan dan/atau pengadaan baru sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelayanan;
4. Meningkatkan koordinasi dengan Polsek dan Danramil Kecamatan Muara Jawa dalam menjaga keamanan,ketertiban dan suasana kondusif di Kecamatan Muara Jawa.
5. Meningkatkan Kerjasama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk menjaga suasana harmoni antar warga.
6. Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam pengamanan lingkungan secara mandiri melalui pelaksanaan siskamling.

Data dukung penjelasan capain kinerja sasaran utama ke-2 dapat dilihat melalui tangkapan layer Laporan Seksi Trantiblinmas Kecamatan Muara Jawa Thaun 2024 berikut ini :

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN MUARA JAWA
Jl. Ir. Soekarno 58 RT. 35, Kel. Muara Jawa Ulu Kodepos 75261 Telepon +62 541 692000
website www.muarajawa.id email kecmuarajawa2020@gmail.com

LAPORAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KECAMATAN MUARA JAWA
BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2024

NO	JENIS KEGIATAN/KEJADIAN	JUMLAH	JENIS	KETERANGAN
1	Laporan Tenaga Kerja Asing	0	0	0
2	Laporan Kebakaran Rumah	11	Berkas	Seksi Trantibum
3	Laporan Kebakaran Hutan atau Lahan	21	Berkas	Seksi Trantibum
4	Laporan Pohon Tumbang Karena Angin Kencang	4	Berkas	Seksi Trantibum
5	Laporan Narkoba	3	Berkas	Seksi Trantibum
6	Laporan Persetubuhan	1	Berkas	Seksi Trantibum
7	Laporan Minuman Keras	2	Berkas	Seksi Trantibum
8	Laporan Perlindungan Anak	1	Berkas	Seksi Trantibum
9	Laporan Tambang Ilegal	1	Berkas	Seksi Trantibum
10	Laporan Pengrusakan	1	Berkas	Seksi Trantibum
11	Laporan Penggelapan	2	Berkas	Seksi Trantibum
12	Laporan KDRT	1	Berkas	Seksi Trantibum
13	Ijin Keramaian	21	Berkas	Seksi Trantibum
14	Pengantar SKCK	1.412	Berkas	Seksi Trantibum
15	Penertiban PKL	7	Dokumentasi	Seksi Trantibum
	JUMLAH KEGIATAN	1.488		

Muara Jawa, Januari 2025
An. Camat Muara Jawa
Kasi Trantibum & Linmas

RULI HAMBRANI, S.Ag.,MM
NIP. 19741104 200701 1 023

Secara detail Laporan tersebut dapat diakses melalui link:

https://drive.google.com/file/d/125PLbUq-f5YlncVDn7FNOfaq4Ksrhdfh/view?usp=sharing

B.1.3 Pertumbuhan Pendapatan Asli Kewenangan Kecamatan.

Target Tahun 2024 untuk indikator kinerja sasaran utama ke-3 yaitu Pertumbuhan Pendapatan Asli Kewenangan Kecamatan yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Muara Jawa sebesar 25%. Namun sejak tahun 2022 target tersebut tidak tercapai dan tidak diperhitungkan dalam pengukuran capaian kinerja Kecamatan Muara Jawa karena tidak ada lagi pendapatan asli kewenangan kecamatan berupa retribusi Izin Mendiriikan Bangunan. Hal ini berdasarkan kepada Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 40 Tahun 2018 tentang

penyelenggaraan bangunan gedung, penerbitan ijin secara online melalui aplikasi simbg.pu.go.id sehingga tidak ada lagi penerbitan IMB dan pemungutan retribusinya di Kecamatan, dan lebih detail dapak diakses melalui link :
https://drive.google.com/file/d/1TYFQ2Pn1mpC3b8N8z1MAQmIRYf6-Wg5Z/view?usp=sharing

Demikian penjabaran terkait target dan capaian Indikator Tujuan serta Sasaran Utama Kecamatan Muara Jawa Tahun 2024. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai Indikator Sasaran Tambahan sebanyak 40 Indikator.

B2. Indikator Kinerja Sasaran Tambahan Kecamatan Muara Jawa Tahun 2024

B.2.1a Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun.

Target indikator kinerja sasaran tambahan 1a adalah Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun sebesar 100% dan realisasi sebesar 97,5% sehingga capaian kinerjanya adalah 97,5% dengan predikat Sangat Tinggi.

Walaupun capaian kinerja indikator kinerja tambahan ini masuk kategori Sangat Tinggi namun kurang memuaskan bagi Pemerintah Kecamatan Muara Jawa. Penyebab tidak tercapainya realisasi sesuai target sebesar 100% karena dari 40 ASN wajib lapor e-LHKPN, terdapat 1 ASN yang sebenarnya telah membuat laporan tersebut namun karena kesalahan teknis tidak mengirimkan laporan tersebut ke web e-lhkpn.

Hal ini menjadi perhatian serius bagi Camat beserta Admin e-LHKPN dan Pejabat Pembina Kepegawaian Kecamatan Muara Jawa untuk untuk memonitoring proses dan progres penyampaian pelaporan sebelum 31 Maret setiap tahunnya.

Akes terhadap bukti dukung :
https://drive.google.com/file/d/1x_0Emy0U8O7bEJj3nn4eHVNs2FfLe2i9/view?usp=sharing

B.2.1b Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun.

Target indikator kinerja sasaran tambahan 2.1b adalah Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun sebesar 100% dan realisasi sebesar 98,6% sehingga capaian kinerjanya adalah 98,6% dengan predikat Sangat Tinggi. Walaupun capaian kinerja indikator kinerja tambahan ini masuk kategori Sangat Tinggi namun kurang memuaskan bagi Pemerintah Kecamatan Muara Jawa. Penyebab tidak tercapainya realisasi sesuai target sebesar 100% karena dari 73 ASN wajib lapor SPT, terdapat 1 ASN yang karena persoalan teknis tidak dapat membuat dan menyampaikan laporan SPT Tahunan.

Hal ini menjadi perhatian serius bagi Camat beserta Admin e-LHKPN dan Pejabat Pembina Kepegawaian Kecamatan Muara Jawa untuk untuk memonitoring proses dan progres penyampaian pelaporan sebelum 31 Maret setiap tahunnya.

REKAP DAFTAR WAJIB SPT TAHUNAN

SE- KECAMATAN MUARA JAWA TAHUN 2023

NO	NAMA	NIP	JABATAN	GOL / RUANG	INSTANSI	SPT TAHUNAN
1	SAFRUDDIN,S.Sos.,M.M.	196708141988031009	CAMAT	IV/b	KANTOR CAMAT MUARA JAWA	SUDAH LAPOR
2	MUHAMMAD RAMLI, S.E.,M.M.	197506042000121003	SEKRETARIS CAMAT	IV/a	KANTOR CAMAT MUARA JAWA	SUDAH LAPOR
3	ROHANA,S.Sos	196707121986022001	KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	III/d	KANTOR CAMAT MUARA JAWA	SUDAH LAPOR
4	DINA MARIANA,S.E.,M.M.	198401102010012001	KASI PEMBANGUNAN	III/d	KANTOR CAMAT MUARA JAWA	SUDAH LAPOR
5	Hj. NORJANAH,S.Sos	197006142000122004	KASUBAG UMUM KETATALAKSANAAN & KEPEGAWAIAN	III/d	KANTOR CAMAT MUARA JAWA	SUDAH LAPOR
6	NILA IRMAWATI,S.Mn.	197608042003122007	KASUBAG PENYUSUNAN PROGRAM & KEUANGAN	III/d	KANTOR CAMAT MUARA JAWA	SUDAH LAPOR
7	USMAN, S.Pdi.	19740124 200801 1 011	LURAH MUARA JAWA ULU	III/c	KANTOR LURAH MUARA JAWA ULU	SUDAH LAPOR

8	H. ISKANDAR, S.E.	19670829 198602 1 002	KASI PEMERINTAHAN MUARA JAWA ULU	III/c	KANTOR LURAH MUARA JAWA ULU	SUDAH LAPOR
9	NAFSIAH, S.E.	197901132001122002	KASI PEMBANGUNAN MUARA JAWA ULU	III/c	KANTOR LURAH MUARA JAWA ULU	SUDAH LAPOR
10	AKMIDATUL MUSLIMAH,A.Md.	198808192011012002	KASI SOSIAL MUARA JAWA ULU	III/b	KANTOR LURAH MUARA JAWA ULU	SUDAH LAPOR
11	FATMAWATI, S.Sos.,M.Si.	19700629 200112 2 002	LURAH MUARA JAWA PESISIR	IV/a	KANTOR LURAH MUARA JAWA PESISIR	SUDAH LAPOR
12	MUKOSIM, S.IP.	197103151991031007	SEKRETARIS MUARA JAWA PESISIR	III/d	KANTOR LURAH MUARA JAWA PESISIR	SUDAH LAPOR
13	ABDUL MUIN, S.Pd.	196808071997011004	KASI PEMERINTAHAN MUARA JAWA PESISIR	IV/a	KANTOR LURAH MUARA JAWA PESISIR	SUDAH LAPOR
14	TARKIAH, S.E.	198011232001122001	KASI PEMBANGUNAN MUARA JAWA PESISIR	III/d	KANTOR LURAH MUARA JAWA PESISIR	SUDAH LAPOR
15	Hj. BAHRIAH	19671213 198803 2 006	KASI SOSIAL MUARA JAWA PESISIR	III/b	KANTOR LURAH MUARA JAWA PESISIR	SUDAH LAPOR
16	ADI KRESNA, S.P.	197512052005021002	LURAH MUARA JAWA TENGAH	III/d	KANTOR LURAH MUARA JAWA TENGAH	SUDAH LAPOR
17	RULI HAMBRANI, S.Ag.	19741104 200701 1 023	SEKRETARIS MUARA JAWA TENGAH	III/d	KANTOR LURAH MUARA JAWA TENGAH	SUDAH LAPOR
18	ANTON ARIFIN, S.Pd.	198204272008011017	KASI PEMERINTAHAN MUARA JAWA TENGAH	III/c	KANTOR LURAH MUARA JAWA TENGAH	SUDAH LAPOR
19	MARIA ASTUTI, S.E.	198212142007012012	KASI PEMBANGUNAN MUARA JAWA TENGAH	III/b	KANTOR LURAH MUARA JAWA TENGAH	SUDAH LAPOR
20	IDA ROYANI, S.E.	19701023 200012 2 004	KASI SOSIAL MUARA JAWA TENGAH	III/b	KANTOR LURAH MUARA JAWA TENGAH	SUDAH LAPOR
21	H. RUDIANSYAH, S.E.	19770901 200012 1 001	LURAH MUARA JAWA ILIR	III/d	KANTOR LURAH MUARA JAWA ILIR	SUDAH LAPOR

22	SUNARSIH, S.Pd.	19691222 199103 2 006	SEKRETARIS MUARA JAWA ILIR	IV/a	KANTOR LURAH MUARA JAWA ILIR	SUDAH LAPOR
23	PACHRUDI, S.Pd.	19800622 200801 1 012	KASI PEMERINTAHAN MUARA JAWA ILIR	III/b	KANTOR LURAH MUARA JAWA ILIR	SUDAH LAPOR
24	DENNY DHARMA WAHYU, S.Sos.	198703182015031002	KASI PEMBANGUNAN MUARA JAWA ILIR	III/b	KANTOR LURAH MUARA JAWA ILIR	SUDAH LAPOR
25	AKHMAD RASYID, S.Pd.	196805082001051001	KASI SOSIAL MUARA JAWA ILIR	III/b	KANTOR LURAH MUARA JAWA ILIR	SUDAH LAPOR
26	JUMAH HIDAYANTI, A.Md	196810092000122001	SEKRETARIS TAMA POLE	III/c	KANTOR LURAH TAMA POLE	SUDAH LAPOR
27	Ir. MURTASYIDIN MUDAWIRAWAN	19671010 199803 1 007	KASI PEMERINTAHAN TAMA POLE	III/d	KANTOR LURAH TAMA POLE	SUDAH LAPOR
28	RUSDIANSYAH	197910102001121003	KASI PEMBANGUNAN TAMA POLE	III/b	KANTOR LURAH TAMA POLE	SUDAH LAPOR
29	EDY KASIANTO S., S.Pd.	197301121998021001	LURAH DONDANG	III/d	KANTOR LURAH DONDANG	SUDAH LAPOR
30	IMA, S.E.	198202022007012019	SEKRETARIS DONDANG	III/c	KANTOR LURAH DONDANG	SUDAH LAPOR
31	ASWAN WAHYUDI,S.IP	197810072009021001	KASI PEMERINTAHAN DONDANG	III/b	KANTOR LURAH DONDANG	SUDAH LAPOR
32	SAMSU RIZAL, S.Pd.	198007192005021003	LURAH TELUK DALAM	IV/a	KANTOR LURAH TELUK DALAM	SUDAH LAPOR
33	SURIANINGSIH	196804151995032005	KASI PEMERINTAHAN TELUK DALAM	III/c	KANTOR LURAH TELUK DALAM	SUDAH LAPOR
34	SYAMSUL BAHRI, S.E.	197912092001121005	KASI PEMBANGUNAN TELUK DALAM	III/d	KANTOR LURAH TELUK DALAM	SUDAH LAPOR
35	HAMSIAH	197904182001122001	KASI SOSIAL TELUK DALAM	III/a	KANTOR LURAH TELUK DALAM	SUDAH LAPOR
36	MASRIANSYAH,S.Sos	197609272000121001	LURAHA MUARA KEMBANG	III/d	KANTOR LURAH MUARA KEMBANG	SUDAH LAPOR
37	ABD. MUIN, S.Sos	196708171986101001	SEKRETARIS MUARA KEMBANG	III/d	KANTOR LURAH MUARA KEMBANG	SUDAH LAPOR
38	YULIANSYAH, S.E.	197605172001121001	KASI PEMERINTAHAN MUARA KEMBANG	III/b	KANTOR LURAH MUARA KEMBANG	SUDAH LAPOR

39	HARMAN, S.Ag.	197210102007011053	KASI PEMBANGUNAN MUARA KEMBANG	III/c	KANTOR LURAH MUARA KEMBANG	SUDAH LAPOR
40	H. NORDIANSYAH,S.Sos.,M.Adm.KP	196803041991031008	ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATA	IV/a	KANTOR CAMAT MUARA JAWA	SUDAH LAPOR
41	HARDIANSYAH, S.E.	196604031994021002	PENGELOLA	III/d	KANTOR LURAH TELUK DALAM	SUDAH LAPOR
42	SALMIAH, S.E	197606242007012020	PENATA LAPORAN KEUANGAN	III/a	KANTOR CAMAT MUARA JAWA	SUDAH LAPOR
43	IFNI HANIFAH GANI,S.Sos	198005152007012039	ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	III/a	KANTOR CAMAT MUARA JAWA	SUDAH LAPOR
44	HESTARI WAHYUNI,S.Sos	198012022007012012	BENDAHARA	III/a	KANTOR CAMAT MUARA JAWA	SUDAH LAPOR
45	SURYANI,S.IP.	198106172007012010	PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN	III/a	KANTOR CAMAT MUARA JAWA	SUDAH LAPOR
46	NOOR HASANAH	198209052007012013	PENGOLAH DATA	II/d	KANTOR CAMAT MUARA JAWA	SUDAH LAPOR
47	HATMAH,S.I.P	198105102007012022	PENYUSUSN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN	III/a	KANTOR CAMAT MUARA JAWA	BELUM LAPOR
48	MAWARNI	198511022010012013	PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	II/c	KANTOR CAMAT MUARA JAWA	SUDAH LAPOR
49	RULI APIANTARA	198004062009021001	PENGADMINISTRASI UMUM	II/d	KANTOR CAMAT MUARA JAWA	SUDAH LAPOR
50	NURHAMIDAH	198007142010012017	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	II/d	KANTOR CAMAT MUARA JAWA	SUDAH LAPOR
51	NUR HAMSINA, S.I.P	19781203 200701 2 015	PENGOLAH DATA	III/a	KANTOR LURAH MUARA JAWA ULU	SUDAH LAPOR
52	CHAIRUL HUDA	197906062009011006	PENGELOLA DATA	II/a	KANTOR LURAH MUARA JAWA ULU	SUDAH LAPOR
53	DEDI EKA FAHROZI, S.Sos.	19800204 201212 1 002	PENGELOLA DATA	II/d	KANTOR LURAH MUARA JAWA PESISIR	SUDAH LAPOR

54	INDAH SUPARTI	19840523 201212 2 003	PENGELOLA DATA	II/d	KANTOR LURAH MUARA JAWA PESISIR	SUDAH LAPOR
55	NURUL HUDA,S.I.P	19750909 200701 2 028	PENGADMINISTRASI UMUM	III/a	KANTOR LURAH MUARA JAWA TENGAH	SUDAH LAPOR
56	YUNITA,S.E	19810706 200701 2 018	PENGELOLA DATA	III/a	KANTOR LURAH MUARA JAWA TENGAH	SUDAH LAPOR
57	SITI MAISYARAH	19810901 201001 2 006	PENGADMINISTRASI UMUM	II/d	KANTOR LURAH MUARA JAWA TENGAH	SUDAH LAPOR
58	RENI YUSMIATI	19751101 200701 2 029	PENGELOLA DATA	II/c	KANTOR LURAH MUARA JAWA TENGAH	SUDAH LAPOR
59	SITI ARIANI,S.Sos	19761105 200701 2 025	Pengadministrasi Umum	III/a	KANTOR LURAH MUARA JAWA ILIR	SUDAH LAPOR
60	SITI RADIAH,S.I.P	19790816 200701 2 027	PENGOLAH DATA	III/a	KANTOR LURAH MUARA JAWA ILIR	SUDAH LAPOR
61	RABIATUL AWALIAH	19830115 200801 2 010	PENGOLAH DATA	II/d	KANTOR LURAH MUARA JAWA ILIR	SUDAH LAPOR
62	METTY MARLINA	19791205 200902 2 005	PENGADMINISTRASI UMUM	II/d	KANTOR LURAH MUARA JAWA ILIR	SUDAH LAPOR
63	DEWI RUDIATININGSIH, S.Sos	19840812 200902 2 003	PENGOLAH DATA	II/d	KANTOR LURAH TAMA POLE	SUDAH LAPOR
64	JUNAIDI	19840626 201001 1 033	PENGELOLA DATA	II/d	KANTOR LURAH DONDANG	SUDAH LAPOR
65	JAINAB	19791205 201001 2 015	PENGOLAH DATA	II/d	KANTOR LURAH DONDANG	SUDAH LAPOR
66	MARHAMAH	19820126 201001 2 001	PENGADMINISTRASI UMUM	II/d	KANTOR LURAH DONDANG	SUDAH LAPOR
67	HAMRANI	19730412 200012 1 007	PENGADMINISTRASI UMUM	II/c	KANTOR LURAH DONDANG	SUDAH LAPOR
68	AGUS SUSANTO	198307102009011001	PENGELOLA DATA	II/d	KANTOR LURAH TELUK DALAM	SUDAH LAPOR

69	FADLI EPENDI, S.Sos.	197803112008011021	PENGADMINISTRASI UMUM	II/c	KANTOR LURAH TELUK DALAM	SUDAH LAPOR
70	PAHLINDA	198309102010012033	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	II/d	KANTOR LURAH TELUK DALAM	SUDAH LAPOR
71	SANATRI SULASIH,A.Md.S.Ak	198508182011012003	PENGELOLA DATA	III/a	KANTOR LURAH MUARA KEMBANG	SUDAH LAPOR
72	FAHRUNI,S,Sos	198009232006041014	PENGELOLA DATA	III/a	KANTOR LURAH MUARA KEMBANG	SUDAH LAPOR
73	JUMIATI	197809092009022004	PENGADMINISTRASI UMUM	II/d	KANTOR LURAH MUARA KEMBANG	SUDAH LAPOR

JUMLAH WAJIB LAPOR SPT TAHUNAN	**73**
JUMLAH YANG TELAH LAPOR SPT TAHUNAN	**72**
PROSENTASE PELAPORAN SPT TAHUNAN	**98,63**

Akses terhadap bukti dukung capaian kinerja:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MyauRYJJgbMhgP2VkAT8HCnTexzkQS0b/edit?usp=sharing&ouid=117360711041597548412&rtpof=true&sd=true

B.2.2 Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun.

Target indikator kinerja sasaran tambahan 2.2 adalah Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun sebesar 100% dan realisasi sebesar 100% sehingga capaian kinerjanya tercapai 100% dengan predikat Sangat Tinggi. Batasan waktu dalam input e-Kinerja dari BKN dan BKPSDM serta komitmen dari Pimpinan OPD dan Pejabat Pembina Kepegawaian OPD dalam memberikan pemahaman akan pentingnya penyusunan dan penyampaian SKP sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja.

Pemerintah Kecamatan Muara Jawa wajib memegang komitmen untuk mempertahankan capaian indikator kinerja tambahan ini di tahun-tahun selanjutnya sebagai upaya tertib administrasi dan memwujudkan misi Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani.

REKAP PENYAMPAIAN SKP TAHUNAN TAHUN 2023
PER TANGGAL 29 PEBRUARI 2024
KANTOR CAMAT MUARA JAWA

NO	NAMA	NIP	JABATAN	KETERANGAN
KANTOR CAMAT MUARA JAWA				
1	SAFRUDDIN, S.Sos., M.M.	19670814198803 1009	CAMAT	ADA
2	MUHAMMAD RAMLI, S.E, M.M.	19750804200012 1003	SEKRETARIS CAMAT	ADA
3	ROHANA, S.Sos	19670712198602 2001	KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	ADA
4	DINA MARIANA, S.E., M.M.	19840110201001 2001	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	ADA
5	Hj. NORJANAH, S.Sos	19700614200012 2004	KASUBAG UMUM KETATALAKSANAAN & KEPEG	ADA
6	NILA IRMAWATI, S.Mn.	19760804200312 2007	KASUBAG PENYUSUNAN PROGRAM &	ADA
7	H. NORDIANSYAH, S.Sos, M.Adm.KP	19680304199103 1006	PELAKSANA UMUM	ADA
8	HARDIANSYAH, SE	19860403199402 1002	PENGELOLA DATA	ADA
9	IFNI HANIFAH GANI, S. Sos.	19800515200701 2039	Analis Rencana Program dan Kegiatan	ADA
10	HESTARI WAHYUNI, S. Sos.	19811202200701 2012	Analis Rencana Program dan Kegiatan	ADA
11	SALMIAH, S.E.	19780624200701 2020	Penata Laporan Keuangan	ADA
12	SURYANI, S.IP.	19810617200701 2010	Pengadministrasi Pemerintahan	ADA
13	NOOR HASANAH	19820906200701 2013	Pengelola Data	ADA
14	HATMAH, S.I.P.	19810510200701 2022	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	ADA
15	RUU APIANTARA	19800406200902 1001	Pengadministrasi Umum	ADA
16	NURHAMIDAH	19800714201001 2017	Pengelola Kepegawaian	ADA
17	MAWARNI	19851102201001 2013	Pengelola Data	ADA
KELURAHAN MUARA JAWA ULU				
18	USMAN, S.Pd.	19740124 200801 1011	Lurah	ADA
19	H. ISKANDAR, S.E.	19670829 198602 1 002	Kasi Pemerintahan	ADA
20	NAFSIAH, S.E.	19790113200112 2002	Kasi Pembangunan	ADA
21	AKMIDATUL MUSLIMAH,A.Md	19880816201101 2002	Kasi Sosial	ADA
22	NUR HAMBINA, S.I.P	19781203200701 2015	Pengelola Data	ADA
23	CHAIRUL HUDA	19790806200901 1006	Pengadministrasi Umum	ADA
KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR				
24	FATMAWATI, S.Sos.,M.Si.	19700629 200112 2 002	Lurah	ADA
25	MUKOSIM, S.IP.	19710315199103 1007	Sekretaris Lurah	ADA
26	ABDUL MUIN, S.Pd.	19680807199701 1004	Kasi Pemerintahan	ADA
27	TARKIAH, S.E.	19801123200112 2001	Kasi Pembangunan	ADA
28	Hj. BAHRIAH	19671213 198803 2 008	Kasi Sosial	ADA
29	DEDI EKA FAHROZI, S.Sos.	19800204 201212 1 002	Pengelola Data	ADA
30	INDAH SUPARTI	19840623 201212 2 003	Pengelola Data	ADA
KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH				
31	ADI KRESNA, S.P.	19751205200502 1002	Lurah	ADA
32	RUU HAMERANI, S.Ag.	19741104200701 1023	Sekretaris Lurah	ADA
33	ANTON ARIFIN, S.Pd.	19820427200801 1017	Kasi Pemerintahan	ADA
34	MARJA ASTUTI, S.E.	19821214200701 2012	Kasi Pembangunan	ADA
35	IDA ROYANI, S.E.	19701023 200012 2 004	Kasi Sosial	ADA
36	NURUL HUDA, S.IP	19750930 200701 2 025	Pengadministrasi	ADA
37	YUNITA, S.E.	19810706 200701 2 015	Pengelola Data	ADA
38	SITI MAISYARAH	19810901 201001 2 008	Pengadministrasi	ADA
39	RENI YUSMIATI	19751101 200701 2 029	Pengelola Data	ADA
KELURAHAN TAMA POLE				
40	JUMAH HIDAYANTI, A.Md	19881002000122001	Sekretaris	ADA
41	RUSDIANSYAH, S.IP	19791010200011210 03	Kasi Pembangunan	ADA
42	II. MUKTASYIDIN MUDAWIRAWAN	19871010199803 1007	Kasi Pemerintahan	ADA
43	DEWI RUDIATININGSIH, S.Sos	19840812200902 2003	Pengelola Data	ADA
KELURAHAN MUARA JAWA ILIR				
44	H. RUDIANSYAH, S.E.	19770901 200012 1 001	Lurah	ADA
45	SUNARSIH, S.Pd.	19691222 199703 2 008	Sekretaris Lurah	ADA
46	PACHRUDI, S.Pd.	19800822 200801 1 012	Kasi Pemerintahan	ADA
47	DENNY DARMA WAHYU, S.Sos.	19870318201503 1002	Kasi Pembangunan	ADA
48	AKHMAD RASYID, S.Pd.	19680508200105 1001	Kasi Sosial	ADA
49	SITI RADIAH, S.I.P.	19760816 200701 2 027	Pengolah Data	ADA
50	Hj. SITI ARIANI, S. Sos.	19761105 200701 2 025	Pengadministrasi Umum	ADA
51	RABIATUL AWALIAH	19830115 200801 2 010	Pengolah Data	ADA
52	METTY MARLINA	19791205 200902 2 005	Pengadministrasi Umum	ADA
KELURAHAN DONDANG				
53	EDY KASIANTO S., S.Pd.	19730112198902 1001	Lurah	ADA
54	IMA, S.E.	19820202200701 2019	Sekretaris Lurah	ADA
55	ASWAN WAHYUDI, S.I.P.	19781007200902 1001	Kasi Pemerintahan	ADA
56	JUNAIDI	19840626201001 1033	Pengadministrasi Umum	ADA
57	JAINAB	19791205201001 2015	Pengadministrasi Kepegawaian	ADA
58	MARHAMAH	19820126201001 2001	Pengadministrasi Umum	ADA
59	HAMRANI	19730412200012 1007	Pengadministrasi Umum	ADA
KELURAHAN TELUK DALAM				
60	SAMSU RIZAL, S.Pd.	19800719200502 1003	Lurah	ADA
61	SURIANINGSIH	19680415199503 2005	Kasi Pemerintahan	ADA
62	SYAMSUL BAHRI, S.E.	19791209200112 1005	Kasi Pembangunan	ADA
63	HAMSIAH, S. Sos.	19760418200012 2001	Kasi Sosial	ADA
64	AGUS SUSANTO	19830710200801 1001	Pengelola Data	ADA
65	FADLI EFENDI, S.Sos.	19780311200801 1021	Pengadministrasi Umum	ADA
67	PAHLINDA	19830910201001 2033	Pengelola Data	ADA
KELURAHAN MUARA KEMBANG				
68	MASRIANSYAH, S.Sos	19760627200012 1001	Lurah	ADA
69	ABD. MUIN, S.Sos	19670617198610 1001	Sekretaris Lurah	ADA
71	YULIANSYAH, S.E.	19760517200112 1001	Kasi Pemerintahan	ADA
70	HARMAN, S.Ag.	19721010200701 1053	Kasi Pembangunan	ADA
72	FAHRUNI, S.Sos.	19800923200641 1014	Pengolah Data	ADA
73	SANATRI SULASIH, A.Md., S.Ak.	19850818201101 2009	Pengelola Data	ADA
74	JUMIATI	19780902200902 2004	Pengadministrasi Umum	ADA

Muara Jawa, 29 Pebruari 2024

CAMAT

SAFRUDDIN, S.Sos, M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19670814198803 1009

Kasubag Umum,Ketatalaksanaan & Kepegawaian

Hj. NORJANAH, S.Sos
Penata TK I (III/d)
NIP.19700614200012 2004

Akses terhadap bukti dukung :

https://drive.google.com/file/d/1gR--xWukUwR0LAZ2DWrYGzDaqP6ptEe9/view?usp=sharing

B.2.3 Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun.

Target indikator kinerja sasaran tambahan 2.4 adalah Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun sebesar 100% dan realisasi sebesar 100% sehingga capaian kinerjanya tercapai 100% dengan predikat Sangat Tinggi. Batasan waktu inputan, monitoring berkala baik dari OPD Pengampu (UKPBJ) serta Pimpinan ODP sangat mempengaruhi proses dan progres penginputan dan pengumuman paket pengadaan pada alikasi SIRUP

Pemerintah Kecamatan Muara Jawa wajib memegang komitmen untuk mempertahankan capaian indikator kinerja tambahan ini di tahun-tahun selanjutnya sebagai upaya tertib administrasi dan memwujudkan misi Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani.

NO	SATUAN KERJA	PAGU SIPD	PAGU PENGADAAN	PENYEDIA		SWAKELOLA		PENYEDIA DALAM SWAKELOLA		TOTAL		PERSENTASE PAGU ANGGARAN	SELISIH PAGU PENGADAAN
				PAKET	PAGU	PAKET	PAGU	PAKET	PAGU	PAKET	PAGU		
50	Kecamatan Muara Jawa	59.211.473.744	61.715.461.189	1.066	50.761.101.883	76	10.954.138.306	0	0	1142	61.715.461.189	100,00%	0
51	Kelurahan Dondang	1.518.860.000	1.486.840.000	20	756.370.000	6	728.770.000	0	0	26	1.486.840.000	100,00%	0
52	Kelurahan Muara Jawa Ilir	1.841.124.000	1.808.844.000	34	760.380.000	6	1.048.464.000	0	0	40	1.808.844.000	100,00%	0
53	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	2.517.224.000	2.410.714.000	45	773.394.000	5	1.637.320.000	0	0	50	2.410.714.000	100,00%	0
54	Kelurahan Muara Jawa Tengah	1.680.000.000	1.448.510.000	36	617.020.000	5	831.490.000	0	0	41	1.448.510.000	100,00%	0
55	Kelurahan Muara Jawa Ulu	2.920.000.000	2.887.900.000	21	669.140.000	12	2.218.760.000	0	0	33	2.887.900.000	100,00%	0
56	Kelurahan Muara Kembang	1.603.272.700	1.566.871.700	38	788.482.700	3	778.080.000	0	0	41	1.566.871.700	100,00%	0
57	Kelurahan Tama Pole	952.420.000	948.310.000	17	655.840.000	23	347.470.000	0	0	40	948.310.000	100,00%	0
58	Kelurahan Teluk Dalam	1.019.948.000	987.363.000	51	614.189.000	7	373.174.000	0	0	58	987.363.000	100,00%	0

Lebih lengkap, bukti dukung dapat diakses melalui link :

https://drive.google.com/file/d/13_LddnbcvJVFGqrEcgSrs-l7c4ceohND/view?usp=sharing

B.2.5 Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan.

Target indikator kinerja sasaran tambahan 2.5 adalah Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan sebesar 100% dan realisasi sebesar 100% sehingga capaian kinerjanya tercapai 100% dengan predikat Sangat Tinggi. Batasan waktu inputan dan monitoring berkala baik dari OPD Pengampu (BAPPEDA) serta Pimpinan ODP sangat mempengaruhi proses dan progres penginputan pada aplikasi e-pantau. Pemerintah Kecamatan Muara Jawa wajib memegang komitmen untuk mempertahankan capaian indikator kinerja sebagai upaya tertib administrasi dan mewujudkan misi Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani.

Akses terhadap bukti dukung melalui link :

https://drive.google.com/file/d/1Ru0ff--QDMyj6K7kP4Y6zSGnn3QH8NYn/view?usp=sharing

B.2.6 Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang akan diadakan.

Target indikator kinerja sasaran tambahan 2.6 sebesar 100% dan realisasi sebesar 100% sehingga capaian kinerjanya adalah 100% dengan predikat Sangat Tinggi. Batasan waktu penyampaian usulan dari OPD Pengampu (BPKAD Bidang Aset) sangat mempengaruhi proses dan progres penyampaian usulan RKMD.. Pemerintah Kecamatan Muara Jawa wajib memegang komitmen untuk mempertahankan capaian indikator kinerja sebagai upaya tertib administrasi dan mewujudkan misi Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani.

Akses terhadap bukti dukung :

https://drive.google.com/file/d/10niB7QRZuIPcl5M3-HBDfkyvybc19x2U/view?usp=sharing

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN MUARA JAWA
Jalan Ir. Soekarno Nomor 58 Kelurahan Muara Jawa Ulu

Muara Jawa, 21 November 2024

Kepada
Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab.Kutai Kartanegara
Di -
Tenggarong

SURAT PENGANTAR
Nomor : B. 0054/SET.CMJ.UKK/800.1.11.1/2011/2024

No.	Jenis yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Usulan RKBMD dan RKPMD Kecamatan Dan Kelurahan THN 2026	2 (Dua) berkas	Disampaikan dengan hormat untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya

a.n. Camat,
Kasubbag Umum, Kepegawaian & Keuangan

Nama Penerima : Halma Nur Rafika, A.Md.Kb.N
NIP : 200004022022012002
Ttd

B.2.7 Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan (SHS) Perangkat Daerah Paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya.

Target indikator kinerja sasaran tambahan 2.7 sebesar 100% dan tidak ada realisasi sehingga capaian kinerjanya adalah 0% dengan predikat Sangat Rendah. Kegagalan pencapaian target kinerja ini disebabkan oleh sebagian besar SHS yang bersumber dari OPD teknis pengampu telah tearkomodir dalam SIPD sehingga Kecamatan Muara Jawa tidak mengajukan usulan SHS. Untuk tahun-tahun kinerja selanjutnya, Pemerintah Kecamatan Muara Jawa wajib berupaya menindaklanjuti target kinerja indikator ini untuk tertib administrasi serta mencegah ketidaktersediaan SHS saat melakukan proses perencanaan dan penganggaran.

B.2.8 Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun.

Mempelajari kegagalan capaian target kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Muara Jawa Tahun 2023 yang terlambat disampaikan, maka untuk tahun 2024 ini Pemerintah Kecamatan Muara Jawa berupaya keras untuk mencapai realisasi target sebesar 100%. Bukti dukung capaian realisasi 100% dapat dilihat pada tangkapan layar dan link untuk mengakses bukti dukung dibawah ini:

https://drive.google.com/drive/folders/1DHDbDAkn1d4hmyQFU7yQ-BgG-lg6_2nv?usp=sharing

B.2.9 Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap tahun.

Target indikator kinerja sasaran tambahan 2.9 sebesar 100% realisasi 100% Dimana Laporan Keuangan Kecamatan Muara Jawa Tahun 2024 dapat disampaikan ke BPKAD Kabupaten Kutal Kartanegara pada Tanggal 24 Januari 2025, sehingga capaian kinerjanya adalah 100% dengan predikat Sangat Tinggi.

Faktor keberhasilan capaian indikator kinerja ini adalah :Ketersediaan Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang batasan waktu penyampaian Laporan Keuangan setiap tahun, ketersediaan data-data komponen Laporan Keuangan baik dari aplikasi SIPD maupun data-data manual yang bersumber dari internal OPD, komitmen para pengelola keuangan di OPD, serta jadwal proses review LK SKPD oleh Inspektorat dan BPK yang harus dipatuhi.

Untuk selanjutnya Pemerintah Kecamatan Muara Jawa wajib lebih tertib dalam pelaksanaan realisasi anggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawabannya agar proses penyusuan dan penyampaian Laporan Keuangan tahunan dapat dioertahankan atau ditingkatkan.

Akses bukti dukung:

https://drive.google.com/file/d/1G-lDts7rfltkJXIYnMFZN0cZuvFyR_Xd/view?usp=sharing

B.2.10 Tingkat Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir bulan Juni dan Semester II akhir bulan oktober setiap tahun.

Target indikator kinerja sasaran tambahan 2.10 sebesar 100% realisasi 50% sehingga capaian indikator kinerja hanya sebesar 50% dengan predikat Rendah. Penyusunan dan Pelaporan SKM dan RTL Semester 1 Tahun 2024 telah dilaksanakan tepat waktu, namun untuk SKM dan RTL Semester 2 Tahun 2024 mengalami keterlambatan penyampaian laporan sehingga capaian kinerja 100% tidak terpenuhi.

Solusi agar hal ini tidak terjadi lagi Pemerintah Kecamatan Muara Jawa wajib lebih tertib dan tepat waktu dalam melaksanakan proses survey kepuasan Masyarakat, penyusunan dan pelaporan hasilnya, agar berimbang antara Nilai Survey Kepuasan Masyarakat yang dihasilkan dengan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporannya.

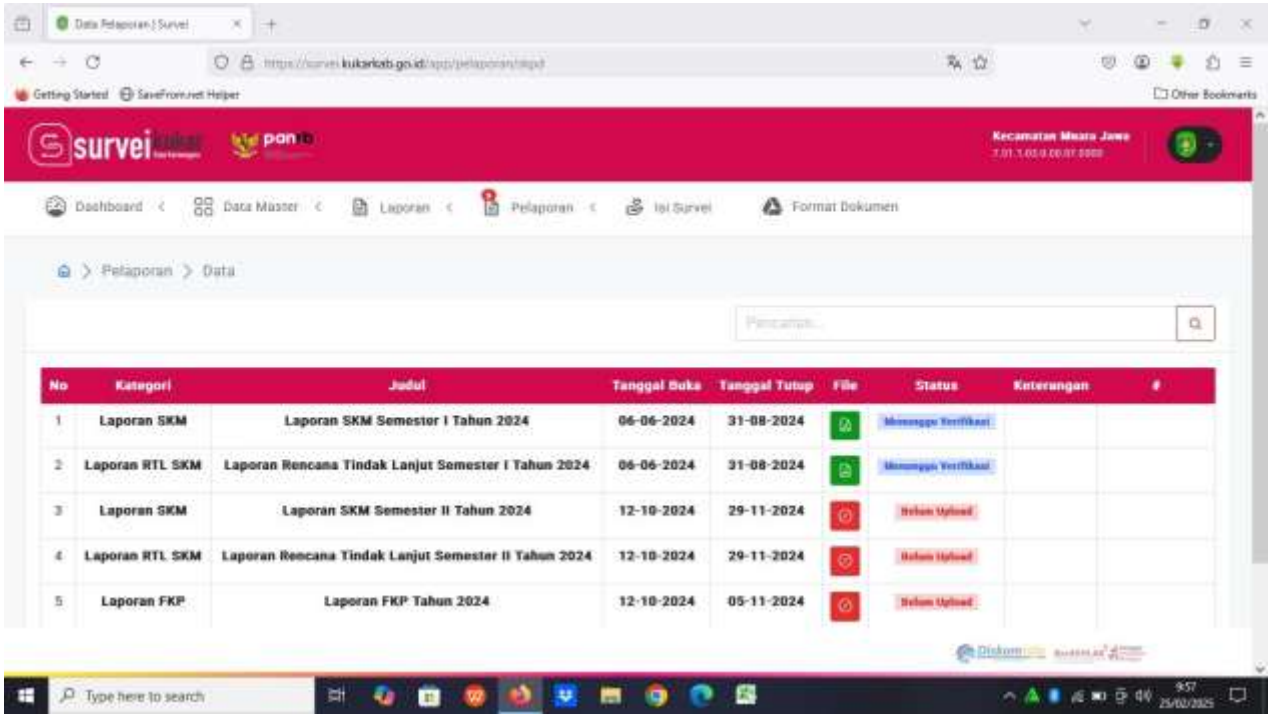

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Semester 1 dan 2 Tahun 2024 beserta Rencana Tindaklanjutnya dapat diakses melalui link sebagai berikut:

https://drive.google.com/file/d/1DmrvGPGfp_K4kZJ08kAXc0u9Zlw4HatX/view?usp=sharing

B.2.11 Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP).

Target indikator kinerja sasaran tambahan 2.11 sebesar 100% realisasi 100% sehingga capaian indikator kinerja tercapai 100% dengan predikat Sangat Tinggi. Untuk selanjutnya Pemerintah Kecamatan Muara Jawa perlu meningkatkan kegiatan-kegiatan Forum Konsultasi Publik untuk mensosialisasikan peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan serta program kerja yang dimiliki oleh Kecamatan Muara Jawa untuk mencapai sasaran perangkat daerah yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan yang efektif, efisien, inovatif, transparan dan akuntabel. Tangkapan layar bukti dukung dan dokumen Bukti dukung dapat diakses melalui link:

https://drive.google.com/file/d/1CpRu_kvrtVxJbrWhwybTLfFNpC7oKRAn/view?usp=sharing

B.2.12 Tindak lanjut hasil temuan administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir.

Pada Tahun 2024 Kecamatan Muara Jawa mendapatkan proses audit dari BPK atas Paket-Paket Pekerjaan Tahun 2024. Dan dari hasil audit tersebut terdapat beberapa tindak lanjut yang harus dilakukan yaitu mengikuti Instruksi Bupati Kutai Kartanegara Nomor P-106/ITDA/700/01/2025 Tanggal 6 Januari 2025 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI berupa Pemeriksaan Kepatuhan Atas Belanja Daerah tahun Anggaran 2024 pada Pemerintah Kabupaten Kutai kartanegara dan Instansi Terkait Lainnya. Beberapa Langkah telah dilakukan berupa:

1. Menerbitkan surat instruksi dari Camat Muara Jawa kepada Ppkom dan PPTK kegiatan untuk lebih cermat dan penuh tanggungjawab dalam melaksanakan dan mengendalikan paket-paket pekerjaan yang emnjadi tanggungjawabnya;
2. Mengisntruksikan kepada pihak rekanan untuk segera melakukan pengembalian kelebihan pembayaran belanja atas beberapa paket yang diaudit.

Namun Langkah-langkah tersebut belum mampu membuat target kinerja sebesar 100% tercapai, karena masih ada beberapa rekanan yang belum melakukan pengembalian kelebihan pembayaran hingga batas akhir tanggal 28 Februari 2025, sehingga Target indikator kinerja sasaran tambahan 2.12 hanya terealisasi 84,86% sehingga capaian indikator kinerja 84,86% dengan predikat Sangat Tinggi. Pemerintah Kecamatan Muara Jawa akan etrus melakukan tindak lanjut atas LHP BPK tersebut dan diharapkan dapat diselesaikan sesegera mungkin di tahun 2025.

Bukti dukung untuk Capaian Indikator B2.12 dapat dilihat melalui tangkapan layar berikut:

NO.	PELAKSANA	TOTAL STS	SUDAH STS	BELUM STS
1	CV AULIA INDAH JAYA	54.357.215,23	54.357.215,23	-
2	CV AULIA INDAH JAYA (BUKIT PELANGI)	11.693.398,78		11.693.398,78
3	CV WILDAN JAYA PERKASA	34.187.109,75		34.187.109,75
4	CV. ALAM CIPTA KARYA	34.023.614,16	34.023.614,16	-
5	CV. AN NUR JAYA	13.792.227,27	13.792.227,27	-
6	CV. AULIA BERKAH NUSANTARA	2.844.840,00		2.844.840,00
7	CV. CIPTA INTERNUSA KONSTRUKSI	13.253.858,49	13.253.858,49	-
8	CV. GEN TIGA	510.133.458,81	466.630.046,82	43.503.411,99
9	CV. HAURAMADANI	1.753.599,38	1.753.599,38	-
10	CV. MAHA KARYA	8.175.500,00	8.175.500,00	-
11	CV. MIFTAH JAYA	36.244.357,53	13817960	22.426.397,53
12	CV. PUTRA TOLIS	24.104.068,00	24.104.068,00	-
13	CV. SARANA USKAR UTAMA	12.716.653,42	12.716.653,42	-
	JUMLAH	**757.279.900,82**	**642.624.742,77**	**114.655.158,05**

NILAI WAJIB STS	**757.279.900,82**
JUMLAH STS s/d 27 FEBRUARI 2025	**642.624.742,77**
PROGRESS STS	**84,86**

Dokumen bukti dukung capaian indikator kinerja B.2.12 dapat diakses melalui link :

https://drive.google.com/file/d/1U3YW-oiN7bKguwcyuODS7jFg90k7De17/view?usp=sharing

B.2.13 Ketepatan waktu penyampaian laporan penilaian mandiri penyelenggaraan SPIP perangkat daerah per 30 Juni tahun berjalan.

Target indikator kinerja sasaran tambahan 2.13 sebesar 100% realisasi 100% sehingga capaian indikator kinerja tercapai 100% dengan predikat Sangat Tinggi. Target waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, pendampingan yang diberikan oleh Sekretariat Daerah dan Inspektorat kabupaten Kutai karatnegara serta komiten Kecamatan Muara Jawa merupakan faktor pendukung keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut. Penyusunan dan penayampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Standar Pengendalian Internal pemerintah (SPIP) telah dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2024. Pemerintah Kecamatan Muara Jawa perlu menjaga kualitas pelaksanaan SPIP agar sasaran perangkat daerah yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan yang efektif, efisien, inovatif, transparan dan akuntabel dapat tercapai. Tangkapan layar bukti dukung dan dokumen Bukti dukung dapat diakses melalui link:

https://drive.google.com/file/d/1CPybYd2-fel_j8ALzoFTi2jdETw2d1pr/view?usp=sharing

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN MUARA JAWA
Jalan Ir.Soekarano Nomor 58 Kelurahan Muara Jawa Ulu
Website : www.muarajawa.id E-mail : kecmuarajawa2020@gmail.com Muara Jawa 75291

Muara Jawa, 24 Juni 2024

Kepada
Yth. Bupati Kab.Kutai Kartanegara
Di -
Tenggarong

SURAT PENGANTAR
Nomor : B.735/CMJ/700/06/2024

No.	Jenis yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Laporan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegritas 2024	1 (Satu) berkas	Dikirim dengan hormat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Camat

MUHAMMAD RAMLI, S.E.,M.M.
Pembina – IV/a
NIP. 197506042000121003

Penerima :
Nama : Agnes Dewi Lia
NIP : 19750430 199802 2 001
Jabatan : Analis Monitoring, Evaluasi & Pelaporan
Tgl terima : 24/6/2024
Tanda tangan :

BerAKHLAK

B.2.14 Internalisasi core values ASN Berahlak.

Target indikator kinerja sasaran tambahan 2.14 sebesar 100% realisasi 100% sehingga capaian indikator kinerja tercapai 100% dengan predikat Sangat Tinggi. Kegiatan-kegiatan dalam rangka internalisasi core values ASN berahlak gencar dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Muara Jawa melalui antara lain:

1. Sosialisasi Core Values ASN BerAKHLAK;
2. Membacakan Core Values ASN BerAKHLAK pada kegiatan Apel Pagi dan Apel Korpri;
3. Penulisan panduan perilaku BerAKHLAK di MediaSosial, poster, x-banner, dan media lainnya;
4. Penggunaan Logo BerAKHLAK dan Tagar BanggaMelayani Bangsa dalam Naskah Surat Dinas, Poster,Latar Virtual, dan Bahan Paparan;
5. Pelatihan/Diklat/Bimtek/Seminar untuk peningkatan Sumber Daya Aparatur Kecamatan dan Kelurahan;
6. Pelaksanaan absen harian dengan alat elektronik;

Kedepannya Pemerintah Kecamatan Muara Jawa perlu terus-menerus melakukan internalisasi Core Values ASN Berahlak demi meningkatkan kulaitas Sumber Daya Aparatur agar sasaran perangkat daerah yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan yang efektif, efisien, inovatif, transparan dan akuntabel dapat tercapai. Tangkapan layar bukti dukung dan dokumen Bukti dukung dapat diakses melalui link:

https://drive.google.com/file/d/1FvEvE7UExfZsq8Xq8VsLZAuhWFVbUmYb/view?usp=sharing

DAFTAR DIKLAT/PELATIHAN/SOSIALISASI TAHUN 2024

NO.	NAMA	NIP	INSTANSI	NAMA KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	JUMLAH JP	PELAKSANA	NOMOR SERTIFIKAT	KETERANGAN
1	NILA IRAWAWATI, S.Mn	197608042003112007	Kantor Camat Muara Jawa	Webinar Pecinta Al-Qur'an	22 Mei 2024	3	BKPSDM Kukar	-	
2	NILA IRAWAWATI, S.Mn	197608042003112007	Kantor Camat Muara Jawa	Pengembangan Kompetensi Manajerial Berbagai Jenis Metode dan Jalur Pengembangan Kompetensi	31 Mei 2024	3	BKPSDM Kukar	P-4895/BKPSDM/PKA/4230/05/2024	
3	NILA IRAWAWATI, S.Mn	197608042003112007	Kantor Camat Muara Jawa	Bimtek Aplikasi Srikandi Tahun 2024	30-31 Mei 2024	16	Diskominfo Kukar	B-072/SETDAKAB/000.5.2/05/2024	
4	NILA IRAWAWATI, S.Mn	197608042003112007	Kantor Camat Muara Jawa	Bimtek penyusunan Renstra dan Renja	23-26 Juli 2024	20	IPN	20011101222	
5	NILA IRAWAWATI, S.Mn	197608042003112007	Kantor Camat Muara Jawa	Bimtek Monitoring dan Evaluasi Renstra	27-30 Agustus 2024	16	BKPSDM Kukar dan LPMP	033/BIMTEK/LPMP/VIII/2024	
6	NILA IRAWAWATI, S.Mn	197608042003112007	Kantor Camat Muara Jawa	Seminar Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	08 Oktober 2024	6	KPK dan BKPSDM Kukar	P-1788/BKPSDM/PKA.4/423.6/10/2024	
7	NILA IRAWAWATI, S.Mn	197608042003112007	Kantor Camat Muara Jawa	Bimbingan Teknis Operator Website PPID	10 Oktober 2024	6	Diskominfo Kukar	P-X/005/800.3.5.3/10/2024/002	
8	NILA IRAWAWATI, S.Mn	197608042003112007	Kantor Camat Muara Jawa	Penyesuai / Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural, Literasi Digital, dan Emerging Skills dengan metode Computer Assisted Competence Test Badan Kepegawaian Negara (CACT BKN)	11 November 2024	4	Badan Kepegawaian Negara	570810-2-1354/CACTBKN/2024	
9	AKMDATUL MUSLIMAH, S.Akun	198808182011012002	Kantor Camat Muara Jawa	Transformasi Kantor/Tempat kerja Menuju Ramah Lingkungan	29 Mei 2024	2	Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta	800.2.4.2/2737	
10	AKMDATUL MUSLIMAH, S.Akun	198808182011012002	Kantor Camat Muara Jawa	Seminar Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	10 Oktober 2024	5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara	P-1742.4/BKPSDM/PKA.3/423.6/10/2024	
11	AKMDATUL MUSLIMAH, S.Akun	198808182011012002	Kantor Camat Muara Jawa	Sharing Session 6 Pengembangan Kompetensi Pendidikan Formal ASN dan Beasiswa Kuker Internal	16 Agustus 2024	3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara	P-1218/BKPSDM/PSDA/423.6/08/2024	

20	MAWARNI	196511022010012013	Kantor Camat Muara Jawa	Sharing Session Disiplin Pegawai Negeri Sipil: Pilar Utama Mewujudkan Layanan Publik yang Prima	14 Juni 2024	5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara	P-5010/BKPSDM/PKA/422.6/06/2024	
21	MAWARNI	196511022010012013	Kantor Camat Muara Jawa	Sharing Session 6 Pengembangan Kompetensi Pendidikan Formal ASN dan Beasiswa Kukar Idaman	16-Agu-24	5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara	P-12419/BKPSDM/PSDA/422.6/08/2024	
22	MUHAMMAD RAMLI, S.E., M.M.	197506042000121003	Kantor Camat Muara Jawa	Pendidikan Dan Pelatihan (DIKLAT) Penjenjangan Kinerja Kabupeten Kutai Kartanegara	10-13 Desember 2024	25	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	63/FISIPOL-UGM/PENIENJANGANKINERJA/XII/2024	
23	NORJANAH,S.Sos	197006142000122004	Kantor Camat Muara Jawa	Rapat Koordinasi Teknis Kepegawaian Tahun 2024 "Mewujudkan ASN Profesional, Unggul dan Bebudaya"	16-17 Mei 2024	8	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara	P-3706/BKPSDM/PKA/422.6/05/2024	
24	NURHAMIDAH	196007142010012017	Kantor Camat Muara Jawa	Sharing Session 56 Dengan Tema : "Kiat Menjadi ASN Berprestasi dan Membangun Network Internasional"	28 Mei 2024	2	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur	000.7.5.6 / 10393 - 2024 / BPSDM-IV	
25	NURHAMIDAH	196007142010012017	Kantor Camat Muara Jawa	Disiplin Pegawai Negeri Sipil: Pilar Utama Mewujudkan Layanan Publik yang Prima	14-Jun-24	5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara	P-5029/BKPSDM/PKA/422.6/06/2024	
26	SURYANI, S.IP	198106172007012010	Kantor Camat Muara Jawa	Sharing Session 56 Dengan Tema : "Kiat Menjadi ASN Berprestasi dan Membangun Network Internasional"	28 Mei 2024	2	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur	000.7.5.6 / 10385 - 2024 / BPSDM-IV	
27	SURYANI, S.IP	198106172007012010	Kantor Camat Muara Jawa	SDS Manajemen Risiko Pada Pemerintah Daerah: Bagaimana Cara Membangun, Mengimplementasikan dan Menilai Pelaksanaannya?	30 Mei 2024	-	Smart ID		
28	SURYANI, S.IP	198106172007012010	Kantor Camat Muara Jawa	Webinar : Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara	7 Mei 2024	5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara	P-3004/BKPSDM/PKA.3/422.6/05/2024	
					JUMLAH	196			

FORMULIR "A"
PERSIAPAN APEL GABUNGAN KORPRI KECAMATAN MUARA JAWA

I. Tanggal, Waktu, Dan Tempat
1. Hari : Kamis
2. Tanggal : 17 Oktober 2024
3. Waktu : 07:15 Wita
4. Tempat : Lapangan Bola Volly Kec. Muara Jawa

II. Petugas Upacara
1. Pembina Apel : Muhammad Ramli, S.E.,M.M. (Camat Muara Jawa)
2. Pemimpin Apel : Rull Hambrani, S.Ag.,M.M.
3. Penera Apel : Edy Kasianto S., S.Pd.
4. Dirigen : Mawarni
5. Naskah UUD 1945 : Anton Arifin, S.Pd.,
6. Naskah Panca Prasetya Korpri : Danny Dharma Wahyu, S.Sos.
7. Naskah Core Values BerAKHlak : Nila Imawati,S.Mn
8. Susunan Acara : Maria Astuti, S.E.
9. Ajudan Pembina Apel : Rull Apriantara
10.Naskah Doa : Suwarnito (KUA)

III. Pasukan Apel
1. Kelompok Apel 1 : Pejabat Pengawas
2. Kelompok Apel 2 : Guru Laki-Laki
3. Kelompok Apel 3 : Guru Perempuan
4. Kelompok Apel 4 : Pegawai Kecamatan dan Kelurahan

IV. Petugas Upacara Lainnya
1. Undangan : Sekretariat Korpri Kec. Muara Jawa
2. Kesehatan : Ka. UPTD Puskesmas Muara Jawa

V. Urutan Acara Upacara
1. Acara Persiapan :
2. Acara Pendahuluan :
3. Acara Pokok :
4. Acara Penutup :
5. Acara Tambahan :

VI. Pakaian
1. Inspektur upacara : Korpri
2. Petugas Upacara : Korpri
3. Peserta Upacara Lainnya : Korpri

VII. Denah Lapangan
1. Lokasi Lapangan Bola Volly : Terlampir

VIII. Urutan Upacara
1. Acara Persiapan
a. Persiapan Pasukan Apel
b. Dankel Memasuki Lapangan
c. Dankel Mengambil Alih Komando
d. Latihan-latihan seperlunya

2. Acara Pendahuluan
a. Laporan Penera Apel kepada Pembina Apel
b. Pembina Apel Itis dilapangan Apel

3. Acara Pokok (sesuai dengan tujuan upacara)
a. Penghormatan kepada Pembina Apel
b. Laporan Pemimpin Apel
c. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
d. Mengheningkan Cipta
e. Pembacaan Teks Pancasila
f. Pembacaan Teks Pembukaan UUD 1945
g. Pembacaan Teks Panca Prasetya Korpri

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Muara Jawa Semester 1 Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya berkat rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Berkala Kecamatan Muara Jawa Semester 1 Bulan Januari sampai dengan Juni Tahun 2024 dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Berkala Kecamatan Muara Jawa Semester 1 Bulan Januari sampai dengan Juni Tahun 2024 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara keseluruhan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Berkala Kecamatan Muara Jawa Semester 1 Bulan Januari sampai dengan Juni Tahun 2024 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD sesuai Renstra tahun 2021-2026 telah dilaksanakan dengan baik.

Meskipun demikian, kami menyadari masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu disempurnakan dan ditingkatkan di masa yang akan datang, sehingga kita dapat mewujudkan visi, misi, dan sasaran yang ingin dicapai melalui program dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan Renstra Pemerintah Kecamatan Muara Jawa. Hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel, serta mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

BerAKHLAK

B.2.15 Ketepatan waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD diterapkan)

Target indikator kinerja sasaran tambahan 2.15 sebesar 100% realisasi 100% sehingga capaian indikator kinerja tercapai 100% dengan predikat Sangat Tinggi. Faktor pendukung pencapaian target kinerja indikator ini adalah Batasan waktu dalam input e-Kinerja serta komitmen dari Pimpinan OPD dan Pejabat Pembina Kepegawaian OPD dalam memberikan pemahaman akan pentingnya penyusunan dan penyampaian SKP.

Pemerintah Kecamatan Muara Jawa wajib menjada kualitas, kuantitas dan ketepatan wakktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja perangkat daerah demi meningkatkan kulaitas Sumber Daya Aparatur agar sasaran perangkat daerah yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan yang efektif, efisien, inovatif, transparan dan akuntabel dapat tercapai. Tangkapan layar bukti dukung dan dokumen Bukti dukung dapat diakses melalui link:

https://drive.google.com/file/d/1qEPP49kLtbHiEI0cpUwdRxr5EhPcVv-u/view?usp=sharing

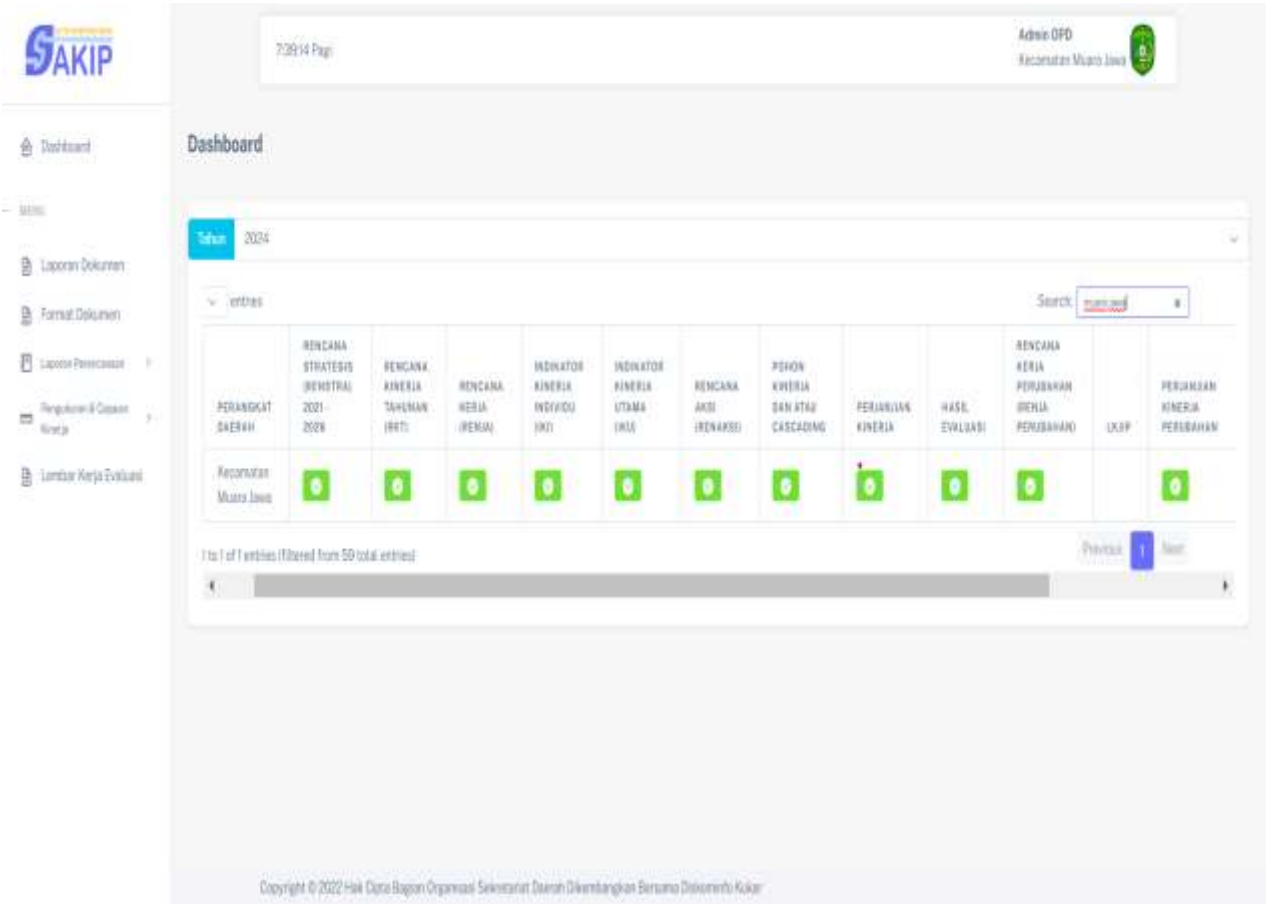

B.2.16 Serapan anggaran berdasarkan SPD yang diterbitkan

Target indikator kinerja sasaran tambahan 2.16 sebesar 70% realisasi 95,9% sehingga capaian indikator kinerja tercapai 137% dengan predikat Sangat Tinggi. Faktor terbesar pencapaian target kinerja indikator ini adalah ketersediaan SPD selama 1 tahun anggaran 2024.

Pemerintah Kecamatan Muara Jawa perlu lebih tertib mengikuti skema anggaran kas dalam pelaksanaan kegiatan dan realisasi belanja agar serapan anggaran tahun-tahun selanjutnya lebih maksimal.. Tangkapan layar bukti dukung dan dokumen Bukti dukung dapat diakses melalui link:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MfNoRAxc6ZmRvWaHNY7liCeoh3WSpO9P/edit?usp=sharing&ouid=117360711041597548412&rtpof=true&sd=true

REGISTER SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH
KECAMATAN MUARA JAWA
TAHUN 2024

NO	TANGGAL	NO SPD	NILAI	KETERANGAN
1	25 JANUARI 2024	64.02/01.0/000001/7.01.1.03.0.00.07.0000/PR1/10/2024	4.279.151.126,00	SURAT PENYEDIAAN DANA KECAMATAN MUARA JAWA BULAN 1 TA 2024
2	25 JANUARI 2024	64.02/01.0/000002/7.01.1.03.0.00.07.0000/PR1/10/2024	8.036.882.118,00	SURAT PENYEDIAAN DANA KECAMATAN MUARA JAWA BULAN 2 TA 2024
3	5 MARET 2024	64.02/01.0/000003/7.01.1.03.0.00.07.0000/PR1/10/2024	6.651.735.303,00	SURAT PENYEDIAAN DANA KECAMATAN MUARA JAWA BULAN 3 TA 2024
4	1 APRIL 2024	64.02/01.0/000004/7.01.1.03.0.00.07.0000/PR1/10/2024	7.207.087.039,00	SURAT PENYEDIAAN DANA KECAMATAN MUARA JAWA BULAN 4 TA 2024
5	27 MEI 2024	64.02/01.0/000005/7.01.1.03.0.00.07.0000/PR1/10/2024	7.242.017.779,00	SURAT PENYEDIAAN DANA KECAMATAN MUARA JAWA BULAN 5 TA 2024
6	21 JUNI 2024	64.02/01.0/000006/7.01.1.03.0.00.07.0000/PR1/10/2024	11.668.379.866,00	SURAT PENYEDIAAN DANA KECAMATAN MUARA JAWA BULAN 6 TA 2024
7	1 JULI 2024	64.02/01.0/000007/7.01.1.03.0.00.07.0000/PR1/10/2024	5.761.971.580,00	SURAT PENYEDIAAN DANA KECAMATAN MUARA JAWA BULAN 7 TA 2024
8	20 AGUSTUS 2024	64.02/01.0/000008/7.01.1.03.0.00.07.0000/PR1/10/2024	3.867.231.566,00	SURAT PENYEDIAAN DANA KECAMATAN MUARA JAWA BULAN 8 TA 2024
9	2 SEPTEMBER 2024	64.02/01.0/000009/7.01.1.03.0.00.07.0000/PR1/10/2024	7.294.260.893,00	SURAT PENYEDIAAN DANA KECAMATAN MUARA JAWA BULAN 9 TA 2024
10	28 OKTOBER 2024	64.02/01.0/000010/7.01.1.03.0.00.07.0000/PR1/10/2024	25.567.189.258,00	SURAT PENYEDIAAN DANA KECAMATAN MUARA JAWA BULAN 10 TA 2024
11	1 NOPEMBER 2024	64.02/01.0/000011/7.01.1.03.0.00.07.0000/PR1/10/2024	7.160.959.122,00	SURAT PENYEDIAAN DANA KECAMATAN MUARA JAWA BULAN 11 TA 2024
12	2 DESEMBER 2024	64.02/01.0/000012/7.01.1.03.0.00.07.0000/PR1/12/2024	2.391.365.368,00	SURAT PENYEDIAAN DANA KECAMATAN MUARA JAWA BULAN 12 TA 2024
JUMLAH			97.128.231.018,00	

TOTAL SPD TERBIT	97.128.231.018,00
TOTAL REALISASI BELANJA	93.149.572.702,00
PROSENTASE REALISASI BELANJA	95,90
TARGET INDIKATOR KINERJA	70%
CAPAIAN REALISASI KINERJA	137,01

Muara Jawa, 31 Desember 2024
PENGGUNA ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN MUARA JAWA

MUHAMMAD RAMLI, SE.,M.M
NIP. 197506042000121003

B.2.17 Ketersediaan dokumen Manajemen risiko pada Perangkat Daerah per Triwulan

Target indikator kinerja sasaran tambahan 2.17 sebesar 100% realisasi 100% sehingga capaian indikator kinerja tercapai 100% dengan predikat Sangat Tinggi. Faktor terbesar pencapaian target kinerja indikator ini adalah monitoring yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Sekretariat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara, serta komitmen dari Camat Kecamatan Muara Jawa beserta seluruh perangkat penganggungjawab pengelolaan risiko untuk secara berkala dan tepak waktu menyampaikan Laporan Unit Pengelola Risiko.

Pemerintah Kecamatan Muara Jawa perlu lebih tertib dalam menyusun dan menyampaikan Laporan UPR serta meningkatkan mutu dari laporan tersebut. Tangkapan layar bukti dukung dan dokumen Bukti dukung dapat diakses melalui link: https://drive.google.com/drive/folders/1JA3A567L6_hbVDIEwWhYYH3YfYW1bOtX?usp=sharing

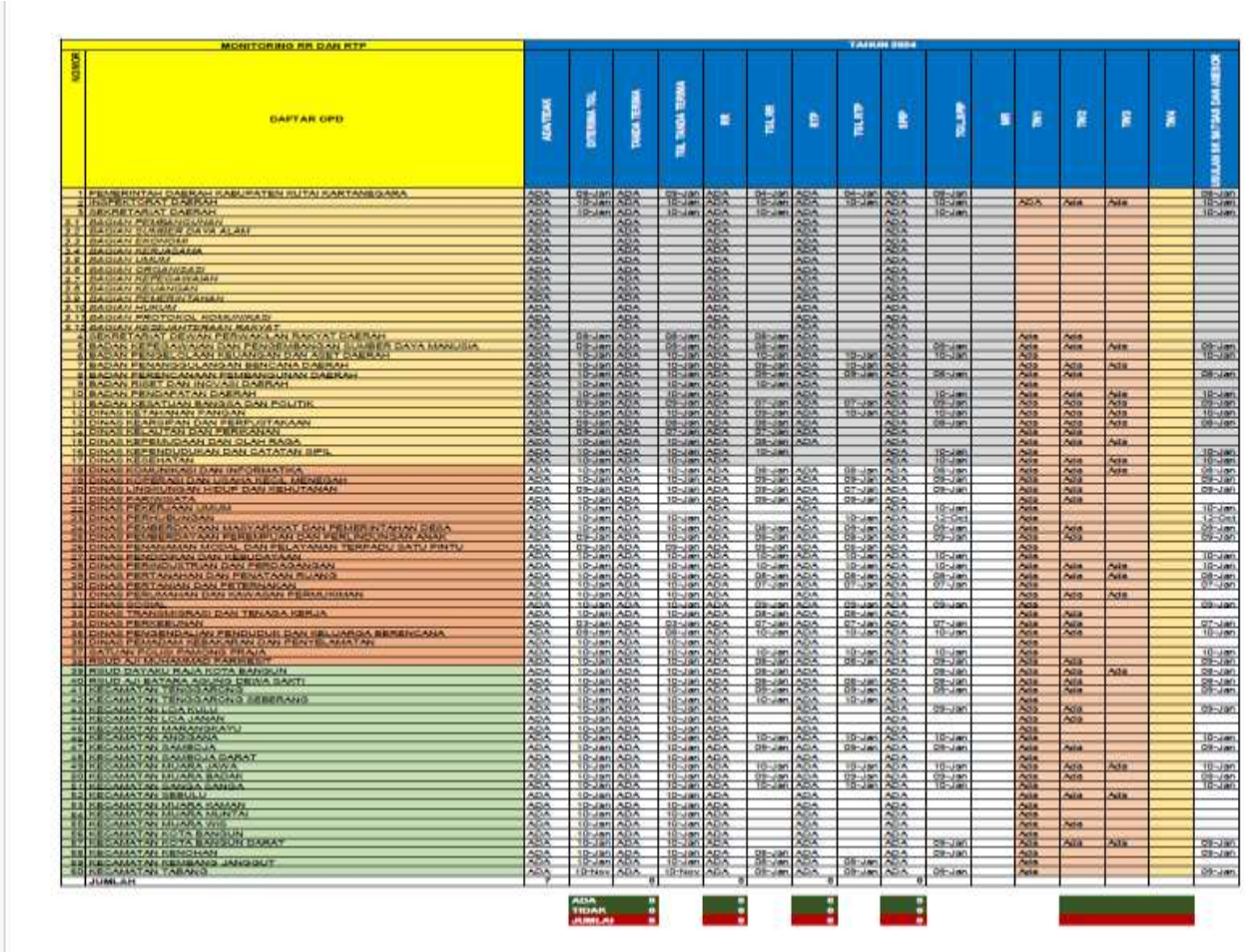

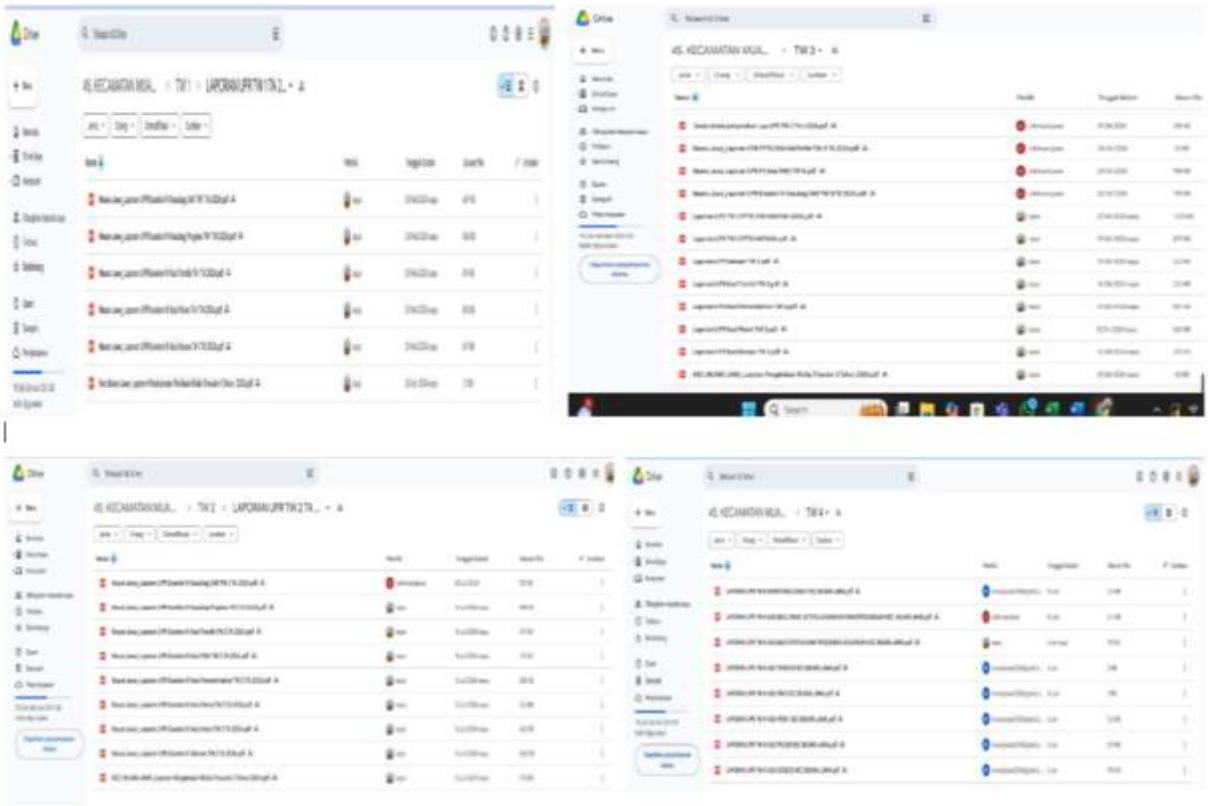

B.2.18 Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah

Target indikator kinerja sasaran tambahan 2.18 sebesar 100% realisasi 100% sehingga capaian indikator kinerja tercapai 100% dengan predikat Sangat Tinggi. Faktor terbesar pencapaian target kinerja indikator ini adalah monitoring yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Sekretariat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara, serta komitmen dan upaya dari Camat Kecamatan Muara Jawa beserta seluruh aparatur untuk melaksanakan Standar Pengendalian Internal Pemerintah.

Pemerintah Kecamatan Muara Jawa perlu lebih banyak melakukan sosialisasi dan pembinaan, monitoring, serta evaluasi atas pelaksanaan SPIP. Tangkapan layar bukti dukung dan dokumen Bukti dukung dapat diakses melalui link: https://drive.google.com/file/d/1UCVNdhUdgu0fvSBlqXKRRi_y7iw_cWqU/view?usp=sharing

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN MUARA JAWA
Jalan Ir. Soekarno No. 58 Kel. Muara Jawa Ulu Telepon +62541692000
website www.muarajawa.id email kecamatanjawa2020@gmail.com Kodepos 75261

Muara Jawa, 21 Juni 2024

Nomor : P.729/CMJ/700/06/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2024==========,

Kepada
Yth. Bupati Kutai Kartanegara
di -
Tenggarong

Dengan ini, kami sampaikan Hasil Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi Tahun Periode penilaian 1 Juli 2023 sampai dengan 30 Juni 2024 pada **Kecamatan Muara Jawa** dengan uraian sebagai berikut:

A. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan hasil

Pelaksanaan Penilaian Mandiri (PM) SPIP Terintegrasi Tahun 2024 pada Kecamatan Muara Jawa Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level "terkelola dan terukur" pada tingkat level 4 (empat) dari 5 (lima) tingkatan maturitas SPIP yakni "rintisan/berkembang/terdefinisi/terkelola dan terukur/optimum. Lebih lanjut, hasil penilaian terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menunjukkan kondisi sebagai berikut:

NO	Komponen Penilaian	Level	Skor
1.	Penetapan Tujuan	Optimum	6.000
2.	Struktur dan Proses	Terdefinisi	3.093
3.	Pencapaian Tujuan	Terdefinisi	3.000

1

	Penyelenggaraan SPIP		
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Terkelola dan Terukur	4.098
	- MRI	Risk Managed	4.091
	- IEPN	Terdefinisi	3.000

Keterangan: Dilai sesuai capaian

Dengan tingkat maturitas "terkelola dan terukur", maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif, namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi, Sehingga Kecamatan Muara Jawa telah berada pada level 4 (terkelola dan Terukur)

2. Saran Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP Kecamatan Muara Jawa, maka hal yang perlu diperbaiki secara umum pada tingkat "terkelola dan Terukur" adalah perlu melakukan evaluasi secara berkala atas efektivitas prosedur pengendalian.

B. URAIAN PENILAIAN

1. Dasar Penilaian

Dasar hukum penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

1) Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, di mana untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib menyelenggarakan SPIP dalam rangka memberi keyakinan memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;

2

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN MUARA JAWA
Jalan Ir.Soekarno Nomor 58 Kelurahan Muara Jawa Ulu
Website: www.muarajawa.id E-mail: kecamatanjawa2020@gmail.com Muara Jawa 75261

Muara Jawa, 24 Juni 2024

Kepada
Yth. Bupati Kab.Kutai Kartanegara
di -
Tenggarong

SURAT PENGANTAR
Nomor : P.729/CMJ/700/06/2024

No.	Jenis yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi 2024	1 (Satu) berkas	Dikirim dengan normal untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana maksimya

Camat

MUHAMMAD RAMLI, S.E.,M.M.
Pembina – IVa
NIP. 197506042000121003

Penerima :
Nama : Agnes Dew Lut
NIP : 197504[illegible]
Jabatan : Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Tgl terima : 24/6/2024
Tanda tangan :

B.2.19 Nilai Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah

Target indikator kinerja sasaran tambahan 2.19 sebesar 100% realisasi 72,01% sehingga capaian indikator kinerja tercapai 72,01% dengan predikat Sedang. Beberapa faktor pendukung pencapaian target kinerja diantara lain adalah Kecamatan Muara Jawa telah menggunakan aplikasi Srikandi dalam penciptaan arsip, ketersediaan saran dan prasarana pendukung. Perlu pembenahan-pembenahan terhadap tata kelola arsip Kecamatan Myara Jawa sesuai dengan rekomndasi dari tim penilai yang dapat dilihat melalui link https://drive.google.com/file/d/1byTPbZ5dmchp-UYemppPtZ4_hj4UTOR5/view?usp=sharing Tangkapan layar atas Hasil Pengawasan Kearsipan Internal tahun 2024 yang diterbitkan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai kartanegara Nomor B-2/P3A.DIARPUS/000.5.15.1/12/2024 Tanggal 16 Desember 2024 terlihat dibawah ini.

44.	Kantor Kecamatan Muara Jawa	72,01	Sangat Baik

B.2.20 Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Target indikator kinerja sasaran tambahan 2.20 sebesar 100%. Namun berdasarkan Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah yang dilakukan oleh Inpsektorat Kabuapten Kutai Kartanegara menunjukan realisasi Kecamatan Muara Jawa yang sangat rendah yaitu 49,32% sehingga capaian indikator kinerja tercapai 49,32%. Faktor penyebab rendahnya capaian indikator ini berupa Sistem dan Tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan, manajemen kinerja belum terimplementasi dengan baik, penyampaian LKJIP Tahun 2023 yang tidak tepat waktu yang disebabkan oleh kesulitan mengumpulkan bukti dukung kinerja.

Hal ini menjadi pelajaran besar bagi Kecamatan Muara Jawa untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh. Langkah-langkah yang perlu diambil diantaranya berupa : Perbaikan dalam perencanaan,pelaksanaan,pengukuran,pelaporan dan evaluasi Kinerja sesuai Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2024 serta upaya penyampaian LKJIP Tahun 2024 tepat waktu yaitu paling lambat akhir Februari 2025 untuk perbaikan implementasi AKIP Tahun 2025.Tangkapan layar bukti dukung dan dokumen Bukti dukung dapat diakses melalui link:
https://drive.google.com/file/d/10jcjxtdq1YzF5XS66RntWh4d5e1t_5CR/view?usp=sharing

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
INSPEKTORAT DAERAH

Tenggarong, 24 Desember 2024

Yth. Camat Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara
di–
Tempat

SURAT PENGANTAR
Nomor : B- 372 /ITDA/SET.II/700/ 12 /2024

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor LHP : B-380/ITDA/IP.II/700.1/12/2024 Tanggal : 16 Desember 2024	1 (Satu) Berkas	Untuk Di Tindak Lanjuti Sebagai Mana Mestinya

An. Inspektur Daerah,
Sekretaris
u.b.
Sub Koordinator Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Herlina Widaningsih, SE., MM
Pembina
NIP. 197301081994022002

APIP Mengawal Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
INSPEKTORAT DAERAH

LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA KECAMATAN MUARA JAWA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2024

NOMOR : B-380/ITDA/IP.II/700.1/12/2024
TANGGAL : 16 DESEMBER 2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah dan khususnya untuk memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP, mendal tingkat implementasi SAKIP, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP, dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 diperoleh nilai 49,32 dengan kategori C (Kurang). Kategori "Kurang" menginterpretasikan bahwa sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.

B.2.21 Prestasi Inovasi Perangkat Daerah

Target indikator kinerja sasaran tambahan 2.21 sebesar 100% degan realisasi sangat 100% sehingga capaian indikator kinerja sangat tinggi sebesar 100%. Faktor keberhasilan adalah keikutsertaan Kecamatan Muara Jawa dalam Lomba Inovasi Tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara dengan judul Inovasi "SIMBOL PERMAISURI".

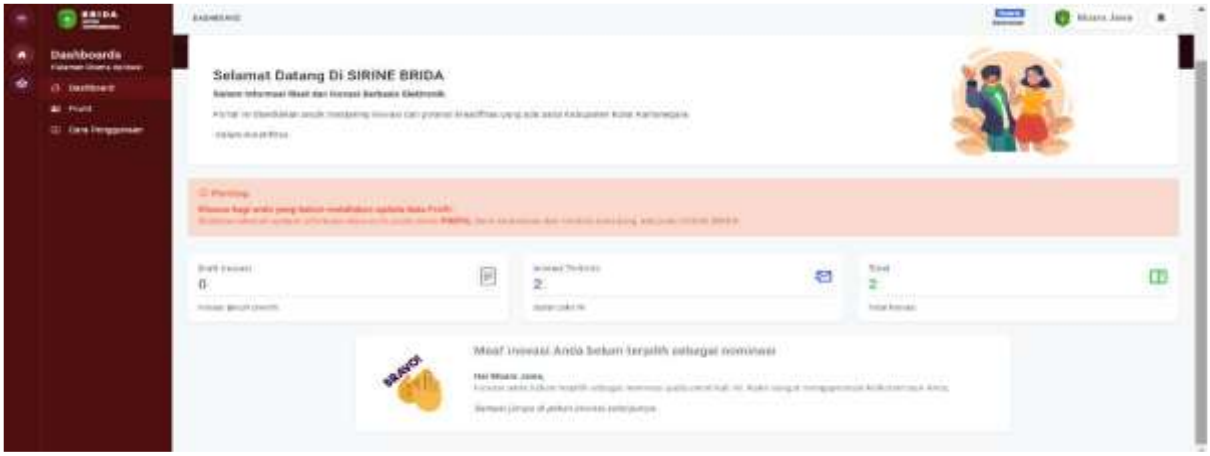

Penjelasan selengkapnya mengenai Inovasi Kecamatan Muara Jawa "SIMBOL PERMAISURI" dapat diakses dalam link:
https://drive.google.com/drive/folders/1zg3SxObERV1Cz2IwhwGsPcMG_edvA-cb?usp=sharing

B.2.22 Tindak lanjut pengaduan SP4N Lapor

Target indikator kinerja sasaran tambahan 2.22 sebesar 100% degan realisasi 100% sehingga capaian indikator kinerja sangat tinggi sebesar 100%. Aplikasi SP4AN LAPOR Kecamatan Muara Jawa aktif setiap saat namun tidak ada laporan / pengaduan menggunakan aplikasi tersebut. Kecamatan Muara Jawa perlu melakukan sosialisasi tentang aplikasi ini. Bukti dukung dapat dilihat melalui link:
https://drive.google.com/file/d/1Vn14pn5PTES2mE6SMfAnjYuY3nIwzMg-/view?usp=sharing

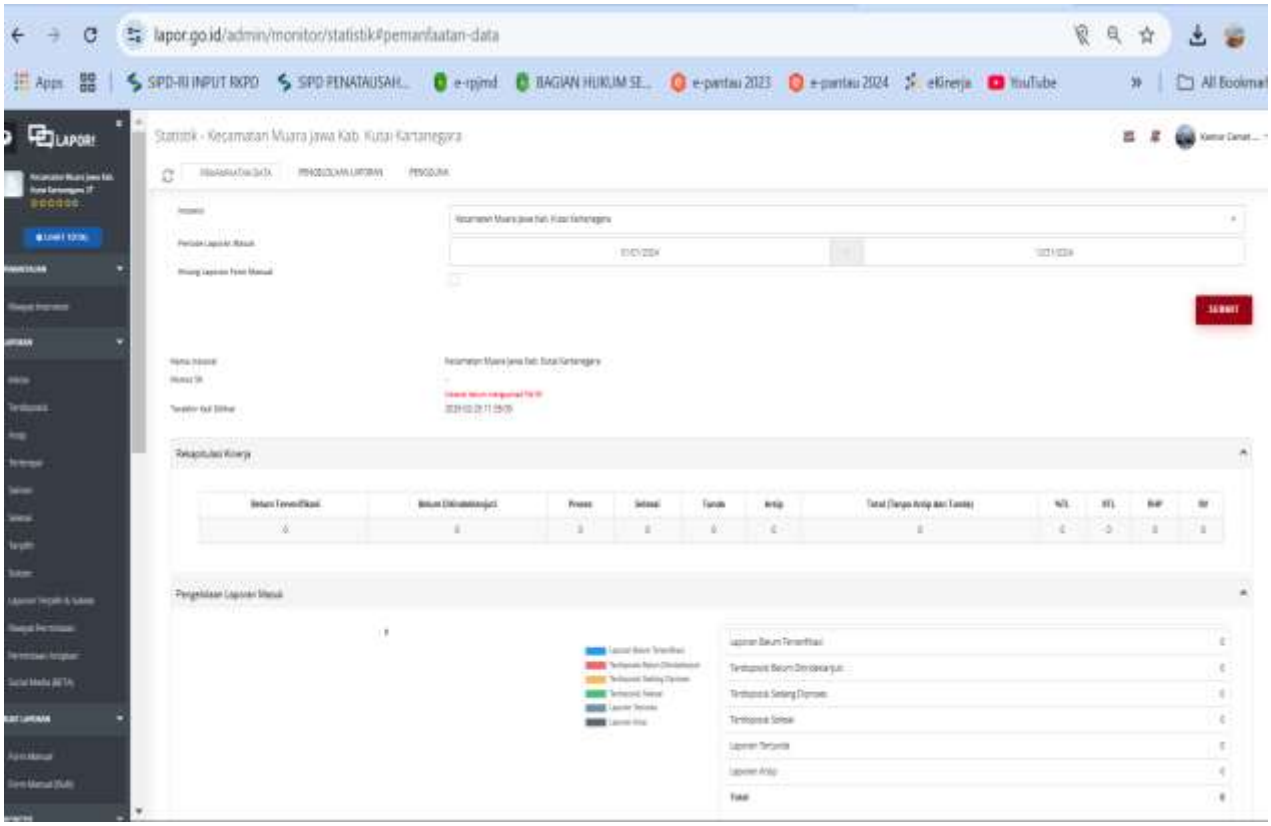

B.2.23 Pengamanan Aset Tanah

Target indikator kinerja sasaran tambahan 2.23 sebesar 70% degan realisasi 50% sehingga capaian indikator kinerja sebesar 66,67% dengan kategori Sedang. Target kinerja tidak tercapai sebab pada tahun 2024 Kecamatan Muara Jawa hanya melakukan pengamanan aset tanah berupa pemasangan plang/papan nama di atas 34 bidang tanah. Untuk pemasangan plang/papan nama mendapatkan nilai sebesar 50%. Dokumen pendukung Indikator Pengamanan Aset Tanah dapat diakses melalui link :

https://drive.google.com/drive/folders/1UT58fR2pnpJWIQupFb9Z-kttQ6Lh-moO?usp=drive_link

KECAMATAN MUARA JAWA

REKAP PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAMANAN ASET TAHUN 2024

No	UPB	Nama Barang	Nomor: Kode Barang	Nomor: Register	Luas (M2)	Tgl. Perolehan	Letak / Alamat	Status Tanah: Hak	Status Tanah: Sertifikat: Tanggal	Status Tanah: Sertifikat: Nomor	Penggunaan	Asal Usul	Harga	Keterangan	STATUS	JENIS DOKUMEN
1	KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.1.1.4.1	1	1.200	27/12/2013	Jl.Teluk Ladang Handil 3 RT.17 Kel.Muara Jawa Pesisir Kec.muara Jawa					Pembelian	276.872.000,00	Berita Acara Pembayaran No. 1658/590/4.Pm-Pm/XII/2013. Pengadaan Tanah untuk pembangunan Sarana Perkantoran Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Wilayah Pesisir Keperluan Pembangunan Kantor Lurah Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa.	BELUM SERTIFIKAT	SKPT
2	KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.1.1.4.1	2	-	20/12/2013	Kantor Lurah Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa					Pembelian	39.320.000,00	Penyediaan Jasa Penilai Harga Tanah Keperluan Pembangunan Kantor Lurah Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa, pada KJPP WAHYU, YASIR, PURNAMASARI dan REKAN, No SPT: 1642.2/590/4.Pm-Pm/XII/2013, SP2D NO : 18102/LS/2013	BELUM SERTIFIKAT	SKPT
3	KECAMATAN MUARA JAWA	Tanah Untuk Bangunan Sarana Olah Raga Tertutup	1.3.1.1.1.5.1	1	4.000	23/12/2009	muara jawa	Hak Pakai			sarana olahraga	Pembelian	1.601.299.395,00	sarana olahraga (stadion mini) muara jawa	BELUM SERTIFIKAT	
4	KECAMATAN MUARA JAWA	Tanah Bangunan Pasar	1.3.1.1.1.2.1	1	3.000	19/12/2005	Kec Muara Jawa	Hak Pakai			Pasar	Pembelian	150.000.000,00	Tidak Dikelola Oleh Disperindag Lagi	BELUM SERTIFIKAT	
5	KECAMATAN MUARA JAWA	tanah kampung lainnya (dst)	1.3.1.1.3.17.2	2	900	19/10/2005	Jl. Ir. Soekarno (Tanah Kapolsek) Penilaian PT. Hutama	Hak Pakai				Pembelian	33.000.000,00	Pengadaan Tanah Kapolsek Kec Muara Jawa Tahun 2005 (Data dari Aset) PT. HUTAMA	SERTIFIKAT	
6	KECAMATAN MUARA JAWA	tanah kampung lainnya (dst)	1.3.1.1.3.17.2	3	750	19/10/2005	Jl. Ir. Soekarno Kel. Muara Jawa Ulu (Penilaian PT. Hutama)					Pembelian	23.100.000,00	Pembelian Tanah TK Dharma Wanita Tahun 2005 (Penilaian Hutama)	SERTIFIKAT	
7	KECAMATAN MUARA JAWA	tanah kampung lainnya (dst)	1.3.1.1.3.17.2	4	9.000	13/10/2005	Kecamatan Muara Jawa (Penilaian PT. Hutama)					Pembelian	337.500.000,00	Pembelian Tanah Ex. Perum PU pengadaan tahun 2005 (Penilaian PT. Hutama)	SERTIFIKAT	
8	KECAMATAN MUARA JAWA	tanah kampung lainnya (dst)	1.3.1.1.3.17.2	5	220	19/10/2005	Kecamatan Muara Jawa (Penilaian PT. Hutama)	Hak Pakai				Pembelian	3.300.000,00	Tanah Gardu PDAM Pengadaan Tahun 2005 (Penilaian PT Hutama)	SERTIFIKAT	
9	KECAMATAN MUARA JAWA	tanah kampung lainnya (dst)	1.3.1.1.3.17.2	6	100	19/10/2005	Kecamatan Muara Jawa (Penilaian PT. Hutama)	Hak Pakai				Pembelian	6.000.000,00	Tanah Gardu PLN Pengadaan Tahun 2005 (Penilaian PT. Hutama)	BELUM SERTIFIKAT	
10	KECAMATAN MUARA JAWA	tanah kampung lainnya (dst)	1.3.1.1.3.17.2	7	300	19/10/2005	Kecamatan Muara Jawa (Penilaian PT. Hutama)	Hak Pakai				Pembelian	11.300.000,00	Tanah Perum PP Pengadaan Tahun 2005 (Penilaian PT. Hutama)	SERTIFIKAT	

KECAMATAN MUARA JAWA

REKAP PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAMANAN ASET TAHUN 2024

11	KECAMATAN MUARA JAWA	tanah kampung lainnya (dst)	1.3.1.1.3.17.2	8	200	19/10/2005	Kecamatan Muara Jawa (Penilaian PT. Hutama)	Hak Pakai				Pembelian	7.000.000,00	Pengadaan Tanah Kantor Kelurahan Muara Jawa Tahun 2005 (Penilaian PT. Hutama)	BELUM SERTIFIKAT	
12	KECAMATAN MUARA JAWA	tanah kampung lainnya (dst)	1.3.1.1.3.17.2	9	9.000	19/10/2005	Jl. Ir. Soekarno Kel. Muara Jawa Ulu Kec. Muara Jawa (Penilaian PT. Hutama)	Hak Pakai				Pembelian	225.000.000,00	Pengadaan Tanah Kantor Koramil Tahun 2005 (Penilaian PT. Hutama)	SERTIFIKAT	
13	KECAMATAN MUARA JAWA	tanah kampung lainnya (dst)	1.3.1.1.3.17.2	10	540	09/10/2005	Jl. Peras Dondang Kec. Muara Jawa (Penilaian PT. Hutama)	Hak Pakai				Pembelian	37.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor Kecamatan Muara Jawa Tahun 2005 (Penilaian PT. Hutama)	SERTIFIKAT	
14	KECAMATAN MUARA JAWA	tanah kampung lainnya (dst)	1.3.1.1.3.17.2	11	350	09/10/2005	Jl. Ir. Soekarno Kel. Muara Jawa Ulu Kec. Muara Jawa (Penilaian PT. Hutama)	Hak Pakai				Pembelian	28.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor BPU Kel. Muara Jawa Ulu Kec. Muara Jawa Pengadaan Tahun 2005 (Penilaian PT. Hutama)	SERTIFIKAT	
15	KECAMATAN MUARA JAWA	tanah kampung lainnya (dst)	1.3.1.1.3.17.2	12	1.120	09/10/2005	Jl. Peras Dondang Kel. Dondang Kec. Muara Jawa (Penilaian PT. Hutama)	Hak Pakai				Pembelian	56.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor Perumahan Pegawai Kec. Muara Jawa Pengadaan Tahun 2005 (Penilaian PT. Hutama)	SERTIFIKAT	
16	KECAMATAN MUARA JAWA	tanah kampung lainnya (dst)	1.3.1.1.3.17.2	13	20.700	09/10/2005	Kel. Muara Kembang Kec. Muara Jawa (Penilaian PT. Hutama)	Hak Pakai				Pembelian	2.017.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor Lapangan Sepak Bola Mini Kel. Muara Kembang Kec. Muara Jawa Pengadaan Tahun 2005 (Penilaian PT. Hutama)	BELUM SERTIFIKAT	
17	KECAMATAN MUARA JAWA	tanah kampung lainnya (dst)	1.3.1.1.3.17.2	14	60.000	09/10/2005	Jl. Peras Dondang Kec. Muara Jawa (Penilaian PT. Hutama)	Hak Pakai				Pembelian	3.000.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor Tanah Pertukaran dengan PT. Total Kec. Muara Jawa Tahun 2005 (Penilaian PT. Hutama)	BELUM SERTIFIKAT	
18	KECAMATAN MUARA JAWA	tanah kampung lainnya (dst)	1.3.1.1.3.17.2	15	330	09/10/2005	Jl. Ir. Soekarno Kel. Muara Jawa Ulu Kec. Muara Jawa (Penilaian PT. Hutama)	Hak Pakai				Pembelian	16.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor Rumah Dinas Pegawai Kecamatan Kel. Muara Jawa Ulu Kec. Muara Jawa Pengadaan Tahun 2005 (Penilaian PT. Hutama)	SERTIFIKAT	
19	KECAMATAN MUARA JAWA	Tanah Kaveling (dst)	1.3.1.1.1.1.12	1	229	11/12/2012	Kelurahan Tama Pole Kec muara Jawa	Hak Pakai				Hibah	7.200.000,00	Belanja modal pengadaan sarana Kesehatan Puskesmas : Pengadaan Tanah Bangunan PUSBAN RT 1 Kel Tama Pole Kec Muara Jawa Tahun 2012	BELUM SERTIFIKAT	
20	KECAMATAN MUARA JAWA	Tanah Bangunan Terminal Darat	1.3.1.1.1.2.7	1	1.100	19/10/2005	Handil II Kel. Muara Jawa Ulu Kec. Muara Jawa (Penilaian PT. Hutama)	Hak Pakai				Pembelian	21.000.000,00	Pembelian Tanah Terminal Taxi Pengadaan tahun 2005 (Penilaian PT. Hutama)	BELUM SERTIFIKAT	

KECAMATAN MUARA JAWA

REKAP PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAMANAN ASET TAHUN 2024

21	KECAMATAN MUARA JAWA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.1.1.4.1	1	300	10/10/2005	Jl. Ir. Soekarno Kel. Muara Jawa Ulu Kec. Muara Jawa (Penilaian PT. Hutama)	Hak Pakai				Penilaian	11.300.000,00	Pengadaan Tanah Kantor Polisi Khusus Tahun 2005 (Penilaian PT Hutama)	SERTIFIKAT	
22	KECAMATAN MUARA JAWA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1.3.1.1.1.4.2	1	3.141	24/12/2012	Kelurahan Tama Pole Kec.Muara Jawa	Hak Pakai				Hibah	43.110.000,00	Belanja Modal pengadaan tanah Sarana Pendidikan sekolah Dasar ; Pengadaan tanah bangunan SD 010 Kel.Tama Pole Kec.Muara Jawa Tahun 2012	BELUM SERTIFIKAT	
23	KECAMATAN MUARA JAWA	Tanah Untuk Bangunan Ibadah Lainnya	1.3.1.1.1.6.7	1	300	15/10/2005	Kecamatan Muara Jawa (Penilaian PT. Hutama)	Hak Pakai	10/10/2005			Penilaian	11.000.000,00	Pengadaan Tanah Rumah Ibadah tahun 2005 (Penilaian PT Hutama)	SERTIFIKAT	
24	KECAMATAN MUARA JAWA	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	1.3.1.1.1.4.28	3	200	28/10/2009	Kecamatan Muara Jawa (Penilaian PT. Hutama)	Hak Pakai				Penilaian	7.000.000,00	Pengadaan Tanah Tempat Kerja Kantor PLN tahun 2005 (Penilaian PT. Hutama)	SERTIFIKAT	
25	KECAMATAN MUARA JAWA	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	1.3.1.1.1.4.28	1	511	10/10/2005	Jl. Ir. Soekarno Kel. Muara Jawa Ulu Kec. Muara Jawa (Penilaian PT. Hutama)	Hak Pakai				Penilaian	19.200.000,00	Pengadaan Tanah Kantor Pos & Giro Tahun 2005 (Penilaian PT. Hutama)	SERTIFIKAT	
26	KECAMATAN MUARA JAWA	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	1.3.1.1.1.4.28	1	54	10/10/2005	Jl. Ir. Soekarno Kel. Muara Jawa Ulu Kec. Muara Jawa (Penilaian PT. Hutama)	Hak Pakai				Penilaian	2.000.000,00	Pengadaan Tanah Rumah Staf KUA tahun 2005 (Penilaian PT Hutama)	SERTIFIKAT	
27	KECAMATAN MUARA JAWA	Tanah Lapangan Sepak Bola	1.3.1.1.3.1.5	1	4.700	24/12/2012	Kelurahan Tama Pole Kec.Muara Jawa	Hak Pakai				Hibah	87.700.000,00	Belanja Modal pengadaan tanah Sarana Stadion Olah Raga ; Pengadaan Tanah Lapangan Bola Kel.Tama Pole (Tahun 2012) Kec.Muara Jawa	BELUM SERTIFIKAT	
28	KELURAHAN MUARA JAWA ILIR	Tanah Lapangan Sepak Bola	1.3.1.1.3.1.5	1	-	20/10/2020	Jl. Sukarelawan Rt. 08 Kel Muara Jawa Ilir					Penilaian	87.405.000,00	Pengukuhan Lapangan Sepak Bola Handil II	BELUM SERTIFIKAT	
29	KELURAHAN MUARA JAWA ILIR	tanah kampung lainnya (dst)	1.3.1.1.3.17.2	1	13.040	01/01/2012	Jalan Mamadinata Handil II RT 03 Kelurahan Muara Jawa Ilir	Hak Pakai	01/01/2012	593.2/23/1001/1998	Kebun Desa	Penilaian	250.000,00	Temuan Aset Baru Hasil Inventarisasi	BELUM SERTIFIKAT	
30	KELURAHAN MUARA JAWA ILIR	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.1.1.4.1	1	3.500	01/01/2012	Jalan Mesjid Hatta Handil II RT 06 Kelurahan Muara Jawa Ilir	Hak Pakai	01/01/2012	593.2/27/1001/1998	Untuk Pembangunan Kantor Kelurahan	Penilaian	1.750.000,00	Temuan Aset Baru Hasil Inventarisasi	BELUM SERTIFIKAT	
31	KELURAHAN MUARA JAWA ILIR	Tanah Untuk Bangunan Ibadah Lainnya	1.3.1.1.1.6.7	1	300	11/04/2009	Jl. Pelita RT.8 Handil II Kel. Muara Jawa Ilir	Hak Pakai	11/04/2009	013	Tanah Langgar Nurul Hikmah	Hibah	15.079.000,00	Wakaf dari Wagimin	BELUM SERTIFIKAT	

KECAMATAN MUARA JAWA

REKAP PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAMANAN ASET TAHUN 2024

32	KELURAHAN MUARA JAWA ILIR	Tanah Bangunan Puskesmas/Pos yandu	1.3.1.1.1.4.8	1	375	26/11/2008	Jl. Pelita Handil II RT 4 Kel. Muara Jawa Ilir	Hak Pakai	26/11/2008	593.2/130/1001/2008	Untuk Bangunan PUSBAN	Hibah	18.125.000,00	Hibah dari Sdr. Siti Marhamah Kepada Kelurahan	BELUM SERTIFIKAT	
33	KELURAHAN MUARA JAWA ILIR	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1.3.1.1.2.2.2	1	340	04/11/2009	Jl. Sukarelawan Gg.Akasia RT.8 Handil II Kel. Muara Jawa Ilir	Hak Pakai	04/11/2009	593.2/03/1001/2009	Majelis Ta'lim Wadzikir Miftahul Ulum	Hibah	18.000.000,00	Wakaf dari Ny. Arbayah dan Alat Majid	BELUM SERTIFIKAT	
34	KELURAHAN MUARA KEMBANG	Tanah Lapangan Sepak Bola	1.3.1.1.3.1.5	1	80.700	19/10/2005	rt 5 kelurahan muara kembang		19/10/2005				2.017.500.000,00	hasil penilaian tibali pengadaan tahun 2005	BELUM SERTIFIKAT	
JUMLAH													10.016.917.999,00			

KECAMATAN MUARA JAWA

DOKUMENTASI KEGIATAN PENGAMANAN ASET KECAMATAN

TAHUN 2024

BERUPA PEMASANGAN PAPAN NAMA / PLANK DI 34 TITIK

BerAKHLAK

B.2.24 Pakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan jumlah pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana pada perangkat daerah

Target indikator kinerja sasaran tambahan 2.24 sebesar 100% dengan realisasi 100% sehingga capaian indikator kinerja sebesar 100% dengan kategori Sangat Tinggi. Pemerintah Kecamatan Muara Jawa telah melaksanakan salah satu fungsi penatausahaan barang berupa tersedianya Pakta Integritas bagi pinjam pakai BMD baik oleh Aparatur Kecamatan dan Kelurahan maupun untuk pengurus RT (pinjam pakai penggunaan kendaraan roda 2 untuk operasional RT) . Namun hal ini perlu ditingkatkan lagi mengingat banyak sekali barang milik pemerintah Kecamatan yang digunakan oleh Aparatur Kecamatan Muara Jawa dengan status pinjam pakai.

Secara lengkap dokumen pendukung capaian indikator kinerja ini dapat diakses melalui link:

https://drive.google.com/file/d/1Wowq-AHy6Nbp7EbI1phhyYfrUYLNPcWa/view?usp=sharing

DATA PENGGUNA BMD KECAMATAN DAN KELURAHAN MUARA JAWA

No	Nama	Nip	Pangkat / Gol	Jabatan	Nama Barang	Kode Barang	Register	Merk / Type	SN	Tahun Pembelian	Harga Perolehan	NO BA
1	MUHAMMAD RAMLI, S.E.,M.M.	197506042000121003	Pembina - IV/a	Sekretaris Camat	Laptop	12.24.01.50.07.12.01.01			0223360090612 009011	2023		B-001/SET.CMJ.UKK/031/01/2024
2	DINA MARIANA,S.E.,M.M.	196401102010012001	Penata Tk. I - III/d	Kasi PMD	Laptop	12.24.01.50.07.12.01.01		Axioo / Z8 Metal		2023		B-002/SET.CMJ.UKK/031/01/2024
3	NORJANAH, S.Sos.	197008142000122004	Penata Tk. I - III/d	Kasubbag Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Laptop	12.24.01.50.07.12.01.01		Axioo	0223360090399 099004	2023		B-003/SET.CMJ.UKK/031/01/2024
4	ROHANA, S.Sos.	196707121986022001	Penata Tk. I - III/d	Kasi Kessos	Laptop	12.24.01.50.07.12.01.01		Axioo / Z8 Metal	0223330080292 007873	2023		B-004/SET.CMJ.UKK/031/01/2024
5	NORDIANSYAH, S.Sos.M.Adm. KP.	196803041991031008	Pembina - IV/a	Pengawas Lapangan	Laptop	12.24.01.50.07.12.01.01		Axioo / Z8 Metal	0223360090399 017104	2023		B-005/SET.CMJ.UKK/031/01/2024
6	SALMIAH	197606242007012020	Penata Muda - III/a	Penata Laporan Keuangan	Laptop	12.24.01.50.07.12.01.01		Axioo / Z8 Metal	0223360090399 055703	2023		B-006/SET.CMJ.UKK/031/01/2024
7	NOOR HASANAH	196208052007012013	Pengatur Tk. I - II/d	Pengelola Data	Laptop	12.24.01.50.07.12.01.01		Axioo / Z8 Metal	0223360090399 049006	2023		B-007/SET.CMJ.UKK/031/01/2024
8	MUHAMMAD IQBAL	6402130712670006	Gn. Habang RT. 001 Kel. Muara Sembilang Kec. Samboja	Kepala Pos Balakar Kecamatan Muara Jawa	Komputer AIO	12.23.01.50.07.14.01.01	02.06.03.02.01.0020	Lenovo	VS81007288	2014		
9	MUHAMMAD HERI		Jl. Ir. Soekarno RT. 028 Kel. Muara Jawa Ulu Kec. Muara Jawa	KETUA KEKRAF	1 UNIT			GEDUNG		2006		B.066/SET.CMJ.UKK/03 1/02/2023
11	SUNARSIH,S.Pd	196912221991032006	Pembina - IV/a	SEKLUR	sepeda motor	02.03.01.05.01	0.00004	Suzuki/125		2009	19.730.000	B.635/UMUM/028/11/2022
12	Ir.Mutasyidin Mudawarawan	196710101998031007	Penata Tk. I - III/d	kasi pemerintahan	sepeda motor	02.03.01.05.01	0.00006	yamaha mio		2010	20.020.500	B.257/TP/028/11/2022
13	IMA,S.E	196210101998031019	Penata Muda - III/a	SEKLUR	sepeda motor	02.03.01.05.01	0.00006	yamaha mio		2010	20.020.500	B.066/UMUM/028/11/2022
14	Mustapa Yani		Kelurahan Muara Jawa Ulu	Ketua RT. 001	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JMC1E1015030	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JMC111XNK 015483	2022	23.058.606	P.1332/SET.CMJ.UKK/0 15/12/2022
15	Ibnu Hajar		Kelurahan Muara Jawa Ulu	Ketua RT. 002	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JMC1E1015488	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JMC117NK 015473	2022	23.058.606	P.1332/SET.CMJ.UKK/0 15/12/2022
16	Marthen Salon Bidang		Kelurahan Muara Jawa Ulu	Ketua RT. 009	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JMC1E1023179	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JMC115NK 023152	2022	23.058.606	P.1332/SET.CMJ.UKK/0 15/12/2022
17	Ruslan		Kelurahan Muara Jawa Ulu	Ketua RT. 010	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JMC1E1019072	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JMC116NK 019174	2022	23.058.606	P.1332/SET.CMJ.UKK/0 15/12/2022
18	Agus Riyanto		Kelurahan Muara Jawa Ulu	Ketua RT. 011	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JMC1E1018401	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JMC117NK 018423	2022	23.058.606	P.1332/SET.CMJ.UKK/0 15/12/2022
19	Wahono		Kelurahan Muara Jawa Ulu	Ketua RT. 012	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JMC1E1016483	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JMC113NK 018460	2022	23.058.606	P.1332/SET.CMJ.UKK/0 15/12/2022
20	Suwandi		Kelurahan Muara Jawa Ulu	Ketua RT. 013	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JMC1E1018171	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JMC115NK 018145	2022	23.058.606	P.1332/SET.CMJ.UKK/0 15/12/2022
21	Puji Astuti		Kelurahan Muara Jawa Ulu	Ketua RT. 016	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JMC1E1035841	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JMC115NK 035798	2022	23.058.606	P.1332/SET.CMJ.UKK/0 15/12/2022
22	Syaiful Bahri		Kelurahan Muara Jawa Ulu	Ketua RT. 017	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JMC1E1039620	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JMC118NK 039698	2022	23.058.606	P.1332/SET.CMJ.UKK/0 15/12/2022
23	Abdul Gafar		Kelurahan Muara Jawa Ulu	Ketua RT. 019	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JMC1E1035878	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JMC119NK 035758	2022	23.058.606	P.1332/SET.CMJ.UKK/0 15/12/2022

DATA PENGGUNA BMD KECAMATAN DAN KELURAHAN MUARA JAWA

No	Nama	Nip	Pangkat / Gol	Jabatan	Nama Barang	Kode Barang	Register	Merk / Type	SN	Tahun Pembelian	Harga Perolehan	NO BA
24	Tukiman		Kelurahan Muara Jawa Ulu	Ketua RT. 020	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JMC1E1035462	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JMC111NK035259	2022	23.056.606	P.1332/SET.CMJ.UKKD 15/12/2022
25	Fahmi		Kelurahan Muara Jawa Ulu	Ketua RT. 022	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JMC1E1038628	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JMC117NK038613	2022	23.056.606	P.1332/SET.CMJ.UKKD 15/12/2022
26	Rais Samad		Kelurahan Muara Jawa Ulu	Ketua RT. 024	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JMC1E1038481	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JMC118NK035259	2022	23.056.606	P.1332/SET.CMJ.UKKD 15/12/2022
27	Kurnaini		Kelurahan Muara Jawa Ulu	Ketua RT. 026	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JMC1E1035976	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JMC117NK035796	2022	23.056.606	P.1332/SET.CMJ.UKKD 15/12/2022
28	Muhammad Dong		Kelurahan Muara Jawa Ulu	Ketua RT. 027	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JMC1E1038869	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JMC118NK038776	2022	23.056.606	P.1332/SET.CMJ.UKKD 15/12/2022
29	Jamiah		Kelurahan Muara Jawa Ulu	Ketua RT. 030	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JMC1E1038887	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JMC113NK032736	2022	23.056.606	P.1332/SET.CMJ.UKKD 15/12/2022
30	M. Rahman		Kelurahan Muara Jawa Ulu	Ketua RT. 031	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JMC1E1038709	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JMC117NK039799	2022	23.056.606	P.1332/SET.CMJ.UKKD 15/12/2022
31	Suhardi		Kelurahan Muara Jawa Ulu	Ketua RT. 033	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JMC1E1039623	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JMC118NK039600	2022	23.056.606	P.1332/SET.CMJ.UKKD 15/12/2022
32	Edy Susanto		Kelurahan Muara Jawa Ulu	Ketua RT. 036	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JMC1E1038819	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JMC114NK038781	2022	23.056.606	P.1332/SET.CMJ.UKKD 15/12/2022
33	Samu		Kelurahan Muara Jawa Ulu	Ketua RT. 037	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JMC1E1038885	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JMC118NK038765	2022	23.056.606	P.1332/SET.CMJ.UKKD 15/12/2022
34	Didik Munadi		Kelurahan Muara Jawa Ulu	Ketua RT. 038	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JMC1E1039029	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JMC113NK039708	2022	23.056.606	P.1332/SET.CMJ.UKKD 15/12/2022
35	Bahanuddin Said		Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Ketua RT. 001	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JMC1E1036587	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JMC111NK036498	2022	23.056.606	P.1332/SET.CMJ.UKKD 15/12/2022
36	Syahril		Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Ketua RT. 002	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JMC1E1036234	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JMC118NK036108	2022	23.056.606	P.1332/SET.CMJ.UKKD 15/12/2022
37	Jamaluddin		Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Ketua RT. 003	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JMC1E1035700	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JMC113NK035574	2022	23.056.606	P.1332/SET.CMJ.UKKD 15/12/2022
38	M. David Djunaidi		Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Ketua RT. 005	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JMC1E1035539	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JMC117NK035562	2022	23.056.606	P.1332/SET.CMJ.UKKD 15/12/2022
39	Budi Rahman		Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Ketua RT. 006	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JMC1E1035612	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JMC119NK035584	2022	23.056.606	P.1332/SET.CMJ.UKKD 15/12/2022
40	Sirajuddin		Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Ketua RT. 007	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JMC1E1035408	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JMC114NK035302	2022	23.056.606	P.1332/SET.CMJ.UKKD 15/12/2022
41	Mustafa		Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Ketua RT. 008	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JMC1E1035201	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JMC113NK035114	2022	23.056.606	P.1332/SET.CMJ.UKKD 15/12/2022
42	Sri Mulyani		Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Ketua RT. 013	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JMC1E1039577	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JMC117NK039448	2022	23.056.606	P.1332/SET.CMJ.UKKD 15/12/2022
43	Salmah		Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Ketua RT. 014	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JMC1E1033409	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JMC118NK033304	2022	23.056.606	P.1332/SET.CMJ.UKKD 15/12/2022
44	Suwaji		Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Ketua RT. 015	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JMC1E1038700	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JMC118NK038681	2022	23.056.606	P.1332/SET.CMJ.UKKD 15/12/2022
45	Slamet Budiono		Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Ketua RT. 016	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JMC1E1032742	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JMC112NK032594	2022	23.056.606	P.1332/SET.CMJ.UKKD 15/12/2022
46	Ermawati, S.E.		Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Ketua RT. 018	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JMC1E1033407	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JMC112NK033301	2022	23.056.606	P.1332/SET.CMJ.UKKD 15/12/2022
47	Akhmad Haryadi		Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Ketua RT. 020	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JMC1E1033376	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JMC117NK033326	2022	23.056.606	P.1332/SET.CMJ.UKKD 15/12/2022
48	Hasnia		Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Ketua RT. 022	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JMC1E1032692	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JMC118NK032657	2022	23.056.606	P.1332/SET.CMJ.UKKD 15/12/2022
49	Farizah		Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Ketua RT. 023	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JMC1E1033223	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JMC117NK033116	2022	23.056.606	P.1332/SET.CMJ.UKKD 15/12/2022

DATA PENGGUNA BMD KECAMATAN DAN KELURAHAN MUARA JAWA

No	Nama	Nip	Pangkat / Gol	Jabatan	Nama Barang	Kode Barang	Register	Merk / Type	SN	Tahun Pembelian	Harga Perolehan	NO BA
50	Anas S.		Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Ketua RT. 024	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JMC1E1032787	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JMC118NK032653	2022	23.056.606	P.1332/SET.CMJ.UKKD 15/12/2022
51	Syamsul Rizal		Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Ketua RT. 025	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JMC1E1036650	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JMC111NK036642	2022	23.056.606	P.1332/SET.CMJ.UKKD 15/12/2022
52	Abdul Wahab		Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Ketua RT. 026	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JMC1E1036259	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JMC112NK036129	2022	23.056.606	P.1332/SET.CMJ.UKKD 15/12/2022
53	Ilham		Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Ketua RT. 027	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JMC1E1036241	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JMC117NK036114	2022	23.056.606	P.1332/SET.CMJ.UKKD 15/12/2022
54	Akhmad Yani, S.Pd.I.		Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Ketua RT. 028	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JMC1E1032746	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JMC112NK032617	2022	23.056.606	P.1332/SET.CMJ.UKKD 15/12/2022
55	Arif		Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Ketua RT. 030	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JMC1E1032887	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JMC115NK032756	2022	23.056.606	P.1332/SET.CMJ.UKKD 15/12/2022
56	Faisal		Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Ketua RT. 031	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JMC1E1035710	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JMC115NK035575	2022	23.056.606	P.1332/SET.CMJ.UKKD 15/12/2022
57	Armadi		Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Ketua RT. 032	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JMC1E1033215	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JMC114NK033123	2022	23.056.606	P.1332/SET.CMJ.UKKD 15/12/2022
58	Kuntoro		Kelurahan Muara Jawa Tengah	Ketua RT. 002	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JMC1E1022692	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JMC118NK022674	2022	23.056.606	P.1332/SET.CMJ.UKKD 15/12/2022
59	Zainuddin		Kelurahan Muara Jawa Tengah	Ketua RT. 005	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JMC1E1037797	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JMC112NK037669	2022	23.056.606	P.1332/SET.CMJ.UKKD 15/12/2022
60	Amat		Kelurahan Muara Jawa Tengah	Ketua RT. 006	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JMC1E1032700	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JMC119NK032657	2022	23.056.606	P.1332/SET.CMJ.UKKD 15/12/2022
61	Surianyah		Kelurahan Muara Jawa Tengah	Ketua RT. 011	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JMC1E1032374	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JMC116NK030000	2022	23.056.606	P.1332/SET.CMJ.UKKD 15/12/2022
62	Murtaji		Kelurahan Muara Jawa Tengah	Ketua RT. 012	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JMC1E1033548	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JMC11XNK033454	2022	23.056.606	P.1332/SET.CMJ.UKKD 15/12/2022
63	Rusdi Muna		Kelurahan Muara Jawa Tengah	Ketua RT. 013	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JMC1E1033083	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JMC116NK032881	2022	23.056.606	P.1332/SET.CMJ.UKKD 15/12/2022
64	Addriansor		Kelurahan Muara Jawa Tengah	Ketua RT. 014	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JMC1E1033536	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JMC117NK033424	2022	23.056.606	P.1332/SET.CMJ.UKKD 15/12/2022
65	Ridwan Al Haris		Kelurahan Muara Jawa Tengah	Ketua RT. 015	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JMC1E1033647	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JMC118NK033452	2022	23.056.606	P.1332/SET.CMJ.UKKD 15/12/2022
66	Munjair		Kelurahan Muara Jawa Tengah	Ketua RT. 016	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JMC1E1030867	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JMC115NK030852	2022	23.056.606	P.1332/SET.CMJ.UKKD 15/12/2022
67	Deddy Darkani		Kelurahan Muara Jawa Ilir	Ketua RT. 001	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JMC1E1030652	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JMC118NK030640	2022	23.056.606	P.1332/SET.CMJ.UKKD 15/12/2022
68	M. Rafik		Kelurahan Muara Jawa Ilir	Ketua RT. 007	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JMC1E1030868	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JMC117NK030866	2022	23.056.606	P.1332/SET.CMJ.UKKD 15/12/2022
69	Suharni		Kelurahan Muara Jawa Ilir	Ketua RT. 008	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JMC1E1030922	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JMC112NK030897	2022	23.056.606	P.1332/SET.CMJ.UKKD 15/12/2022
70	M. Idrus		Kelurahan Muara Jawa Ilir	Ketua RT. 009	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JMC1E1030871	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JMC112NK030866	2022	23.056.606	P.1332/SET.CMJ.UKKD 15/12/2022
71	Husaini		Kelurahan Muara Jawa Ilir	Ketua RT. 012	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JMC1E1030861	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JMC111NK030074	2022	23.056.606	P.1332/SET.CMJ.UKKD 15/12/2022
72	Syafii		Kelurahan Muara Jawa Ilir	Ketua RT. 013	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JMC1E1030876	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JMC118NK030854	2022	23.056.606	P.1332/SET.CMJ.UKKD 15/12/2022
73	Imran Hill		Kelurahan Muara Jawa Ilir	Ketua RT. 017	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JMC1E1030734	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JMC113NK030656	2022	23.056.606	P.1332/SET.CMJ.UKKD 15/12/2022
74	Ashadup		Kelurahan Muara Jawa Ilir	Ketua RT. 018	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JMC1E1030959	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JMC117NK030883	2022	23.056.606	P.1332/SET.CMJ.UKKD 15/12/2022
75	Palmawati		Kelurahan Teluk Dalam	KETUA RT. 001	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JMC1E1028991	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JMC113NK028979	2022	23.056.606	P.1332/SET.CMJ.UKKD 15/12/2022

DATA PENGGUNA BMD KECAMATAN DAN KELURAHAN MUARA JAWA

No	Nama	Nip	Pangkat / Gol	Jabatan	Nama Barang	Kode Barang	Register	Merk / Type	SN	Tahun Pembelian	Harga Perolehan	NO BA
76	Tuani		Kelurahan Teluk Dalam	KETUA RT. 004	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JMC1E1029866	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JMC112NK029799	2022	23.056.606	P.1332/SET.CMJ.UKKD 15/12/2022
77	Gustinah		Kelurahan Teluk Dalam	KETUA RT. 005	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JMC1E1030828	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JMC118NK030836	2022	23.056.606	P.1332/SET.CMJ.UKKD 15/12/2022
78	Hairuddin		Kelurahan Teluk Dalam	KETUA RT. 007	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JMC1E1030879	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JMC110NK030879	2022	23.056.606	P.1332/SET.CMJ.UKKD 15/12/2022
79	Salmansyah		Kelurahan Tama Pole	KETUA RT. 001	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JMC1E1030866	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JMC112NK030863	2022	23.056.606	P.1332/SET.CMJ.UKKD 15/12/2022
80	Selamet Riadi		Kelurahan Tama Pole	KETUA RT. 009	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JMC1E1030862	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JMC113NK030875	2022	23.056.606	P.1332/SET.CMJ.UKKD 15/12/2022
81	Sainsuri		Kelurahan Muara Kembang	KETUA RT. 001	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JMC1E1026648	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JMC110NK026637	2022	23.056.606	P.1332/SET.CMJ.UKKD 15/12/2022
82	Raudah		Kelurahan Muara Kembang	KETUA RT. 002	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JMC1E1026891	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JMC117NK026790	2022	23.056.606	P.1332/SET.CMJ.UKKD 15/12/2022
83	Asaluddin		Kelurahan Muara Kembang	KETUA RT. 003	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JMC1E1030877	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JMC114NK030888	2022	23.056.606	P.1332/SET.CMJ.UKKD 15/12/2022
84	Arfan		Kelurahan Muara Kembang	Ketua RT. 010	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JMC1E1040818	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JMC115NK040713	2022	23.056.606	P.1332/SET.CMJ.UKKD 15/12/2022
85	Jumardi		Kelurahan Muara Kembang	Ketua RT. 012	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JMC1E1040834	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JMC117NK040731	2022	23.056.606	P.1332/SET.CMJ.UKKD 15/12/2022
86	Abd W Syahrani U		Kelurahan Muara Kembang	Ketua RT. 014	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JMC1E1040851	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JMC118NK040787	2022	23.056.606	P.1332/SET.CMJ.UKKD 15/12/2022
87	Hardi		Kelurahan Dondang	Ketua RT. 001	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JBP1E1037473	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JBP112NK037457	2022	23.056.606	P.1332/SET.CMJ.UKKD 15/12/2022
88	Eka Apriyanti		Kelurahan Dondang	Ketua RT. 002	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JBP1E1038077	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JBP112NK037960	2022	23.056.606	P.1332/SET.CMJ.UKKD 15/12/2022
90	Muslim		Kelurahan Dondang	Ketua RT. 003	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JBP1E1030675	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JBP113NK030684	2022	23.056.606	P.1332/SET.CMJ.UKKD 15/12/2022
91	Nafrizal		Kelurahan Dondang	Ketua RT. 004	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JBP1E1036515	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JBP115NK036454	2022	23.056.606	P.1332/SET.CMJ.UKKD 15/12/2022
92	Hasan Basri		Kelurahan Dondang	Ketua RT. 005	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JBP1E1036169	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JBP114NK036087	2022	23.056.606	P.1332/SET.CMJ.UKKD 15/12/2022
93	Guyitno		Kelurahan Dondang	Ketua RT. 006	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JBP1E1036767	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JBP111NK036684	2022	23.056.606	P.1332/SET.CMJ.UKKD 15/12/2022
94	Baharuddin		Kelurahan Dondang	Ketua RT. 007	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JBP1E1036978	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JBP11XNK036881	2022	23.056.606	P.1332/SET.CMJ.UKKD 15/12/2022
95	M. Haiba		Kelurahan Dondang	Ketua RT. 008	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JBP1E1036873	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JBP118NK036830	2022	23.056.606	P.1332/SET.CMJ.UKKD 15/12/2022
96	Mujiansiah		Kelurahan Dondang	Ketua RT. 009	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JBP1E1036300	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JBP115NK036278	2022	23.056.606	P.1332/SET.CMJ.UKKD 15/12/2022
97	Zulkifli		Kelurahan Dondang	Ketua RT. 010	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JBP1E1036669	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JBP115NK036682	2022	23.056.606	P.1332/SET.CMJ.UKKD 15/12/2022
98	Ardiansyah		Kelurahan Dondang	Ketua RT. 011	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JBP1E1036020	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JBP118NK036231	2022	23.056.606	P.1332/SET.CMJ.UKKD 15/12/2022
99	Nasruddin		Kelurahan Dondang	Ketua RT. 012	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JBP1E1036969	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JBP113NK037026	2022	23.056.606	P.1332/SET.CMJ.UKKD 15/12/2022
100	Supiyan		Kelurahan Dondang	Ketua RT. 013	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JBP1E1036714	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JBP115NK036595	2022	23.056.606	P.1332/SET.CMJ.UKKD 15/12/2022
101	Muslimin		Kelurahan Dondang	Ketua RT. 014	sepeda motor	1.3.202.001.004.001	JBP1E1037341	HONDA VARIO 125 CBS	MH1JBP117NK036600	2022	23.056.606	P.1332/SET.CMJ.UKKD 15/12/2022

B.2.25 Jumlah program pengentasan kemiskinan

Target indikator kinerja sasaran tambahan 2.25 sebesar 100% dengan realisasi 100% sehingga capaian indikator kinerja sebesar 100% dengan kategori Sangat Tinggi. Program Pengentasan Kemiskinan yang ada di Kecamatan Muara Jawa merupakan Program Kegiatan Dinas/Badan Kabupaten Kutai Kartanegara yang lokusnya di semua Kecamatan termasuk Kecamatan Muara Jawa. Pemerintah Kecamatan Muara Jawa melaksanakan proses verifikasi dan validasi warga penerima bantuan.

Secara lengkap dokumen pendukung capaian indikator kinerja ini dapat diakses melalui link: https://drive.google.com/file/d/1BuHb02fSMIjGMSYxYuZgjFJq24t-tkIx/view?usp=sharing

REKAP BANTUAN SOSIAL DI KECAMATAN MUARA JAWA TAHUN 2024

No	Kelurahan	DTKS	Banter 2024	Kukar Idaman	PKH	Beras Bulog	P3KE
1	Dondang	518	13	23	47	61	39
2	Muara awa Ilir	416	16	30	61	115	65
3	Muara Jawa Tengah	692	61	28	82	159	113
4	Muara Jawa Ulu	1642	58	188	115	156	110
5	Muara Jawa Pesisir	1481	26	149	91	159	117
6	Muara Kembang	333	12	23	25	128	99
7	Tamapole	138	1	0	11	11	8
8	Teluk Dalam	133	4	15	22	26	11
	Jumlah	**5,353**	**191**	**456**	**454**	**815**	**562**

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BERITA ACARA KESEPAKATAN
HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA DESIL I P3KE
MUSYAWARAH DESA KECAMATAN MUARA JAWA
TAHUN 2024

B.2.26 Prevalensi Stunting sesuai dengan target Nasional

Target indikator kinerja sasaran tambahan 2.26 untuk Tingkat Kabupaten Kutai kartanegara sebesar 14%.. Realisasi Kinerja Kecamatan Muara Jawa sebesar 8,4% Artinya prevalensi stunting Kecamatan Muara Jawa berada di bawah target prevalensi stunting tingkat nasioanl/kabupaten Perhitungan Capaian Kinerja menggunakan Rumus tingkat realisasi negatif dimana capaian kinerja =(target - (realisasi - target) dibagi target) dikali 100%. Semakin rendah realisasi maka semakin tinggi kinerja. Dan dari hasil perhitungan menggunakan rumus tersebut, Kecamatan Muara Jawa mendapatkan capaian indikator kinerja sebesar 140% dengan kategori Sangat Tinggi. Faktor pendukung keberhasilan target kinerja ini adalah upaya-upaya mengatasi stunting yang melibatkan banyak pihak mulai dari lintas OPD, Bantuan swasta/pihak ketiga, partisipasi kader posyandu dan perangkat lembaga masyarakat lainnya. Program Pemberian Makanan Tambahan di setiap Posyandu dan Program Pemberian Makanan Bergizi dengan DPMDes Kabupaten sebagai OPD Pengampu adalah salah 1 bentuk upaya mengatasi stunting.

Secara lengkap dokumen pendukung capaian indikator kinerja ini dapat diakses melalui link: https://drive.google.com/file/d/1Q4vrkZhojpJ27kYNbk3mSDCZMjer1t8y/view?usp=sharing

LAPORAN TAHUNAN STATUS GIZI BALITA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024

No.	Puskesmas	Ditimbang	Diukur TB	Diukur TB dan BB	Stunting	Wasting	Underweight	% stunting	% Wasting	% underweight
1.	SAMBOJA	1.132	1.131	1.131	232	87	177	20,51	7,69	15,64
2.	SUNGAI MERDEKA	2.378	2.377	2.377	303	225	378	12,75	9,47	15,9
3.	HANDIL BARU	1.486	1.484	1.483	257	127	210	17,32	8,56	14,13
4.	MUARA JAWA	2.381	2.381	2.381	200	104	244	8,4	4,37	10,25
5.	SANGA-SANGA	1.320	1.320	1.319	299	101	231	22,65	7,66	17,5
6.	LOA JANAN	1.398	1.400	1.398	116	71	127	8,29	5,08	9,08
7.	BATUAH	778	779	779	72	7	53	9,24	0,9	6,81
8.	LOA DURI	1.958	1.955	1.957	271	98	172	13,86	5,01	8,78
9.	LOA KULU	2.311	2.310	2.310	239	109	235	10,35	4,72	10,17
10.	JONGGON JAYA	1.043	1.043	1.042	68	27	127	6,52	2,59	12,18
11.	MUARA MUNTAI	1.245	1.245	1.245	387	101	260	31,08	8,11	20,88
12.	MUARA WIS	616	616	615	213	56	156	34,58	9,11	25,32
13.	KOTA BANGUN	1.350	1.351	1.350	178	117	250	13,18	8,67	18,52
14.	RIMBA AYU	1.009	1.009	1.008	140	68	137	13,88	6,75	13,58
15.	MANGKURAWANG	1.561	1.561	1.561	319	118	253	20,44	7,56	16,21
16.	RAPAK MAHANG	1.563	1.563	1.563	298	103	205	19,07	6,59	13,12
17.	LOA IPUH	1.177	1.167	1.173	182	72	146	15,6	6,14	12,4
18.	SEBULU I	1.759	1.759	1.759	267	138	328	15,18	7,85	18,65
19.	SEBULU II	1.166	1.167	1.163	190	51	142	16,28	4,39	12,18
20.	SEPARI III	1.775	1.775	1.775	156	119	253	8,79	6,7	14,25
21.	TELUK DALAM	2.642	2.640	2.642	391	179	349	14,81	6,78	13,21
22.	SUNGAI MARIAM	2.425	2.425	2.420	353	135	281	14,56	5,58	11,59
23.	MUARA BADAK	1.694	1.694	1.693	221	99	191	13,05	5,85	11,28
24.	BADAK BARU	997	997	997	40	29	65	4,01	2,91	6,52
25.	MARANG KAYU	1.514	1.514	1.514	66	24	91	4,36	1,59	6,01
26.	PERANGAT	686	686	686	61	27	55	8,89	3,94	8,02
27.	MUARA KAMAN	1.345	1.346	1.341	285	116	229	21,17	8,65	17,03
28.	BUNGA JADI	1.386	1.386	1.386	271	113	237	19,55	8,15	17,1
29.	KAHALA	726	726	726	171	44	155	23,55	6,06	21,35
30.	KEMBANG JANGGUT	1.356	1.356	1.355	267	158	217	19,69	11,66	16
31.	TABANG	398	398	398	37	20	23	9,3	5,03	5,78
32.	RITAN BARU	468	468	466	41	13	33	8,76	2,79	7,05
	KABUPATEN	45.043	45.029	45.013	6.591	2.856	6.010	14,64	6,34	13,34

REKAPITULASI HASIL PEMANTAUAN PERTUMBUHAN BALITA 0-59 BULAN DI POSYANDU
WILAYAH KERJA PUSKESMAS MUARA JAWA

Kab/Kota : Kutai Kartanegara
Kecamatan : Muara Jawa
Tahun : 2024

Kode	Desa/kelurahan	Status Gizi Indeks BB/U				∑ Ditimbang	∑ Under weight	% Under weight	Status Gizi Indeks TB/U				∑ Diukur	∑ Stunting	% Stunting	Status Gizi Indeks BB/TB						∑ Diukur dan Ditimbang	∑ Wasting	% Wasting
		BB sangat Kurang	BB Kurang	Normal	Resiko lebih				Sangat Pendek	Pendek	Normal	Tinggi				Gizi Buruk	Gizi Kurang	Normal	Risiko Gizi lebih	Gizi lebih	Obesitas			
1	Teluk Dalam	0	2	52	10	64	2	3,13	1	5	58	0	64	6	9,38	0	1	44	12	4	3	64	1	1,56
2	Muara Jawa Ilir	5	25	172	8	210	30	14,29	6	8	196	0	210	14	6,67	0	13	180	10	3	4	210	13	6,19
3	Muara Jawa Tengah	6	27	384	22	439	33	7,52	13	22	404	0	439	35	7,97	0	12	374	35	14	4	439	12	2,73
4	Muara Jawa Ulu	11	45	538	52	646	56	8,67	13	26	607	0	646	39	6,04	1	21	512	81	22	9	646	22	3,41
5	Dondang	3	15	200	10	228	18	7,89	4	9	215	0	228	13	5,70	0	10	199	12	3	4	228	10	4,39
6	Tamapole	2	2	36	3	43	4	9,30	2	1	40	0	43	3	6,98	0	3	36	3	1	0	43	3	6,98
7	Muara Kembang	11	45	178	6	240	56	23,33	14	28	198	0	240	42	17,50	0	24	201	12	0	3	240	24	10,00
8	Muara Jawa Pesisir	11	34	448	18	511	45	8,81	9	39	463	0	511	48	9,39	0	19	426	42	13	2	511	19	3,72
Total		49	195	2008	129	2381	244	10,25	62	139	2181	0	2381	200	8,40	1	103	1981	207	60	29	2381	104	4,37

Mengetahui
Plt. Kepala
Puskesmas Muara Jawa

[illegible], S.Tr.Keb
NIP. 19791104 200312 2 006

Muara Jawa, 2 Januari 2025
Tenaga Pelaksana Gizi

An Nisa Elandha, S. Gz

B.2.27 Ketersediaan pengganggaran pengarusutamaan gender

Target indikator kinerja sasaran tambahan 2.27 untuk Kecamatan Muara Jawa sebesar 100%. Realisasi Kinerja Kecamatan Muara Jawa sebesar 100% Sehingga capaian indikator kinerjaKecamatan Muara Jawa sebesar 100% dengan kategori Sangat Tinggi. Faktor pendukung keberhasilan target kinerja ini adalah ketersediaan program dan kegiatan serta anggaran untuk mengakomodir kebutuhan bagi kamu Rentan yaitu Kaum Perempuan, anak-anak, lansia, dan difable.Namun hal ini masih dirasakan kurang, masih banyak upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh Kecamatan Muara Jawa untuk dapat memfasilitasi pemenuhan kebutuhan kaum rentan tersebut. Secara lengkap dokumen pendukung capaian indikator kinerja ini dapat diakses melalui link:

https://drive.google.com/file/d/13V3swSMmJnfP6tV_bg0ButXBQZQZAyor/view?usp=sharing

PROGRES PENYAMPAIAN DOKUMEN MATRIKS GAP-GBS OPD DAN KECAMATAN
Anggaran Responsif Gender (ARG)
Kabupaten Kutai Kartanegara
PER 24 OKTOBER 2024

No	Perangkat Daerah	Anggaran (Rp)	ARG (Rp)	Persentase	Jumlah GAP-GBS	PROGRES	PROGRES
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp 18.382.179.995,00	Rp 1.950.000.000,00	10,61%	1 ARG	LENGKAP	FINAL
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp 2.600.000.000,00	Rp 3.350.000.000,00	128,85%	2 GAP-GBS	LENGKAP	FINAL
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp 25.899.451.596,00	Rp 150.000.000,00	0,58%	1 GAP-GBS	LENGKAP	FINAL
4	Badan Pendapatan Daerah	Rp 12.104.897.144,00	Rp 2.887.211.114,00	24,75%	4 GAP-GBS	LENGKAP	FINAL
5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Rp 7.725.609.808,00	Rp 1.692.659.455,00	21,91%	2 GAP DAN GBS	BELUM LENGKAP	Dokumen Belum ditanda tangani Kepala Dinas
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 24.080.218.800,00	Rp 2.745.000.000,00	11,40%	10 GAP dan GBS	LENGKAP	FINAL
7	Badan Riset dan Inovasi Daerah			#DIV/0!		BELUM LENGKAP	Belum Membuat Dokumen GAP-GBS
8	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		Rp 360.000.000,00	#DIV/0!	1 GAP-GBS	LENGKAP	FINAL
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp 446.400.320.000,00	Rp 370.668.000.000,00	83,10%	12 GAP dan GBS	LENGKAP	FINAL
10	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Rp 81.094.745.080,00	Rp 200.000.000,00	0,25%	1 ARG	LENGKAP	FINAL
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp 2.756.910.910,00	Rp 450.000.000,00	16,32%	1 GAP dan GBS	LENGKAP	FINAL
12	Dinas Kesehatan	Rp 417.161.881.022,00	Rp 343.837.418.422,00	82,42%	28 GAP dan GBS	LENGKAP	FINAL
13	Dinas Ketahanan Pangan	Rp 12.150.000.000,00	Rp 10.900.000.000,00	89,71%	7 ARG	LENGKAP	FINAL
14	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	Rp 33.279.337.336,09	Rp 75.000.300,00	100,00%	1 ARG	LENGKAP	FINAL
15	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rp 11.153.484.000,00	Rp 10.138.484.000,00	90,89%	7 GAP dan GBS	BELUM LENGKAP	Dokumen Belum ditanda tangani Kepala Dinas
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp 99.305.980.332,00	Rp 32.418.027.348,00	32,64%	4 ARG	LENGKAP	FINAL
17	Dinas Pariwisata	Rp 140.078.929.894,00	Rp 500.000.000,00	0,36%	1 ARG	LENGKAP	FINAL
18	Dinas Pekerjaan Umum			#DIV/0!		BELUM LENGKAP	Belum Membuat Dokumen GAP-GBS
19	Dinas Pemadam Kebakaran	Rp 53.501.886.704,00	Rp 475.000.000,00	0,89%	1 ARG	LENGKAP	FINAL
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			#DIV/0!		BELUM LENGKAP	Belum Membuat Dokumen GAP-GBS
21	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp 16.263.265.884,00	Rp 6.593.861.884,00	40,55%	10 GAP-GBS	LENGKAP	FINAL
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp 9.461.864.621,00	Rp 730.734.000,00	7,72%	2 GAP-GBS	LENGKAP	FINAL
23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			#DIV/0!		BELUM LENGKAP	Belum Membuat Dokumen GAP-GBS
24	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp 30.542.540.734,00	Rp 6.294.725.000,00	20,61%	7 GAP-GBS	LENGKAP	FINAL
25	Dinas Perhubungan	Rp 146.179.346.502,00	Rp 58.361.000.000,00	39,93%	1 GAP - GBS	LENGKAP	FINAL
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp 99.509.197.606,00	Rp 2.165.000.000,00	2,14%	4 GAP - GBS	LENGKAP	FINAL
27	Dinas Perikanan	Rp 28.503.580.000,00	Rp 26.695.629.000,00	93,37%	7 GAP & GBS	LENGKAP	FINAL
28	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Rp 28.650.914.341,00	Rp 14.560.760.405,00	50,81%	11 GAP & GBS	LENGKAP	FINAL
29	Dinas Pertanian dan Peternakan			#DIV/0!		BELUM LENGKAP	Belum Membuat Dokumen GAP-GBS
30	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp 429.059.000.000,00	Rp 196.056.000.000,00	45,85%	4 GAP - GBS	LENGKAP	FINAL
31	Dinas Sosial	Rp 26.268.585.500,00	Rp 19.066.500.500,00	72,28%	8 GAP - GBS	LENGKAP	FINAL
32	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Rp 30.728.344.000,00	Rp 17.586.340.000,00	58,38%	2 GAP-GBS	LENGKAP	FINAL
33	Inspektorat	Rp 42.413.751.306,00	Rp 8.985.000.000,00	20,87%	6 GAP-GBS	LENGKAP	FINAL
34	RSUD AM Parikesit	Rp 306.952.475.472,00	Rp 153.473.884.210,00	84,82%	1 GAP - GBS	LENGKAP	FINAL
35	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	Rp 69.628.947.140,00	Rp 62.328.947.140,00	89,93%	3 GAP - GBS	LENGKAP	FINAL
36	RSUD Dayaku Raja	Rp 167.024.850.360,00	Rp 150.702.738.730,00	90,23%	2 GAP - GBS	LENGKAP	FINAL
37	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp 34.925.223.592,00	Rp 34.755.159.592,00	99,37%	9 GAP-GBS	LENGKAP	FINAL

38	Kecamatan Anggana	Rp	40,753,405,029.00	Rp	25,000,000.00	0.06%	1 GAP-GBS	BELUM LENGKAP	Dokumen Belum ditanda tangani
39	Kecamatan Kembang Janggut	Rp	7,797,739,000.00	Rp	7,727,739,000.00	99.10%	4 GAP - GBS	BELUM LENGKAP	Dok. Belum ditanda tangani, Belum ada Pagu Kegiatan, Belum Sesuai dengan yang diinput di Rekap
40	Kecamatan Kenohan	Rp	5,002,381,000.00	Rp	5,002,381,000.00	100.00%	3 GAP - GBS	BELUM LENGKAP	Dok. Belum ditanda tangani, Belum ada Pagu Kegiatan, Belum Sesuai dengan yang diinput di Rekap
41	Kecamatan Kota Bangun	Rp	10,766,586,766.00	Rp	599,533,766.00	5.57%	3 GAP - GBS	BELUM LENGKAP	Dok. Belum ditanda tangani, Belum ada Pagu Kegiatan, Belum Sesuai dengan yang diinput di Rekap
42	Kecamatan Kota Bangun Darat	Rp	8,887,483,000.00	Rp	975,130,000.00	8.47%	3 GAP - GBS	BELUM LENGKAP	Dok. Belum ditanda tangani, Belum ada Pagu Kegiatan, Belum Sesuai dengan yang diinput di Rekap
43	Kecamatan Loa Janan	Rp	36,250,266,000.00	Rp	5,283,232,766.00	14.35%	5 GAP - GBS	LENGKAP	FINAL
44	Kecamatan Loa Kulu	Rp	42,326,296,000.00	Rp	42,326,296,000.00	100.00%	7 GAP - GBS	BELUM LENGKAP	Dok. GAP-GBS Belum Ada, hanya pagu yang di input di Rekap
45	Kecamatan Marang Kayu	Rp	17,009,990,000.00	Rp	17,009,990,000.00	100.00%	3 GAP-GBS	BELUM LENGKAP	Dok. GAP ada-GBS Belum Ada, hanya pagu yang input di Rekap
46	Kecamatan Muara Badak	Rp	26,649,773,900.00	Rp	25,420,000,000.00	95.39%	2 GAP-GBS	LENGKAP	FINAL
47	Kecamatan Muara Jawa	Rp	69,275,466,677.00	Rp	67,192,721,677.00	96.41%	6 GAP - GBS	LENGKAP	FINAL
48	Kecamatan Muara Kaman	Rp	23,463,229,500.00	Rp	306,666,000.00	1.31%	3 GAP - GBS	BELUM LENGKAP	Dok. GAP-GBS Sudah Ada/Belum Upload Pdf), pagu yang input di Rekap
49	Kecamatan Muara Muntai	Rp	18,803,361,721.00	Rp	325,000,000.00	1.73%	3 GAP - GBS	BELUM LENGKAP	Dok. GAP-GBS Belum Final, pagu yang input di Rekap tidak sesuai
50	Kecamatan Muara Wis	Rp	8,947,282,000.00	Rp	345,000,000.00	3.86%	3 GAP - GBS	LENGKAP	FINAL
51	Kecamatan Samboja	Rp	106,118,082,750.00	Rp	106,118,082,750.00	100.00%	5 GAP-GBS	BELUM LENGKAP	Dok. GAP-GBS Sudah Ada/1 Dok.Belum Upload Pdf), pagu yang input di Rekap belum sesuai
52	Kecamatan Samboja Barat	Rp	80,557,539,069.00	Rp	6,795,827,000.00	8.42%	3 GAP - GBS	BELUM LENGKAP	Dok. GAP-GBS Sudah Ada; Dok.Belum ditanda tangani Camat dan Belum di Pdf kan), pagu yang input di Rekap belum sesuai
53	Kecamatan Sanga-Sanga					#DIV/0!		BELUM LENGKAP	Belum Membuat Dokumen GAP-GBS
54	Kecamatan Sebulu	Rp	19,081,082,000.00	Rp	1,167,822,000.00	6.07%	5 GAP - GBS	LENGKAP	FINAL
55	Kecamatan Tabang	Rp	5,871,663,000.00	Rp	5,846,663,000.00	99.57%	4 GAP - GBS	LENGKAP	FINAL
56	Kecamatan Tenggarong					#DIV/0!		BELUM LENGKAP	Belum Membuat Dokumen GAP-GBS
57	Kecamatan Tenggarong Seberang	Rp	72,140,117,922.00	Rp	5,630,000,000.00	7.80%	3 GAP - GBS	LENGKAP	FINAL
	TOTAL	Rp	3,338,902,137,578.00	Rp	1,830,354,569,288.80	54.82%			

JUMLAH OPD YANG SUDAH 49
JUMLAH OPD -8
ARG Kabupaten Kukar Tahun 2024 = (ARG Total OPD / Total APBD KAb Kukar) X 100% = 19.66%
Total ABPD Kab Kukar = Rp. 9.309.614.584.820

B.2.28 Angka inflasi maksimal 1,5% - 3,5%

Indikator kinerja 2.28 terkait pengendalian inflasi dimana Pemerintah Dawrah menetapkan target agar angka inflasi tetap di dalam batas normal yaitu antara 1,5% sampai 3,5%. Inflasi adalah ekniakan harga barang dan jasa umum secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi dapat terjadi karena beberapa faktor antara lain permintaan yang lebih besar dari penawaran, defisit anggaran, kenaikan harga barang impor.

Perhitungan inflasi menggunakan perhitungan ratusan komoditas, yang dengan keterbatasan anggaran serta jumlah sampel komoditas yang dihitung hal tersebut sulit dilakukan. Maka Pemerintah Kabupaten Kutai kartanegara menggunakan metode Proxy Inflasi atau Indeks Perkembangan Harga (IPH). IPH menggambarkan perkembangan harga pangan. Tujuan perhitungan IPH adalah:

1. IPH merupakan ukuran statistik yang menunjukkan perubahan harga 20 komoditas pangan yang memiliki bobot paling besar dalam Indeks Harga Konsumen (IHK);
2. IPH diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi serta menjaga kestabilan harga pangan;
3. IPH dapat digunakan sebagai indikator untuk mengetahui harga pangan dan mengantisipasi inflasi.

Dari hasil perhitungan IPH DI Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2024 pada perbandingan Year On Year (perbandingan dengan bulan yang sama di tahun sebelumnya) dapat dilihat bahwa dari bulan Januari – Desember 2024 angka inflasi di Kutai Kartanegara masih dalam range yang normal (antara 1,5% sampai 3,5%). Atas dasar tersebut maka disimpulkan bahwa realisasi kinerja indicator tambahan B.2.28 sebesar 1005 dengan capaian kinerja 100% berpredikat Sangat tinggi.

B.2.29 Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan

Target Indikator kinerja 2.29 sebesar 40%. Realisasi sebesar 40%, sehingga capaian kinerja adalah 100% dengan kategori sangat tinggi. Secara lebih lengkap serapan P2DN Kecamatan Muara Jawa pada khususnya dan seluruh satuan kerja se Kutai Kartanegara pada umumnya dapat dilihat dari Rekap Serapan P3DN yang dapat diakses melalui link:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w7FoGW2OV0LLSqvpKKkQN9yQPV-gatP2/edit?usp=sharing&ouid=117360711041597548412&rtpof=true&sd=true

B.2.30 Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Target Indikator kinerja 2.30 Pemkab Kutai Kartanegara adalah Nilai sebesar 3,6. Realisasi yang diperoleh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 realisasi yang diperoleh Pemkab Kutai Kartanegara adalah senilai 3,1135 sehingga capaian indikator kinerja adalah 86,49% dengan kategori tinggi. Secara lebih lengkap Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 dapat diakses melalui link:
https://drive.google.com/file/d/1WKSOoO4UDgH9JOISbs75pEvLegvyNT5s/view?usp=sharing

B.2.31 Nilai SAKIP Pemerintah Daerah

Target Indikator kinerja 2.31 Pemkab Kutai Kartanegara adalah Nilai sebesar 73. Realisasi yang diperoleh berdasarkan Keputusan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor B/417/AA.05/2024 Tanggal 3 September 2024 realisasi yang diperoleh Pemkab Kutai Kartanegara adalah senilai 65,92 sehingga capaian indikator kinerja adalah 90,30% dengan kategori sangat tinggi. Secara lebih lengkap Keputusan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor B/417/AA.05/2024 Tanggal 3 September 2024 dapat diakses melalui link:
https://drive.google.com/file/d/1JQ0g6XhleQxgbeggX7JQASJDUOpasoe8/view?usp=sharing

B.2.32 Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Target Indikator kinerja 2.32 Pemkab Kutai Kartanegara adalah Nilai sebesar 64. Realisasi yang diperoleh berdasarkan Keputusan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor B/346/RB.06/2024 Tanggal 1 Februari 2024 realisasi yang diperoleh Pemkab Kutai Kartanegara adalah senilai 60,12 sehingga capaian indikator kinerja adalah 93,94% dengan kategori sangat tinggi. Secara lebih lengkap Keputusan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor B/346/RB.06/2024 Tanggal 1 Februari 2024 dapat diakses melalui link:
https://drive.google.com/file/d/1pD8ERu1sNh_Pd2TnsHa2goBdEcu_J21b/view?usp=sharing

B.2.33 Indeks Inovasi Daerah

Target Indikator kinerja 2.33 Pemkab Kutai Kartanegara adalah Nilai sebesar 49,57. Realisasi yang diperoleh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-4898 Tahun 2024 realisasi yang diperoleh Pemkab Kutai Kartanegara adalah senilai 58,59 sehingga capaian indikator kinerja adalah 118,20% dengan kategori sangat tinggi. Secara lebih lengkap Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-4898 Tahun 2024 dapat diakses melalui link:
https://drive.google.com/file/d/1FMGx-O4uD3Ndeo2Bgt696k7P6Z1uShV0/view?usp=drive_link

B.2.34 Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah

Target Indikator kinerja 2.34 Pemkab Kutai Kartanegara adalah Nilai sebesar 8,95. Realisasi yang diperoleh berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 659 Tahun 2024 realisasi yang diperoleh Pemkab Kutai Kartanegara adalah senilai 4,35. Terjadi perbedaan skala dalam target dan hasil evaluasi dimana target menggunakan skala 1 – 10 sedangkan realiasi emnggunakan skala 1- 5. Atas dasar hal tersebut agar dapat dilakukan perhitungan tingkat capaian indikator kinerja, maka skala hasil evaluasi dikonversi ke dalam skala 1- 10, sehingga hasil evaluasi Indeks Pelayanan Publik Pemkab Kutai Kartanegara Tahun 2024 adalah sebesar 8,7. Dengan nilai hasil evaluasi 8,7 tersebut maka capaian indikator kinerja B.2.34 adalah 97,21% dengan kategori sangat tinggi. Secara lebih lengkap Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 659 Tahun 2024 dapat diakses melalui link:
https://drive.google.com/file/d/1tuPpXmWzYMtc2D9tzllfoNu3xeIIHOvc/view?usp=sharing

B.2.35 Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah

Target Indikator kinerja 2.35 Pemkab Kutai Kartanegara adalah Predikat Zona Hijau. Berdasarkan Keputusan Ketua Ombudsman Republik indonesia Nomor 252 Tahun 2024 realisasi yang diperoleh Pemkab Kutai Kartanegara adalah senilai 94,46 dengan Predikat Zona Hijau. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa capaian indikator kinerja B.2.34 adalah 100% dengan kategori sangat tinggi. Secara lebih lengkap Keputusan Ketua Ombudsman Republik indonesia Nomor 252 Tahun 2024 dapat diakses melalui link:
https://drive.google.com/file/d/1dJg60yjN0FYP0xRURVcitqhOX0Ob2VRz/view?usp=sharing

B.2.36 Kawaaan Tanpa Rokok/Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau

Target Indikator kinerja 2.36 Kecamatan Muara Jawa adalah 100%. Realisasi 100% berdasarkan kepada bahwa Pemerintah Kecamatan Muara Jawa termasuk 8 Kelurahan telah menerbitkan Surat Keputusan Pembentukan Tim Satgas Internal Tatanan Kesehatan Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan. Sticker-sticker “Dilarang Merokok” dan “Area Bebas Rokok” telah dipasang di lingkungan perkantoran. Secara lebih lengkap Surat Keputusan serta dokumentasi mengenai Area Bebas Rokok dapat diakses melalui link: https://drive.google.com/file/d/1KidjA0t43oCSOlx7TtoVa7EvyTMSXcBB/view?usp=sharing

Dengan demikian maka realisasi indikator kinerja B.2.36 adalah 100% dan capaian kinerjanya 100% denagn predikat Sangat Tinggi.

REKAPITULASI SURAT KEPUTUSAN TERKAIT KAWASAN TANPA ROKOK
DI LINGKUNGAN KECAMATAN MUARA JAWA

No. Urut	Nomor SK	Unit / Sub Uni	Keterangan
1	P-2/M.JAWA/000.7.2/04/2024 Tanggal 30 April 2024	Kantor Camat Muara Jawa	Pembentukan Tim Satgas Internal Tatanan Kesehatan Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Kantor Kecamatan Muara Jawa
2	P-6/Kdd/000.7.2/1/2024 Tanggal 5 Januari 2024	Kelurahan Dondang	Pembentukan Tim Satgas Internal Tatanan Kesehatan Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Kelurahan Dondang
3	P.034/440/MIP/4/2024 Tanggal 1 April 2024	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Pembentukan Tim Satgas Internal Tatanan Kesehatan Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Kelurahan Muara Jawa Pesisir
4	P-09/KTD/000.7.2/2/2024 Tanggal 7 Januari 2024	Kelurahan Teluk Dalam	Pembentukan Tim Satgas Internal Tatanan Kesehatan Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Kelurahan Teluk Dalam
5	P-31.1/Kdd/000.7.2/1/2024 Tanggal 5 Januari 2024	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Pembentukan Tim Satgas Internal Tatanan Kesehatan Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Kelurahan Muara Jawa Ulu
6	P-06.1/TP/000.7.2/4/2024 Tanggal 1 April 2024	Kelurahan Tama Pole	Pembentukan Tim Satgas Internal Tatanan Kesehatan Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Kelurahan Tama Pole
7	P-300.1/KESRA/400/04/2024 Tanggal 1 April 2024	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Pembentukan Tim Satgas Internal Tatanan Kesehatan Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Kelurahan Muara Jawa Ilir
8	P.382.1/MJT/440/4/2024 Tanggal 1 April 2024	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Pembentukan Tim Satgas Internal Tatanan Kesehatan Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Kelurahan Muara Jawa Tengah
9	P-011.1/Kessos/400/MK/04/2024 Tanggal	Kelurahan Muara Kembang	Pembentukan Tim Satgas Internal Tatanan Kesehatan Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Kelurahan Muara Kembang

KECAMATAN MUARA JAWA

DOKUMENTASI IMPLEMENTASI KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)

KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) KANTOR K ELURAHAN MUARA JAWA PESISIR

B.2.37 Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Aplikasi Survey Kukar)

Target Indikator kinerja 2.37 Kecamatan Muara Jawa adalah 100%. Dari Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Muara Jawa Semester 2 Tahun 2024 menggunakan aplikasi Survey Kukar diperoleh realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Muara Jawa sebesar 91,76%, sehingga capaian indikator kinerja B.2.37 adalah 91,76% dengan kategori Sangat Tinggi. Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat semester 2 Tahun 2024 secara lengkap dapat diakses melalui link:
https://drive.google.com/file/d/18nYEVogAwDy3Bs_Ub2emqe8iGfhiaUb8/view?usp=sharing

Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Terhadap Pelayanan Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara 2024

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai Juli hingga Desember 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 91,76. Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publiK dari tahun 2022 hingga 2024.
- Unsur pelayanan yang termasuk Dua unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu Kesesuaian Pelayanan , Kecepatan Pelayanan, .
- Sedangkan Dua unsur layanan dengan nilai tertinggi **Kesesuaian/ Kewajaran Biaya** mendapatkan nilai tertinggi **3,91** dari unsur layanan, dan **Penanganan Pengaduan** mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu **3,83**.

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Camat Muara Jawa Kutai Kartanegara

MUHAMMAD RAMLI, S.E.,M.M.
Pembina, IV/a

B.2.38 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Target Indikator kinerja 2.38 Pemkab Kukai Kartanegara adalah 100%. Berdasarkan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai kartanegara Nomor B-1164/DLHK/Set/00.8.6/12/2024 Tanggal 9 Desember 2024 diperoleh realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Triuwlan IV Tahun 2024 sebesar 73,59% dengan Status Baik, sehingga capaian indikator kinerja B.2.38 adalah 73,59% dengan kategori Sedang. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai kartanegara Nomor B-1164/DLHK/Set/00.8.6/12/2024 Tanggal 9 Desember 2024 secara lengkap dapat diakses melalui link:
https://drive.google.com/file/d/1mwDI_uPMjCKsF1npdNu_Yc5ZqWODd3yA/view?usp=sharing

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Jl. H. Ahmad Dahlan - Kelurahan Sukarame Telp (0541) 661169
Website *https://dlhk.kukarkab.go.id* E-mail *dlhk.kukarkab@gmail.com* Kode Pos 75515
TENGGARONG - KUTAI KARTANEGARA

Tenggarong, 09 Desember 2024

Nomor : B-1164/DLHK/Set/00.8.6/12/2024
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Penyampaian IKK Outcome Data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Kepada Yth.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara
di –
Tempat

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai kewajiban Kepala Daerah dalam menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), maka Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyampaikan capaian Kinerja Urusan Pemerintahan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) *Outcome* dan *Output*.

Menindaklanjuti hal tersebut di atas, berikut kami sampaikan data Capaian IKK *Outcome* "**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**" s/d bulan Desember Tahun 2024. Berikut kami sampaikan data pendukungnya:

IKK OUTCOME	REALISASI 2024 Triwulan IV
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	**73,59**

Demikian data Capaian Output ini kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan Kepada Yth :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong
2. Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong
3. Tim Reviu LPPD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

B.2.39 Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Target Indikator kinerja 2.39 Kecamatan Muara Jawa adalah adalah 100%.

Berdasarkan perhitungan capaian indikator kinerja program dan kegiatan tahun anggaran 2024 di bawah ini :

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	64	49,32	77,06
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	85	97	114,12
	Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan	87,5	100	114,29
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	100	100	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	100
	JUMLAH	**436,5**	**446,32**	**102,25**

Diperoleh rata-rata realisasi capaian program dan kegiatan tahun 2024 adalah sebesar 102,25%. Dengan demikian capaian indikator Kinerja Kecamatan Muara Jawa Tahun 2024 sebesar 102,25% dengan predikat Sangat Tinggi.

Sementara Laporan e-pantau bulan Desember tahun 2024 dapat diakses melalui link: https://drive.google.com/file/d/1PgNhiCFod5HM1eex3tFvrS_RfzFayezY/view?usp=sharing

B.2.40 Laporan Pemetaan Kemampuan Mengaji

Target Indikator kinerja 2.40 Kecamatan Muara Jawa adalah adalah 1 Laporan.

Pada tanggal 30 Desember 2024 Camat muara Jawa telah menyampaikan Laporan Hasil Pemetaan Kemampuan Mengaji kepada seluruh aparatur Kecamatan Muara Jawa. Secara detail Laporan tersebut dapat diakses melalui link : https://drive.google.com/file/d/1ONKCThRpyzg5rkOu1noauJQj6U0qAv9Y/view?usp=drive_link

Dengan tersedianya Lpaoran tersebut, maka realisasi kinerja adalah 1 Laporan, dan capaian indikator kinerja adalah 100% dengan predikat Sangat Tinggi.

B.2.41 SK Pembentukan Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Muara Jawa

Target Indikator kinerja 2.41 Kecamatan Muara Jawa adalah adalah 1 Surat Keputusan.

Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan telah tersedia berdasarkan pada Surat Keputusan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 06/BAZNAZ-KUKAR/I/II/2023 Tanggal 28 Februari 2023. Secara detail Surat Keputusan tersebut dapat diakses melalui link : https://drive.google.com/file/d/1iQtr1hOYhB04Rhtcy3e7tGOWihd2QGTw/view?usp=sharing

Dengan tersedianya Surat Keputusan tersebut, maka realisasi kinerja adalah 1 Surat Keputusan dan capaian indikator kinerja adalah 100% dengan predikat Sangat Tinggi.

3.1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan 2023

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	SATUAN	2023			2024			Keterangan
				Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
	TUJUAN									
A.1	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan yang efektif, efisien, inovatif, transparan dan akuntabel	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Nilai	62	89,73	144,73%	64	91,76	143,38%	Tetap
	SASARAN									
B.1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	60	89,73	149,55%	65	100	153,85%	Meningkat
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	83	100	120,48%	84	100	119,05%	Menurun
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Kewenangan Kecamatan	Persen	20	N/A	N/A	25	N/A	N/A	Tidak diperhitungkan
B.2	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100	100	100,00%	100	97,5	97,50%	Menurun

		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun	Persen	100	100	100,00%	100	100	100,00%	Menurun
B.3	Mewujudkan tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	N/A	N/A	N/A	100	100	100,00%	Meningkat
B.4	Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP	Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun	Persen	100	100	100,00%	100	100	100,00%	Tetap
B.5	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100	100	100,00%	100	100	100,00%	Tetap
B.6	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan RKBMD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang akan diadakan	Persen	N/A	N/A	N/A	100	100	100,00%	Meningkat
B.7	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan)	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan (SHS) Perangkat Daerah Paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya	Persen	N/A	N/A	N/A	100	0	0,00%	Tetap
B.8	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian LKjIP	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah paling	Persen	100	0	0	100	100	100,00%	Meningkat

		lambat akhir bulan Februari setiap tahun								
B.9	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap tahun	Persen	100	100	100	100	100	100,00%	Tetap
B.10	Terlaksananya Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir bulan Juni dan Semester II akhir bulan oktober setiap tahun	Persen	100	100	100	100	50	50,00%	Menurun
B.11	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	N/A	N/A	N/A	100	100	100,00%	Meningkat
B.12	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah	Tindak lanjut hasil temuan administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir	Persen	100	100	100,00%	100	84,86	84,86%	Menurun
B.13	Terlaksananya ketepatan waktu penyampaian SPIP	Ketepatan waktu penyampaian laporan penilaian mandiri penyelenggaraan SPIP perangkat daerah per 30 Juni tahun berjalan	Persen	N/A	N/A	N/A	100	100	100,00%	Meningkat
B.14	Penerapan Core Values ASN Berahlak	Internalisasi core values ASN Berahlak	Persen	100	100	100,00%	100	100	100,00%	Tetap

B.15	Penyusunan perjanjian kinerja sampai ke pelaksana	Ketepatan waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD diterapkan)	Persen	N/A	N/A	N/A	100	100	100,00%	Meningkat
B.16	Terlaksananya serapan anggaran berdasarkan SPD yang diterbitkan	Serapan anggaran berdasarkan SPD yang diterbitkan	Persen	100	95,03	95,03%	70	95,9	137,00%	Meningkat
B.17	Ketersediaan dokumen Manajemen risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen risiko pada Perangkat Daerah per Triwulan	Persen	100	100	100,00%	100	100	100,00%	Tetap
B.18	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Persen	N/A	N/A	N/A	100	100	100,00%	Meningkat
B.19	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Nilai Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Dokumen	100	61,3	61,30%	100	72,01	72,01%	Meningkat
B.20	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen	100	69,2	69,20%	100	49,32	49,32%	Menurun
B.21	Peningkatan Prestasi Inovasi	Prestasi Inovasi Perangkat Daerah	Persen	100	100	100,00%	100	100	100,00%	Tetap
B.22	Tindak lanjut pengaduan SP4N Lapor	Tindak lanjut pengaduan SP4N Lapor	Persen	N/A	N/A	N/A	100	100	100,00%	Meningkat
B.23	Meningkatnya Pengamanan Aset	Pengamanan Aset Tanah	Persen	N/A	N/A	N/A	75	50	66,67%	Meningkat
B.24	Meningkatnya Tata Kelola Aset	Pakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan jumlah pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana pada perangkat daerah	Persen	N/A	N/A	N/A	100	100	100,00%	Meningkat
B.25	Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	Jumlah program pengentasan kemiskinan	Jumlah	1	1	100,00%	1	1	100,00%	Tetap

B.26	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting sesuai dengan target Nasional	Persen	16,5	12,43	75,33%	14	14,64	104,57%	Meningkat
B.27	Pengarusutamaan Gender	Ketersediaan pengganggaran pengarusutamaan gender	Persen	N/A	N/A	N/A	100	100	100,00%	Meningkat
B.28	Pengendalian Inflasi	Angka inflasi maksimal 1,5% - 3,5%	Persen	N/A	N/A	N/A	100	100	100,00%	Meningkat
B.29	Kepatuhan Pelaporan P3DN	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan	Persen	N/A	N/A	N/A	40	40	100,00%	Meningkat
B.30	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	N/A	N/A	N/A	3,6	3,1135	86,49%	Meningkat
B.31	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	70	67,86	96,94	73	65,92	90,30%	Menurun
B.32	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai	63	62,74	99,59	64	60,12	93,94%	Menurun
B.33	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	N/A	N/A	N/A	49,57	58,59	118,20%	Meningkat
B.34	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai	8,90	8,48	95,28	8,95	8,7	97,21%	Meningkat
B.35	Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Standar Payanan Pemerintah Daerah	Predikat	Zona Hijau	Zona Hijau	100,00%	Zona Hijau	Zona Hijau	100,00%	Tetap
B.36	Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/vape	Kawaaan Tanpa Rokok/Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau	Persen	100	100	100,00%	100	100	100,00%	Tetap

B.37	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM perangkat daerah (Aplikasi Survey Kukar)	Persen	100	89,73	89,73%	100	91,76	91,76%	Meningkat
B.38	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	73,47	72,41	98,56%	73,81	73,59	99,70%	Meningkat
B.39	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	91,27	91,27	100	102,25	102,25%	Meningkat
B.40	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan Pemetaan Kemampuan Mengaji	Laporan	N/A	N/A	N/A	1	1	100,00%	Meningkat
B.41	Terbentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ)	SK Pembentukan UPZ Kecamatan Muara Jawa	Surat Keputusan	N/A	N/A	N/A	1	1	100,00%	Meningkat
			TOTAL PROSENTASE	**1965,4**	**1844,47**	**93,85**	**1974,95**	**1890,84**	**95,74**	**Meningkat**

Untuk Indikator Tujuan Kecamatan Muara Jawa yaitu Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Muara Jawa, secara nilai Hasil Survey Kepuasan Pelayanan Masyarakat menggunakan aplikasi Survey Kukar untuk tahun 2024 senilai 91,76 mengalami peningkatan dari realisasi tahun 2023 senilai 89,73. Namun karena target tahun 2024 meningkat dibandingkan target tahun 2023 maka mempengaruhi prosentase capaian indicator tujuan menjadi 143,38% di tahun 2024 yang menurun disbanding tahun 2023 sebesar 144,73%.

Namun secara keseluruhan dari total 45 indikator (1 indikator tujuan, 3 indikator sasaran utama, dan 41 indikator 41 indikator sasaran tambahan) capaian kinerja sebesar 95,74% meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar 93,85%.

3.1.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Kecamatan Muara Jawa periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4

Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Tahun 2024	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
	TUJUAN				
A.1	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan yang efektif, efisien, inovatif, transparan dan akuntabel	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	91,76	64	143%
	SASARAN				
B.1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	100	65	154%
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	84	119%
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Kewenangan Kecamatan	N/A	25	N/A
B.2	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun	97,5	100	98%
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun	100	100	100%
B.3	Mewujudkan tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	100	100	100%
B.4	Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP	Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun	100	100	100%
B.5	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	100	100	100%

B.6	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan RKBMD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang akan diadakan	100	100	100%
B.7	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan)	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan (SHS) Perangkat Daerah Paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya	0	100	0%
B.8	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian LKjIP	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	100	100	100%
B.9	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap tahun	100	100	100%
B.10	Terlaksananya Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir bulan Juni dan Semester II akhir bulan oktober setiap tahun	50	100	50%
B.11	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	100	100	100%
B.12	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah	Tindak lanjut hasil temuan administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir	84,86	100	84,86%
B.13	Terlaksananya ketepatan waktu penyampaian SPIP	Ketepatan waktu penyampaian laporan penilaian mandiri penyelenggaraan SPIP perangkat daerah per 30 Juni tahun berjalan	100	100	100%
B.14	Penerapan Core Values ASN Berahlak	Internalisasi core values ASN Berahlak	100	100	100%
B.15	Penyusunan perjanjian kinerja sampai ke pelaksana	Ketepatan waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD diterapkan)	100	100	100%
B.16	Terlaksananya serapan anggaran berdasarkan SPD yang diterbitkan	Seraopan anggaran berdasarkan SPD yang diterbitkan	94,7	70	135%
B.17	Ketersediaan dokumen Manajemen risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen risiko pada Perangkat Daerah per Triwulan	100	100	100%

B.18	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	100	100	100%
B.19	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Nilai Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	72,01	100	72%
B.20	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	49,32	100	49%
B.21	Peningkatan Prestasi Inovasi	Prestasi Inovasi Perangkat Daerah	100	100	100%
B.22	Tindak lanjut pengaduan SP4N Lapor	Tindak lanjut pengaduan SP4N Lapor	100	100	100%
B.23	Meningkatnya Pengamanan Aset	Pengamanan Aset Tanah	50	75	67%
B.24	Meningkatnya Tata Kelola Aset	Pakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan jumlah pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana pada perangkat daerah	100	100	100%
B.25	Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	Jumlah program pengentasan kemiskinan	1	1	100%
B.26	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting sesuai dengan target Nasional	14,64	14	105%
B.27	Pengarusutamaan Gender	Ketersediaan pengganggaran pengarusutamaan gender	100	100	100%
B.28	Pengendalian Inflasi	Angka inflasi maksimal 1,5% - 3,5%	100	100	100%
B.29	Kepatuhan Pelaporan P3DN	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan	40	40	100%
B.30	Menirigkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	3,1135	3,6	86%
B.31	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	65,92	73	90%
B.32	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	60,12	64	94%
B.33	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	58,59	49,57	118%
B.34	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	8,7	8,95	97,21%
B.35	Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Standar Payanan Pemerintah Daerah	Zona Hijau	Zona Hijau	100%
B.36	Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/vape	Kawaaan Tanpa Rokok/Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau	100	100	100%

B.37	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM perangkat daerah (Aplikasi Survey Kukar)	91,76	100	92%
B.38	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,59	100	74%
B.39	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	102,25	100	102,25%
B.40	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan Pemetaan Kemampuan Mengaji	1	1	100%
B.41	Terbentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ)	SK Pembentukan UPZ Kecamatan Muara Jawa	1	1	100%

Dari table tersebut diatas, terdapat beberapa indicator kinerja yang capaiannya dibawah 75% dan menjadi titik perhatian Pemerintah Kecamatan Muara Jawa yaitu :

1. **Indikator sasaran tambahan B.2.7 Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan (SHS) Perangkat Daerah Paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya.** Nilai capaian adalah 0% disebabkan karena OPD tidak menyampaikan Usulan Standard Harga Satuan karena Sebagian besar SHS telah terakomodir dalam aplikasi SIPD. Tindak lanjut kedepannya adalah Pemerintah Kecamatan Muara Jawa wajib menyampaikan usulan Standard harga Satuan selain untuk mencapai target kinerja juga untuk menghindari tidak tersedianya SHS saat menyusun RKA/DPA.
2. **Indikator sasaran tambahan B.2.10 Tingkat Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir bulan Juni dan Semester II akhir bulan oktober setiap tahun**. Nilai capaian adalah 50% disebabkan karena Penyusunan dan Pelaporan SKM dan RTL Semester 1 Tahun 2024 telah dilaksanakan tepat waktu, namun untuk SKM dan RTL Semester 2 Tahun 2024 mengalami keterlambatan penyampaian laporan sehingga capaian kinerja tidak terpenuhi. Langkah perbaikan yang perlu diambil adalah Mengupayakan agar Laporan SKM dan RTL Semester 1 dan Semester 2 Tahun 2025 dapat disusun dan disampaikan secara tepat waktu.
3. **Indikator sasaran tambahan B.2.19 Nilai Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah.** Nilai Capaian 72%. Diperlukannya peningkatan capaian kinerja dengan peningkatan tata kelola arsip di setiap bidang/bagian Kantor Camat dan juga Kelurahan, serta perbaikan sarana dan prasaran untuk pengelolaan dan penyimpanan arsip.

4. **Indikator sasaran tambahan B.2.20 Nilai SAKIP Perangkat Daerah.** Nilai Capaian 39,32%. Dari Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023 Sistem dan Tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan, manajemen kinerja belum terimplementasi dengan baik, penyampaian LKJIP Tahun 2023 yang tidak tepat waktu yang disebabkan oleh kesulitan mengumpulkan bukti dukung kinerja. Langkah -langkah Perbaikan diperlukan dalam perencanaan,pelaksanaan,pengukuran,pelaporan dan evaluasi Kinerja sesuai Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2024 serta upaya penyampaian LKJIP.

3.1.4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan yang efektif, efisien, inovatif, transparan dan akuntabel	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	91,76	98,77	93%

Data yang digunakan sebagai pembanding capaian kinerja Kecamatan Muara Jawa Tahun 2024 adalah Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur yang tertuang dalam Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Krian Periode 01 Juli - 31 Desember 2024. Dari tabel tersebut Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Muara Jawa sebesar 93% dibandingkan dengan Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Krian Sidoarjo.

Lebih lengkap Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Krian dapat diakses melalui link: https://drive.google.com/file/d/1tzQ36b_4-Ssjj1pybfUscr7vCnE_5FE6/view?usp=sharing

3.1.5. Analisis Keberhasilan, Kegagalan Indikator Kinerja dan Solusi

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja Kecamatan Muara Jawa Tahun 2024 serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6

Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	SOLUSI YANG DILAKUKAN
	TUJUAN						
A.1	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan yang efektif, efisien, inovatif, transparan dan akuntabel	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	64	91,76	143,38%	Pelaksanaan pemberian pelayanan kepada masyarakat terus-menerus dilakukan upaya perbaikan, pembinaan SDM pelaksana, serta ketersediaan prosedur pemberian pelayanan	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja
	SASARAN						
B.1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	65	100	153,85%	Berkaitan dengan standar pelayanan PATEN yang telah dilaksanakan serta ketersediaan SDM	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja

		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	84	100	119,05%	Berkaitan dengan standar pelayanan PATEN yang telah dilaksanakan serta ketersediaan SDM, dan adanya koordinasi serta kerjasama dengan instansi/dinas/badan terkait baik secara vertikal maupun horisontal dalam upaya penanganan ketertiban umum.	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Kewenangan Kecamatan	25	N/A	N/A	Tidak lagi diperhitungkan sejak adanya Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 40 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan bangunan gedung, penerbitan ijin secara online melalui aplikasi simbg.pu.go.id sehingga tidak ada lagi penerbitan IMB dan pemungutan retribusinya di Kecamatan	Penyampaian usulan penghapusan IKU ke OPD Pengampu (Bappeda)
B.2	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun	100	97,5	97,50%	Terdapat 1 ASN yang telah membuat dan menyampaikan e-LHKPN, namun dokumen dikembalikan untuk beberapa perbaikan, dan hasil perbaikan tidak dikirimkan kembali.	Pimpinan OPD beserta Admin e-LHKPN OPD dan Pejabat Pembina Kepegawaian OPD wajib untuk memonitoring proses dan progres penyampaian pelaporan sebelum 31 Maret setiap tahunnya.
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun	100	98,6	98,60%	Terdapat 1 ASN yang belum membuat dan melaporkan SPT Tahunan tahun 2023 per 31 Maret 2024	Pimpinan OPD beserta Pejabat Pembina Kepegawaian OPD wajib untuk memonitoring proses dan progres penyampaian pelaporan sebelum 31 Maret setiap tahunnya.

B.3	Mewujudkan tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	100	100	100,00%	Batasan waktu dalam input e-Kinerja dari BKN dan BKPSDM serta komitmen dari Pimpinan OPD dan Pejabat Pembina Kepegawaian OPD dalam memberikan pemahaman akan pentingnya penyusunan dan penyampaian SKP sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja.	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja
B.4	Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP	Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun	100	100	100,00%	Batasan waktu inputan, monitoring berkala baik dari OPD Pengampu (UKPBJ) serta Pimpinan ODP sangat mempengaruhi proses dan progres penginputan dan pengumuman paket pengadaan pada alikasi SIRUP	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja
B.5	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	100	100	100,00%	Batasan waktu inputan dan monitoring berkala baik dari OPD Pengampu (BAPPEDA) serta Pimpinan ODP sangat mempengaruhi proses dan progres penginputan pada aplikasi e-pantau	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja
B.6	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan RKBMD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100% sesuai dengan Barang	100	100	100,00%	Batasan waktu penyampaian usulan dari OPD Pengampu (BPKAD Bidang Aset) sangat mempengaruhi proses dan progres penyampaian usulan RKMD.	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja

		Milik Daerah (BMD) yang akan diadakan					
B.7	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan)	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan (SHS) Perangkat Daerah Paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya	100	0	0,00%	OPD tidak menyampaikan Usulan Standard Harga Satuan karena Sebagian besar SHS telah terakomodir dalam aplikasi SIPD	Memetakan kebutuhan-kebutuhan SHS yang belum terakomodir sesuai kebutuhan OPD untuk disampaikan tepat waktu
B.8	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian LKjIP	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	100	100	100,00%	Batasan waktu yang diberikan oleh OPD Pengampu (Menpan RB dan Ortal) serta komitmen untuk melakukan upaya-upaya perbaikan sesuai Rekomendasi yang tertuang dalam LHE SAKIP Tahun 2023	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja

B.9	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap tahun	100	100	100,00%	Faktor keberhasilan capaian indikator kinerja ini adalah :Ketersediaan Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang batasan waktu penyampaian Laporan Keuangan setiap tahun, ketersediaan data-data komponen Laporan Keuangan baik dari aplikasi SIPD maupun data-data manual yang bersumber dari internal OPD, komitmen para pengelola keuangan di OPD, serta jadwal proses review LK SKPD oleh Inspektorat dan BPK yang harus dipatuhi.	Penguatan pengelolaan dokumen-dokumen pelaksanaan belanja OPD serta validitas dan ketepatan waktu penyampaian serta pelaporannya harus terus menerus dijaga dan ditingkatkan kualitasnya. Komitmen seluruh pelaksana kegiatan wajib terus-menerus ditingkatkan kualitasnya.
B.10	Terlaksananya Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir bulan Juni dan Semester II akhir bulan oktober setiap tahun	100	50	50,00%	Penyusunan dan Pelaporan SKM dan RTL Semester 1 Tahun 2024 telah dilaksanakan tepat waktu, namun untuk SKM dan RTL Semester 2 Tahun 2024 mengalami keterlambatan penyampaian laporan sehingga capaian kinerja tidak terpenuhi.	Mengupayakan agar Laporan SKM dan RTL Semester 1 dan Semester 2 Tahun 2025 dapat disusun dan disampaikan secara tepat waktu.

B.11	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	100	100	100,00%	Banyak peraturan-peraturan dan kebijakan pemerintah terkait pelayanan yang perlu disosialisasikan	Peningkatan kegiatan FKP
B.12	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah	Tindak lanjut hasil temuan administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir	100	84,86	84,86%	Beberapa pihak rekanan hingga 27 Februari 2025 belum melakukan pengembalian kelebihan pembayaran atas pekerjaan tahun 2024	Penekanan dan upaya terus dilakukan oleh pihak Kecamatan agar penyedia segera menyelesaikan tanggungjawabnya.
B.13	Terlaksananya ketepatan waktu penyampaian SPIP	Ketepatan waktu penyampaian laporan penilaian mandiri penyelenggaraan SPIP perangkat daerah per 30 Juni tahun berjalan	100	100	100,00%	Monev dari OPD Pengampu, batasan waktu serta komitmen Aparatur Kecamatan untuk memenuhi target	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja
B.14	Penerapan Core Values ASN Berahlak	Internalisasi core values ASN Berahlak	100	100	100,00%	Upaya-upaya Internalisasi core values ASN Berahlak telah dilaksanakan	Peningkatan pelaksanaan Internalisasi core values ASN Berahlak

B.15	Penyusunan perjanjian kinerja sampai ke pelaksana	Ketepatan waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD diterapkan)	100	100	100,00%	Batasan waktu dalam input e-Kinerja serta komitmen dari Pimpinan OPD dan Pejabat Pembina Kepegawaian OPD dalam memberikan pemahaman akan pentingnya penyusunan dan penyampaian SKP sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja.	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja
B.16	Terlaksananya serapan anggaran berdasarkan SPD yang diterbitkan	Serapan anggaran berdasarkan SPD yang diterbitkan	70	95,9	137,00%	Ketersediaan anggaran melalui SPD, ketersediaan SDM pelaksana pengelola kegiatan dan keuangan, ketersediaan tekhnologi/aplikasi pendukung untuk pelaksanaan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan yang telah terintegrasi	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja
B.17	Ketersediaan dokumen Manajemen risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen risiko pada Perangkat Daerah per Triwulan	100	100	100,00%	Monev dari OPD Pengampu, batasan waktu serta komitmen Aparatur Kecamatan untuk memenuhi target	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja
B.18	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	100	100	100,00%	Monev dari OPD Pengampu, batasan waktu serta komitmen Aparatur Kecamatan untuk memenuhi target	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja

B.19	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Nilai Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	100	72,01	72,01%	Ketersediaan sarana dan prasarana pengelola dan penyimpanan arsip, penggunaan apliaksi SRIKANDI untuk penciptaan arsip	Diperlukannya peningkatan capaian kinerja dengan peningkatan tata kelola arsip di setiap bidang/bagian Kantor Camat dan juga Kelurahan, serta perbaikan sarana dan prasaran untuk pengelolaan dan penyimpanan arsip.
B.20	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100	49,32	49,32%	Sistem dan Tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan, manajemen kinerja belum terimplementasi dengan baik, penyampaian LKJIP Tahun 2023 yang tidak tepat waktu yang disebabkan oleh kesulitan mengumpulkan bukti dukung kinerja.	Perbaikan dalam perencanaan,pelaksanaan,pengukuran,pelaporan dan evaluasi Kinerja sesuai Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2024 serta upaya penyampaian LKJIP Tahun 2024 tepat waktu yaitu paling lambat akhir Februari 2025 untuk perbaikan implementasi AKIP Tahun 2025.
B.21	Peningkatan Prestasi Inovasi	Prestasi Inovasi Perangkat Daerah	100	100	100,00%	Banyak persoalan-persoalan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat yang dapat digali untuk menjadi ide inovasi	Potensi pelayanan kepada masyarakat yang dapat digali untuk menjadi ide inovasi
B.22	Tindak lanjut pengaduan SP4N Lapor	Tindak lanjut pengaduan SP4N Lapor	100	100	100,00%	Belum maksimal	Perlu dilakukan sosialisasi SP4N Lapor

B.23	Meningkatnya Pengamanan Aset	Pengamanan Aset Tanah	75	50	66,67%	Sejak 2022-2024 Kecamatan Muara Jawa masih berfokus pada pengamanan aset tanah berupa pemasangan papan/plank dan belum pada pemagaran. Hal ini karena banyaknya bidang tanah milik Pemkab yang harus diamankan dan keterbatasan anggaran.	Tahun 2025 masih berfokus pada penyelesaian pemasangan plank/papan nama. Pemagaran direncanakan dilaksanakan di tahun 2026
B.24	Meningkatnya Tata Kelola Aset	Pakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan jumlah pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana pada perangkat daerah	100	100	100,00%	Ketersediaan SOP Pengelolaan BMD, Komitmen dari Pimpinan OPD selaku Pengguna Barang dan aparatur-aparatur pengelola BMD	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja
B.25	Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	Jumlah program pengentasan kemiskinan	1	1	100,00%	Adanya program pengentasan kemiskinan dari Pemkab Kutai kartanegara serta bantuan dari pihak swasta melalui CSR	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja

B.26	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting sesuai dengan target Nasional	14	8,4	140,00%	Secara wilayah, khusus Kecamatan Muara Jawa angka prevalensi stunting tahun 2024 adalah 8,4 yang berada dibawah target prevalensi stunting Kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kecamatan Muara Jawa beserta OPD/Dinas terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan, Unsur Muspika, Kader Posyandu, PKK, Unsur masyarakat telah berhasil menurunkan angka prevalensi stunting	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja
B.27	Pengarusutamaan Gender	Ketersediaan pengganggaran pengarusutamaan gender	100	100	100,00%	Ketersediaan pengganggaran pengarusutamaan gender serta pendampingan dinas DP3A dalam penyusunan PUG GAP dan GBS	Peningkatan komitmen dan upaya-upaya untuk pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang mendukung pengarusutamaan gender
B.28	Pengendalian Inflasi	Angka inflasi maksimal 1,5% - 3,5%	100	100	100,00%		
B.29	Kepatuhan Pelaporan P3DN	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan	40	40	100,00%		
B.30	Menirigkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	3,6	3,1135	86,49%		

B.31	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	73	65,92	90,30%		
B.32	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	64	60,12	93,94%		
B.33	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	49,57	58,59	118,20%		
B.34	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	8,95	8,7	97,21%		
B.35	Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Standar Payanan Pemerintah Daerah	Zona Hijau	Zona Hijau	100,00%		
B.36	Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/vape	Kawaaan Tanpa Rokok/Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau	100	100	100,00%	Kesadaran aparatur untuk menerapkan konsep Kawasan Tanpa Rokok	Contoh perilaku secara nyata dari aparatur serta sosialisasi kepada warga yang berurusan di Knator Kecamatan dan Kelurahan
B.37	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM perangkat daerah (Aplikasi Survey Kukar)	100	91,76	91,76%		

B.38	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	100	73,59	73,59%		
B.39	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	100	102,25	102,25%	Banyaknya indikator kinerja dalam segala aspek kegiatan kecamatan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja
B.40	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan Pemetaan Kemampuan Mengaji	1	1	100,00%	Ketersediaan SDM untuk melaksanakan GEMA	Komitmen seluruh aparatur untuk rutin melaksanakan GEMA untuk meningkatkan IMTAQ serta kemampuan mengaji
B.41	Terbentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ)	SK Pembentukan UPZ Kecamatan Muara Jawa	1	1	100,00%	Potensi zakat dari penghasilan aparatur	Komitmen seluruh aparatur untuk bersedia dipotong zakat penghasilan

3.1.6. Analisis Keberhasilan, Kegagalan Program dan Kegiatan

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Kecamatan Muara Jawa Tahun 2024.

Tabel 3.7

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
	TUJUAN										
A	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan yang efektif, efisien, inovatif, transparan dan akuntabel	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	64	91,76	143%						
	SASARAN										
B	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	65	100	153,85%	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**64 Nilai**	**49,32 Nilai**	**77,06**	**Menunjang**
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	84	100	119,05%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 dokumen	20 dokumen	100	Menunjang
		Pertumbuhan Pendapatan Asli	25	N/A	N/A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan	18 laporan	18 laporan	100	Menunjang

		Kewenangan Kecamatan					Perangkat Daerah yang akuntabel				
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	1017 unit	1017 unit	100	Menunjang
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian	86 Orang	86 Orang	100	Menunjang
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	11 jenis	11 jenis	100	Menunjang
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 bulan	12 bulan	100	Menunjang
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	199 unit	198 unit	99,5	Menunjang
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	80 Persen	80 Persen	100	Menunjang
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP**	**85**	**97**	**114,12**	**Menunjang**
							Tingkat Aksesibilitas	**87,5**	**100**	**114,29**	**Menunjang**

							WIlayah Kecamatan				
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100	Menunjang
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan**	**100**	**100**	**100**	**Menunjang**
						Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	84 Kegiatan	84 Kegiatan	100	Menunjang
						Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	348 Lembaga	348 Lembaga	100	Menunjang
						PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100**	**100**	**100**	**Menunjang**
						Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100	Menunjang

3.2 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan tahun 2024

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Muara Jawa Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8

Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**20.934.049.141**	**18.640.275.753**	**89,04%**
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.000.000	21.808.425	14,54%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.407.011.129	12.411.846.643	92,58%
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	130.200.000	128.720.000	98,86%
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	130.000.000	65.276.668	50,21%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.160.145.294	1.622.175.575	75,10%
7.01.01.2.07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.372.506.012	3.208.431.774	95,13%
7.01.01.2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.394.186.706	994.336.668	71,32%
7.01.01.2.09	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	190.000.000	187.680.000	98,78%
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**53.284.809.000**	**52.195.110.684**	**97,95%**
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	53.284.809.000	52.195.110.684	97,95%
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**21.793.760.877**	**21.239.661.765**	**97,46%**
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	14.916.887.000	14.714.224.265	98,64%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	6.876.873.877	6.525.437.500	94,89%
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**1.115.612.000**	**1.074.524.500**	**96,32%**
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.115.612.000	1.074.524.500	96,32%
	JUMLAH	**97.128.231.018**	**93.149.572.702**	**95,90%**

3.3 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Muara Jawa tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

NO	Program	Indikator	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Keterangan
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian		
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=(8/7)*100%	10=6/9	11
	TUJUAN									
A	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan yang efektif, efisien, inovatif, transparan dan akuntabel	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	64	91,76	143%	97.128.231.018,00	93.149.572.702,00	95,90%	1,49	Efisien

	SASARAN									
B	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	65	100	153,85%	96.012.619.018,00	92.075.048.202,00	89,04%	1,73	Efisien
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	84	100	119,05%	1.115.612.000,00	1.074.524.500,00	96,32%	1,24	Efisien
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Kewenangan Kecamatan	25	N/A	N/A	-	-	-	-	-

Note:

Jika tingkat efisiensi mencapai kurang dari 1, maka **tidak efisien**

Jika tingkat efisiensi mencapai lebih dari atau sama dengan 1, maka **efisien**

Uraian penjelasan tabel :

Seluruh penggunaan anggaran untuk pencapaian kinerja indicator tujuan dan sasaran adalah efisien.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

NO	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Keterangan
		Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian		
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8=7/6	9=(8/5)	11
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**64 Nilai**	**49,32 Nilai**	**77,06%**	**20.934.049.141**	**18.640.275.753**	**89,04%**	**0,87**	**Tidak Efisien**
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 dokumen	20 dokumen	100,00%	150.000.000	21.808.425	14,54%	6,88	Efisien
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18 laporan	18 laporan	100,00%	13.407.011.129	12.411.846.643	92,58%	1,08	Efisien
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1017 unit	1017 unit	100,00%	130.200.000	128.720.000	98,86%	1,01	Efisien
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	86 Orang	86 Orang	100,00%	130.000.000	65.276.668	50,21%	1,99	Efisien
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	11 jenis	11 jenis	100,00%	2.160.145.294	1.622.175.575	75,10%	1,33	Efisien
7.01.01.2.07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	100,00%	3.372.506.012	3.208.431.774	95,13%	1,05	Efisien
7.01.01.2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	199 unit	198 unit	99,50%	1.394.186.706	994.336.668	71,32%	1,40	Efisien

7.01.01.2.09	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80 Persen	80 Persen	100,00%	190.000.000	187.680.000	98,78%	1,01	Efisien
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**85**	**97**	**114,12%**	**1.471.094.000**	**1.370.855.991**	**93,19%**	**1,22**	**Efisien**
		87,5	**100**	**114,29%**	**51.813.715.000**	**50.824.254.693**	**98,09%**	**1,17**	**Efisien**
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100,00%	53.284.809.000	52.195.110.684	97,95%	1,02	Efisien
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**100**	**100**	**100,00%**	**21.793.760.877**	**21.239.661.765**	**97,46%**	**1,03**	**Efisien**
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	84 Kegiatan	84 Kegiatan	100,00%	14.916.887.000	14.714.224.265	98,64%	1,01	Efisien
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	348 Lembaga	348 Lembaga	100,00%	6.876.873.877	6.525.437.500	94,89%	1,05	Efisien
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**100**	**100**	**100,00%**	**1.115.612.000**	**1.074.524.500**	**96,32%**	**1,04**	**Efisien**
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100,00%	1.115.612.000	1.074.524.500	96,32%	1,04	Efisien

Uraian penjelasan tabel :

Dari 4 Program yang dilaksanakan, hanya ada 1 program yang penggunaan anggarannya tidak efisien menurt perhitunagn pada table tersebut diatas yaitu program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota, Hal ini disebabkan karena capain indicator kinerja berupa Nilai SAKIP Tahun 2023 tidak sesuai target.Namun pada kenyataan dalam pelaksanaan kinerja sehari-hari ketersediaan anggaran apad program tersebut sesuai kebutuhan. Yang diperlukan kedepannya adalah peningkatan kinerja serta buktinya untuk emncaai target agar anggaran yang etrsedia dapat dimanfaatkan secara efisien.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Muara Jawa Tahun 2024. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Kecamatan Muara Jawa Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Muara Jawa dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2024 Kecamatan Muara Jawa menetapkan sebanyak 1 tujuan, 1 sasaran utama dengan 3 indikator dan 40 sasaran tambahan dengan 41 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan 1 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 143,38% dengan kategori Sangat Tinggi (berdasar table 3.2)

- Sasaran utama 1 terdiri dari 3 indikator kinerja utama dengan capaian kinerja sebesar 153,85% dan 119,05% dengan kategori Sangat Tinggi. Sedangkan 1 indikator tidak diperhitungkan sejak tahun 2022.

- Sasaran tambahan 40 terdiri dari 41 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 90,76% kategori Tinggi.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 41 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai kartanegara Kecamatan Muara Jawa dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 97.128.231.018,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 93.149.572.702,00 dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 serapan anggaran sebesar 95,90%dan rata-rata nilai efisiensi anggaran sebesar 1,06% yang merupakan rerata dari efisiensi anggaran 4 program kerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten/Kota.

Kutai Kartanegara, 28 Februari 2025

CAMAT
KECAMATAN MUARA JAWA

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Camat Muara Jawa Kutai Kartanegara

MUHAMMAD RAMLI, S.E.,M.M.
Pembina, IV/a

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN MUARA JAWA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAFRUDDIN, S.Sos., MM
Jabatan : CAMAT

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.
Jabatan : BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1 Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;

2 Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);

3 Melaksanakan penilaian dan rencana kinerja pegawai serta nilai-nilai ASN "BerAKHLAK";

4 Melaksanakan Pengelolaan Barang dan Jasa secara efektif, transparan dan akuntabel;

5 Melaksanakan secara konsisten proses tata kelola keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan

6 Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang Milik Daerah;

7 Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;

8 Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;

9 Melaksanakan upaya mitigasi risiko dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien;

10 Melaksanakan Manajemen Resiko program dan kegiatan Perangkat Daerah;

11 Memastikan terlaksananya pembangunan yang berbasis kesetaraan gender;

12 Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;

13 Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;

14 Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;

15 Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting;

16 Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;

17 Melaksanakan upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup Kabupaten Kutai Kartanegara;

18 Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;

19 Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;

20 Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 08 Januari 2024

Pihak Kedua, BUPATI KUTAI KARTANEGARA	Pihak Pertama, CAMAT
Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.	**SAFRUDDIN, S.Sos., MM** Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 196708141988031009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN MUARA JAWA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	65
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	84
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	25
2	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun	Persen	100
3	Mewujudkan tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100
4	Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP	Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun	Persen	100
5	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

6	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan RKBMD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang akan diadakan	Persen	100
7	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan)	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan (SHS) Perangkat Daerah Paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya	Persen	100
8	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian LKjIP	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100
9	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap tahun	Persen	100
10	Terlaksananya Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir bulan Juni dan Semester II akhir bulan oktober setiap tahun	Persen	100
11	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100

12	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir:	Persen	100
13	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat daerah per 30 Juni Tahun berjalan	Persen	100
14	Penerapan Core Valeus ASN Berakhlak	Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	Persen	100
15	Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana	Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Persen	100
16	Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan	Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit	Persen	70
17	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
18	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Persen	100
19	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah	Persen	100
20	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen	100
21	Peningkatan Prestasi Inovasi	Prestasi Inovasi Perangkat Daerah	Persen	100
22	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100

23	Meningkatnya Pengamanan Aset	Pengamanan Aset Tanah	Persen	75
24	Meningkatnya Tata Kelola Aset	Pakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan jumlah pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana pada perangkat daerah	Persen	100
25	Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	Jumlah program pengentasan kemiskinan	Jumlah	1
26	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting sesuai dengan target Nasional	Persen	14
27	Pengarusutamaan Gender	Ketersediaan pengganggaran pengarusutamaan gender	Persen	100
28	Pengendalian Inflasi	Angka inflasi maksimal 1,5% - 3,5%	Persen	100
29	Kepatuhan Pelaporan P3DN	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan	Persen	40
30	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,6
31	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	73
32	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai	64
33	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	49,57
34	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai	8,95
35	Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah	Predikat	Zona Hijau

36	Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/vape	Kawasan Tanpa Rokok/Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau	Persen	100
37	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM perangkat daerah (Aplikasi Survey Kukar)	Persen	100
38	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	100
39	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2024
KECAMATAN MUARA JAWA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	21.084.372.877	APBD
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.936.006.867	APBD
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	46.376.094.000	APBD
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	815.000.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		**89.211.473.744**	

Kutai Kartanegara, 08 Januari 2024

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.

Pihak Pertama,
CAMAT

SAFRUDDIN, S.Sos., MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196708141988031009

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KECAMATAN MUARA JAWA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD RAMLI, S.E,.M.M.
Jabatan : CAMAT

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. EDI DAMANSYAH.,M.Si.
Jabatan : BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1 Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;

2 Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);

3 Melaksanakan penilaian dan rencana kinerja pegawai serta nilai-nilai ASN "BerAKHLAK";

4 Melaksanakan Pengelolaan Barang dan Jasa secara efektif, transparan dan akuntabel;

5 Melaksanakan secara konsisten proses tata kelola keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan

6 Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang Milik Daerah;

7 Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;

8 Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;

9 Melaksanakan upaya mitigasi risiko dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien;

10 Melaksanakan Manajemen Resiko program dan kegiatan Perangkat Daerah;

11 Memastikan terlaksananya pembangunan yang berbasis kesetaraan gender;

12 Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;

13 Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;

14 Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;

15 Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting;

16 Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;

17 Melaksanakan upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup Kabupaten Kutai Kartanegara;

18 Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;

19 Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;

20 Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dari/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Kedua, BUPATI KUTAI KARTANEGARA	Pihak Pertama, CAMAT
Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.	**MUHAMMAD RAMLI, S.E,.M.M.** Pembina (IV/a) NIP. 197506042000121003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KECAMATAN MUARA JAWA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	65
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	84
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	25
2	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun	Persen	100
3	Mewujudkan tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100
4	Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP	Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun	Persen	100
5	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

6	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan RKBMD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang akan diadakan	Persen	100
7	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan)	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan (SHS) Perangkat Daerah Paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya	Persen	100
8	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian LKjIP	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100
9	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap tahun	Persen	100
10	Terlaksananya Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir bulan Juni dan Semester II akhir bulan oktober setiap tahun	Persen	100
11	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100

12	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir:	Persen	100
13	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat daerah per 30 Juni Tahun berjalan	Persen	100
14	Penerapan Core Valeus ASN Berakhlak	Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	Persen	100
15	Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana	Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Persen	100
16	Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan	Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit	Persen	70
17	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
18	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Persen	100
19	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah	Persen	100
20	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen	100
21	Peningkatan Prestasi Inovasi	Prestasi Inovasi Perangkat Daerah	Persen	100
22	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100

23	Meningkatnya Pengamanan Aset	Pengamanan Aset Tanah	Persen	75
24	Meningkatnya Tata Kelola Aset	Pakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan jumlah pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana pada perangkat daerah	Persen	100
25	Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	Jumlah program pengentasan kemiskinan	Jumlah	1
26	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting sesuai dengan target Nasional	Persen	14
27	Pengarusutamaan Gender	Ketersediaan pengganggaran pengarusutamaan gender	Persen	100
28	Pengendalian Inflasi	Angka inflasi maksimal 1,5% - 3,5%	Persen	100
29	Kepatuhan Pelaporan P3DN	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan	Persen	40
30	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,6
31	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	73
32	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai	64
33	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	49,57
34	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai	8,95
35	Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah	Predikat	Zona Hijau

36	Terwujudnya Kawasan tanpa rokok/vape	Kawasan tanpa rokok/vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau	Persen	100
37	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM Perangkat Daerah (Aplikasi Survey Kukar)	Persen	100
38	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	100
39	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100
40	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan Pemetaan Kemampuan Mengaji	Laporan	1
41	Terbentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ)	SK Pembentukan UPZ Kecamatan Muara Jawa	Surat Keputusan	1

PROGRAM DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2024
KECAMATAN MUARA JAWA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	21.808.760.877,00	APBDP
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	20.934.049.141,00	APBDP
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	53.284.809.000,00	APBDP
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.100.612.000,00	APBDP
	JUMLAH ANGGARAN	97.128.231.018,00	

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.

Pihak Pertama,
CAMAT

MUHAMMAD RAMLI, S.E,.M.M.
Pembina (IV/a)
NIP. 197506012000121003

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

Alamat : Jln. Ir. Soekarno No. 58 Kel. Muara Jawa Ulu
Website : www.muarajawa.id
e-mail: kecmuarajawa2020@gmail.com